



CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2015-2017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
TAHUN 2017



CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2015-2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Judul

**CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
TAHUN 2015-2017**

Pengarah

Dr. Abdul Kahar, M.Pd. (Direktur Bindiktara)

Editor

Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
Dr. Cecep Suryana, MM.

Penyusun

- | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 1. | Dr. Cecep Suryana, MM. | (Ketua) |
| 2. | Khairullah, M.Si. | (Anggota) |
| 3. | Yohana Rumanda, SE., M.Pd. | (Anggota) |
| 4. | Dr. Aramudin, M.Pd. | (Anggota) |
| 5. | Dr. Muni Ika, M.Pd. | (Anggota) |
| 6. | Drs. Deden E. Arrifan, M.Pd. | (Anggota) |
| 7. | Dra. Oriza Sativa Sirait, M.Si. | (Anggota) |
| 8. | Lucia Endang Windarti, S.Kom. | (Anggota) |
| 9. | Parsidi, ST. | (Anggota) |
| 10. | Suryadi, SH. | (Anggota) |
| 11. | Meike Anastasia, M.Ed. | (Anggota) |
| 12. | Didida Aisyah Maulida, M.Pd. | (Anggota) |
| 13. | Jamhari, S.Kom. | (Anggota) |

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga memberikan berbagai kemudahan sehingga akhirnya buku ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditbindiktara) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya Ditbindiktara membuat dan melaksanakan berbagai program dan layanan pendidikan untuk memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan 2015 - 2019. Termasuk dalam melaksanakan tugas fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam visi dan misi Ditbindiktara.

Buku Capaian Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2015-2017 memberikan gambaran tentang hasil kegiatan dan program yang telah dilakukan selama kurun waktu 3 tahun. Buku capaian ini diharapkan dapat memberikan informasi keberhasilan program yang lebih memacu terhadap peningkatan pencapaian kinerja Ditbindiktara. Termasuk tantangan, hambatan, solusi dan upaya perbaikan untuk memenuhi target renstra pada tahun berikutnya

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2018



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 19640207 198503 1 005

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

DAFTAR ISI

	Halaman		
HALAMAN JUDUL	i		
KATA PENGANTAR	iii		
DAFTAR ISI	iv		
DAFTAR TABEL	vi		
DAFTAR GAMBAR	viii		
DAFTAR GRAFIK	ix		
BAB I PENDAHULUAN			
A. Latar Belakang	1		
B. Dasar Hukum	4		
C. Tujuan	4		
D. Lingkup Pembahasan	5		
BAB II KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN	7		
A. Renstra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara)	7		
B. Program Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Serta Program Prioritas Nasional dan Program Terobosan	10		
C. Alokasi Anggaran	23		
BAB III CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN	27		
A. Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca Tahun 2015-2017	27		
1. Perkembangan Pendidikan Keaksaraan	27		
2. Pengembangan Budaya Baca	40		
3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah pada Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	44		
4. Penghargaan yang Diraih	47		
5. Contoh Praktik Baik Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	49		
B. Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Tahun 2015-2017	51		
1. Perkembangan Pendidikan Kesetaraan	51		
2. Perkembangan Program Pendidikan Berkelanjutan	60		
		3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Pada Program Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	65
		4. Contoh Kisa Sukses dan Praktik Baik Pengelolaan Program Kesetawraan dan Pendidikan Berkelanjutan	66
		C. Perkembangan Mutu Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	67
		1. Jumlah SPNF (SKB dan PKBM)	68
		2. Jumlah PKBM dan SKB yang Memiliki Layanan TBM	69
		3. Jumlah SPNF (SKB dan PKBM) Terakreditasi	70
		4. Ujian Pendidikan Kesetaraan	71
		5. Kendala/Permasalahan UNPK-BK	75
		6. Perkembangan Model Pengelola Satuan PNF dan Layanan/Pembelajaran PNF	75
		7. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	76
		BAB IV KESIMPULAN	
		A. Kesimpulan	85
		B. Rekomendasi	90
		DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

TABEL PADA BAB II

No. Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
(1)	(2)	(3)
Tabel 2.1	Target IKK Berdasarkan Jumlah	7
Tabel 2.2	Target IKK Berdasarkan Persentase	8
Tabel 2.3	Target IKK Berdasarkan Jumlah	9
Tabel 2.4	Target IKK Berdasarkan Persentase	10
Tabel 2.5	Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	10
Tabel 2.6	Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	11
Tabel 2.7	Program Terobosan Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca	19
Tabel 2.8	Program Terobosan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan	21
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2017	23
Tabel 2.10	Target Fisik Belanja Bantuan Direktorat Bindiktara Tahun 2015-2017	24
Tabel 2.11	Target Anggaran Belanja Bantuan Direktorat Bindiktara Tahun 2015-2017	25

TABEL PADA BAB III

No. Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
(1)	(2)	(3)
Tabel 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Buta Aksara Tahun 2015-2017	27
Tabel 3.2	Peringatan Hari Aksara Internasional Tahun 2015-2017 ..	38
Tabel 3.3	Perbedaan TBM Mandiri dan TBM di PKBM	41
Tabel 3.4	Sasaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017	51
Tabel 3.5	Jumlah Putus Sekolah (DO) dan Putus Lanjut Tahun Pelajaran 2015-2017	52
Tabel 3.6	Perkembangan Jumlah Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	54

No. Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
(1)	(2)	(3)
Tabel 3.7	Alokasi Program dan Anggaran Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017	56
Tabel 3.8	Perbandingan Jumlah Peserta Didik dalam Dapodik dan Alokasi Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017	57
Tabel 3.9	Penetapan Daerah Tertinggal sesuai Perpres No. 131 Tahun 2015	58
Tabel 3.10	Jumlah Dana BOP dan Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan 3T dan Papua dan Papua Barat	59
Tabel 3.11	Program Pendidikan Berkelanjutan	61
Tabel 3.12	Produk yang Dihasilkan dari Penyelenggaraan Desa Vokasi dan PKH-P	64
Tabel 3.13	Lembaga Penyelenggara dan Peserta UNPK Tahun 2015-2017	72
Tabel 3.14	Lembaga Penyelenggara UNPK-BK Tahun 2017	74
Tabel 3.15	Struktur Kurikulum Program Paket A	78
Tabel 3.16	Struktur Kurikulum Program Paket B	79
Tabel 3.17	Struktur Kurikulum Program Paket C (Program IPA)	79
Tabel 3.18	Struktur Kurikulum Program Paket C (Program IPS)	80
Tabel 3.19	Struktur Kurikulum Program Paket C (Program Bahasa) ..	80
Tabel 3.20	Struktur Kurikulum Pendidikan Kesetaraan	82

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR PADA BAB I

No. Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
(1)	(2)	(3)
Gambar 1.1	Data Penurunan Tuna Aksara Tahun 2005-2016	2
Gambar 1.2	Kebijakan dan Program Dit.Bindiktara	3

GAMBAR PADA BAB II

No. Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
(1)	(2)	(3)
Gambar 2.1	Alur Penanganan PIP Tahun 2016-2017	14
Gambar 2.2	Sasaran Penerima Dana PIP Program Pendidikan Non Formal	15
Gambar 2.3	Pembagian Peran dan Fungsi dalam Pelaksanaan PIP	15
Gambar 2.4	Membangun Karakter melalui Pendidikan Keluarga	16
Gambar 2.5	Model Pengelolaan Vokasi Paket C	17
Gambar 2.6	Desain Pengembangan Desa Vokasi	18

GAMBAR PADA BAB III

No. Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
(1)	(2)	(3)
Gambar 3.1	Jumlah Sasaran dan Anggaran Keaksaraan Dasar Tahun 2015-2017.....	33
Gambar 3.2	Jumlah Sasaran dan Anggaran KUM Tahun 2015-2017 ...	34
Gambar 3.3	Jumlah Sasaran dan Anggaran Multiaksara Tahun 2017..	35
Gambar 3.4	Program Keaksaraan Dasar di Daerah KAT/KAK Tahun 2016-2017.....	36
Gambar 3.5	Jumlah Sasaran dan Anggaran KD untuk Daerah 3T, Papua dan Papua Barat Tahun 2016-2017	37
Gambar 3.6	Alokasi Program dan Anggaran Peningkatan Sarana TBM Tahun 2015-2017	42
Gambar 3.7	Program dan Anggaran GIM dan Kampung Literasi Tahun 2016-2017.....	44
Gambar 3.8	Data Peserta Didik dan Anggaran Afirmasi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017	60

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK PADA BAB III

No. Grafik	Keterangan Grafik	Halaman
(1)	(2)	(3)
Grafik 3.1	Trend Penurunan Buta Aksara Nasional Tahun 2014-2017	28
Grafik 3.2	Penurunan Buta Aksara Per Provinsi Tahun 2014-2016....	28
Grafik 3.3	Angka Buta Aksara diatas Angka Nasional Tahun 2016...	29
Grafik 3.4	Lima Provinsi Terpadat Buta Aksara Tahun 2015-2017	30
Grafik 3.5	Kabupaten Terpadat Buta Aksara Tahun 2014-2016 (diatas 50ribu orang)	31
Grafik 3.6	Persentase Kabupaten Terpadat Buta Aksara Tahun 2014-2016 (diatas 50ribu orang)	32
Grafik 3.7	Jumlah TBM Tahun 2014 dan 2017	41
Grafik 3.8	Jumlah DO dan Putus Lanjut Tahun 2015-2017.....	53
Grafik 3.9	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017 (dalam%)	54
Grafik 3.10	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017	55
Grafik 3.11	Perbandingan Persentase BOP dan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017	57
Grafik 3.12	Perkembangan Jumlah Lembaga Penyelenggara, Peserta Didik dan Alokasi Anggaran Vokasi Paket C Tahun 2015-2017	61
Grafik 3.13	Alokasi Anggaran GP3M Tahun 2016-2017	62
Grafik 3.14	Jumlah Lembaga Penyelenggara dan Anggaran Desa Vokasi Tahun 2016-2017.....	63
Grafik 3.15	Lembaga Penyelenggara dan PKH-P Tahun 2015-2017....	64
Grafik 3.16	Keaktifan Lembaga dalam Dapodik PAUD dan Dikmas per November 2017.....	68
Grafik 3.17	Layanan TBM Mandiri dan Layanan TBM di PKBM per November 2017.....	69
Grafik 3.18	SPNF Terakreditasi BAN PNF Tahun 2017	71
Grafik 3.19	Perkembangan Peserta UNPK Tahun 2015-2017	72
Grafik 3.20	Perkembangan Lembaga Penyelenggara UNPK tahun 2015-2017.....	72
Grafik 3.21	Lembaga Penyelenggara UNPK-BK Tahun 2017	74
Grafik 3.22	Peserta UNPK-BK Tahun 2017	74

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
(1)	(2)	(3)
Tabel 1.	Jumlah Penduduk Buta Aksara Per Provinsi Tahun 2014-2016..	94
Tabel 2.	Realisasi Anggaran Program Keaksaraan Dasar Per Provinsi Tahun 2015-2017	95
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Buta Aksara dan Program Keaksaraan Pada Kabupaten Terpadat Buta Aksara Tahun 2015-2017	96
Tabel 4.	Realisasi Anggaran (APBN) Program Keaksaraan pada Kabupaten Terpadat Buta Aksara Tahun 2015-2017.....	97
Tabel 5.	Jumlah Sasaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A per Provinsi Tahun 2015-2017	97
Tabel 6.	Jumlah Alokasi Anggaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A per Provinsi Tahun 2015-2017	98
Tabel 7.	Jumlah Sasaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B per Provinsi Tahun 2015-2017	99
Tabel 8.	Jumlah Alokasi Anggaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B per Provinsi Tahun 2015-2017	100
Tabel 9.	Jumlah Sasaran Pendidikan Kesetaraan Paket C per Provinsi Tahun 2015-2017	101
Tabel 10.	Jumlah Alokasi Anggaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C per Provinsi Tahun 2015-2017	102
Tabel 11.	Jumlah Peserta UN-PK dan Lulusan Pendidikan Kesetaraan Paket A per Provinsi Tahun 2015-2017	103
Tabel 12.	Jumlah Peserta dan Lembaga yang Mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan Paket B per Provinsi Tahun 2015-2017	104
Tabel 13.	Jumlah Peserta dan Lembaga yang Mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan Paket C per Provinsi Tahun 2015-2017.....	104
Tabel 14.	Jumlah PKBM Terakreditasi BAN-PAUD Dikmas Tahun 2015-2017	105
Tabel 15.	Jumlah SPNF SKB Terakreditasi BAN PAUD dan DIKMAS Tahun 2015-2017.....	106

No. Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
(1)	(2)	(3)
Tabel 16.	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan Program Paket A Tahun 2015-2017	107
Tabel 17.	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan Program Paket B Tahun 2015-2017	108
Tabel 18.	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan Program Paket C Tahun 2015-2017	109
Tabel 19.	Jumlah Lembaga dan Peserta Didik Desa Vokasi dan GP3M Tahun 2016-2017	110
Tabel 20.	Jumlah Lembaga dan Peserta Didik Program Kampung Literasi Tahun 2016-2017	111
Tabel 21.	Jumlah Lembaga dan Peserta Didik Program PKH-P Marjinal Tahun 2015-2017	112
Tabel 22.	Jumlah Alokasi Anggaran GIM, Kampung Literasi, GP3M, Desa Vokasi dan PKH-P Tahun 2016-2017	113
Tabel 23.	Jumlah Lembaga dan Peserta Didik Program Vokasi Paket C Tahun 2015-2017	114
Tabel 24.	Jumlah Lembaga dan Peserta Didik BOP Kesetaraan Afirmasi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017	115
Tabel 25.	Jumlah Alokasi Dana APBN BOP Kesetaraan Afirmasi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017	115
Tabel 26.	Jumlah Lembaga dan Peserta Didik BOP Keaksaraan Afirmasi KAT/KAK Tahun 2016-2017	116
Tabel 27.	Jumlah Peserta Didik dan Anggaran BOP Paket A Tahun 2015-2017	117
Tabel 28.	Jumlah Peserta Didik dan Anggaran BOP Paket B Tahun 2015-2017	118
Tabel 29.	Jumlah Peserta Didik dan Anggaran BOP Paket C Tahun 2015-2017	119
Tabel 30.	Jumlah TBM Tahun 2017.....	120
Tabel 31.	Jumlah Rumah Pintar Tahun 2015-2017	120
Tabel 32.	Program dan Anggaran Pendidikan Multikeaksaraan Tahun 2017	121
Tabel 33.	Program dan Anggaran Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2015-2017	122

No. Lampiran	Keterangan Lampiran	Halaman
(1)	(2)	(3)
Tabel 34.	Program dan Anggaran Program Keaksaraan Dasar 3T, Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017	123
Tabel 35.	Program dan Anggaran Program Keaksaraan Dasar 3T Tahun 2016-2017.....	124
Tabel 36.	Program dan Anggaran Peningkatan Sarana TBM Tahun 2015-2017	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2017 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (ditbindiktara), Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sebenarnya telah dimulai tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2019. Capaian tahun ketiga ini dibuat untuk memberikan kerangka tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Ditbindiktara sebagai bagian capaian selama 5 tahun.

Pada tahun 2015, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), yang membawahi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, serta Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.

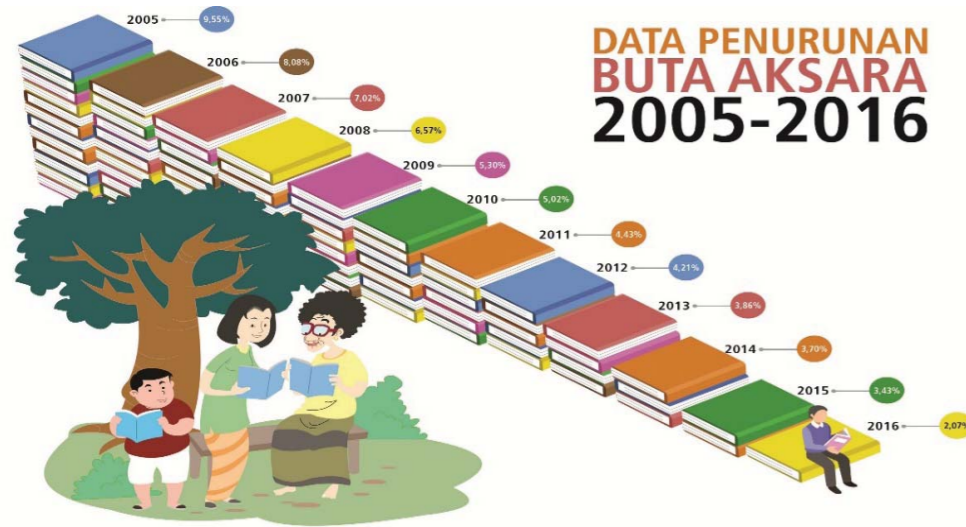
Perubahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menjadi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, tentunya membawa perubahan dalam strategi pemenuhan target yang telah ditetapkan. Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan semakin diperkuat dan menjadi fokus sebagai program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program pendidikan keaksaraan saat ini sudah mulai mengalami pergeseran dan perubahan fokus dari keaksaraan dasar (pemberantasan buta aksara) ke pendidikan keaksaraan lanjutan dan pengembangan budaya baca dengan penekanan pada 6 (enam) literasi abad 21. Hal ini sejalan dengan kebijakan multilateral dimana melek huruf tidak lagi menjadi ukuran HDI dan lebih diharapkan untuk mendukung *life long learning*.

Terkait dengan program penguatan keberaksaraan masyarakat serta untuk membumikan kebijakan pengembangan budaya baca masyarakat secara menyeluruh, mulai tahun 2015 Direktorat pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan telah membuat rintisan “Gerakan Indonesia Membaca” di beberapa wilayah Kab/kota dengan melibatkan para pegiat literasi dan lembaga/SPNF yang selama ini telah bergelut dengan program keaksaraan. Program ini disinergikan juga dengan kegiatan yang dilakukan para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perubahan kebijakan tersebut terkait dengan telah berhasilnya penurunan angka buta aksara secara signifikan. Jika pada tahun 2014 masih ada 5,9 juta angka buta aksara usia 15-59 tahun (.....%), maka pada tahun 2015 jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 5.629.943 orang (3,43%) dan semakin turun tajam pada tahun 2016 menjadi 3,416.693 juta (2,07%).

Gambar 1.1 Data Penurunan Tuna Aksara Tahun 2005-2016



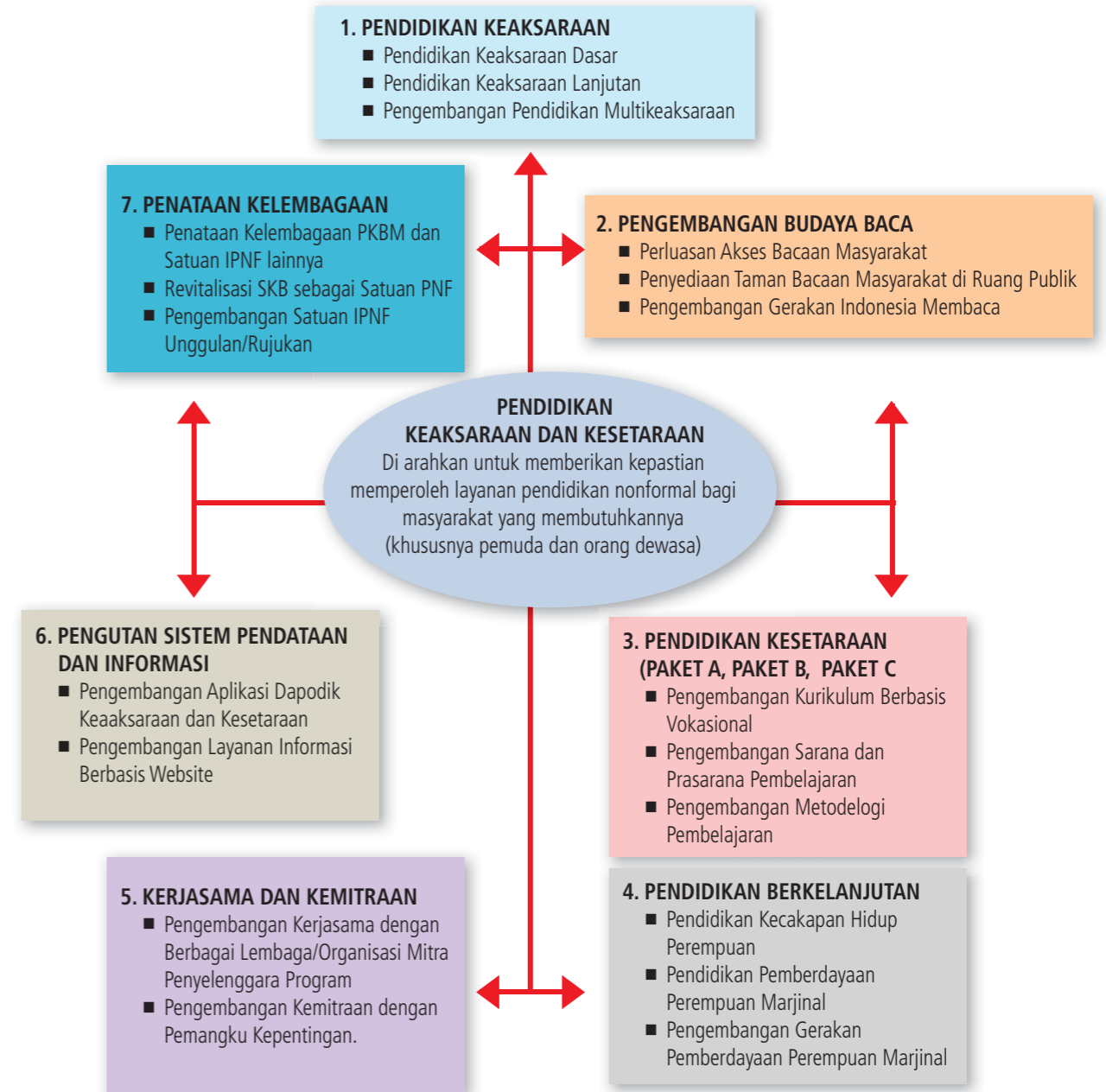
Pada tahun 2015 telah terjadi perubahan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) dialihkan kembali pengelolaan dan pembinaannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yaitu pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar (sembilan tahun) menuju wajib belajar pendidikan menengah universal (PMU) atau pendidikan dua belas tahun.

Pendidikan Kesetaraan sangat strategis dalam menunjang pendidikan nasional dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA melalui Program Paket A, B dan C. Data PDSPK menunjukkan bahwa tahun 2016 melalui Program Paket A memberi kontribusi terhadap APM SD sebesar 0,15% dari 93,73%. Program Paket B memberi kontribusi terhadap APK SMP sebesar 0,92% dari 76,29%. Program Paket C memberikan kontribusi terhadap sebesar APK 1,01 % dari 81,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan telah memberikan manfaat yang signifikan dalam rangka pemerataan dan perluasan pendidikan dasar dan menengah.

Adapun Pendidikan Berkelanjutan dikembangkan dalam mendukung kebijakan *lifelong learning* dan *quality education for all* sebagai perwujudan “Incheon Declaration” yang dicetuskan pada “World Education Forum” tahun 2015 di Korea Selatan. Impelementasinya dilakukan dalam bentuk peningkatan kecakapan hidup perempuan sebagai bagian dari layanan program pendidikan keaksaraan melalui pelatihan keterampilan praktis yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan kewirausahaan. Melalui sinergi dan integrasi program pendidikan tersebut dengan berbagai program pendidikan keterampilan, diharapkan akan terbangun investasi masyarakat pembelajar dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk belajar sepanjang hayat yang menghasilkan penduduk berkarakter, berakarsa, berbudaya baca, responsif gender, dan berakhlak mulia.

Seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (renstra) pendidikan keaksaraan dan kesetaraan 2015 s.d 2019 bahwa pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca serta pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan merupakan Tusi dan arah kebijakan direktorat Bindiktara. Kebijakan program dan layanan Bindiktara dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kebijakan dan Program Ditbindiktara



Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Tugas dan fungsi inilah yang mendasari berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian renstra, terutama pada tahun 2015 s/d 2017.

Implementasi program Ditbindiktara dengan dukungan APBN dan APBD telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan baik dari sisi perluasan akses dan peningkatan mutu layanan. Hal tersebut sangat menarik untuk dianalisis dan dapat dijadikan dasar perumusan perbaikan kebijakan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan layanan Bindiktara pada sisa periode Renstra berikutnya.

Buku ini dimaksudkan untuk menjelaskan arah kebijakan, program dan layanan serta ketercapaian target program dan layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selama periode 2015-2017 yang selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi untuk upaya perbaikan layanan dan program Ditbindiktara lebih lanjut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019;
10. Permendikbud RI Nomor: 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Permendikbud RI Nomor: 86 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Permendikbud Nomor 4/2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

C. Tujuan

Secara umum tujuan analisis perkembangan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ini adalah mengukur tercapainya target Renstra 2015 – 2019, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi, mengidentifikasi praktik baik yang telah dilakukan serta merumuskan upaya perbaikan program dan layanan bindiktara ke depan.

Secara khusus analisis ini bertujuan untuk mengetahui capaian program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam waktu 2015 s.d 2017 terkait antara lain:

1. Mengetahui keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selama tiga tahun kurun waktu 2015 s/d 2017
2. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan

Kesetaraan, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi tantangan dan kendala tersebut, sehingga dapat dicarikan jalan keluar untuk tahun selanjutnya.

3. Memberikan informasi yang tepat mengenai kinerja Direktorat Bindiktara dalam merealisasikan penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan kedalam berbagai komponen kegiatan.
4. Menganalisis perkembangan dan hasil yang dicapai tentang layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun *output*, *outcome* dan *impact* bagi kehidupan masyarakat

D. Lingkup Pembahasan

Buku ini terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB I. Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan lingkup pembahasan

BAB II. Kebijakan Program dan Anggaran Ditbindiktara yang memuat: Renstra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Program Prioritas dan Program Terobosan, serta Alokasi Anggaran

BAB III. Capaian Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, memuat: Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca Tahun 2015-2017, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan Tahun 2015-2017, Perkembangan Mutu Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

BAB IV. Kesimpulan dan Saran



BAB II

KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Renstra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

1. Visi dan misi direktorat Bindiktara

a. Visi

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditbindiktara) sebagai salah satu unit teknis atau satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan visi, yaitu: "Terbentuknya pelaku serta ekosistem pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong".

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menetapkan misi sebagai berikut:

Penguatan pelaku pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, peningkatan mutu dan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, melalui layanan:

- 1) pendidikan keaksaraan;
- 2) pengembangan budaya baca;
- 3) pendidikan kesetaraan;
- 4) pendidikan berkelanjutan (pendidikan pemberdayaan perempuan); dan
- 5) peningkatan penataan kelembagaan dan kemitraan

2. Target Renstra

Berdasar tujuan tersebut telah dirumuskan target capaian Renstra Bindiktara tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target IKK Berdasarkan Jumlah

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Satuan	TARGET (Jumlah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2018.1.1	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Orang	150.525	150.525	150.525	150.525	150.525
IKK.4.2018.1.2	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Pra Paket A	Orang	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
IKK.4.2018.1.3	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	3.140	2.635	2.345	2.245	2.025

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Satuan	TARGET (Jumlah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2018.1.4	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	652.213	169.660	156.558	143.456	130.354
IKK.4.2018.1.5	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	Orang	25.200	407.070	427.449	433.308	429.611
IKK.4.2018.1.6	Jumlah komunitas Sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh Bantuan Operasional Komunitas Sekolah Rumah (BOKSR)	Lembaga	-	35	45	50	50
IKK.4.2018.1.7	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	Desa	-	68	68	68	68
IKK.4.2018.1.8	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	Desa	-	68	68	68	68
IKK.4.2018.1.9	Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	orang	10.000	13.000	15.500	18.000	20.500
IKK.4.2018.1.10	Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota	Lembaga	260	307	307	307	102
IKK.4.2018.1.11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lembaga	445	545	600	625	675
IKK.4.2018.1.12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	Lembaga	-	214	235	257	280
IKK.4.2018.1.13	Jumlah Lembaga TBM Baru yang dibentuk di satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	Lembaga	-	97	125	125	42
IKK.4.2018.1.14	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lembaga	-	20	10	25	25
IKK.4.2018.1.15	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lembaga	-	68	80	100	120
IKK.4.2018.1.16	Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Masyarakat	Dokumen	20	15	10	10	10
IKK.4.2018.1.17	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	2	2	2	2	2
IKK.4.2018.1.18	Jumlah Dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	Dokumen	1	1	1	1	1

Tabel 2.2 Target IKK Berdasarkan Persentase

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Satuan	TARGET (Jumlah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2018.1.1	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Orang	97	97	97	97	98
IKK.4.2018.1.2	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Pra Paket A	Orang	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.3	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.4	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.5	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	Orang	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.6	Jumlah komunitas Sekolah rumah (homeschooling) yang memperoleh Bantuan Operasional Komunitas Sekolah Rumah (BOKSR)	Lembaga	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.7	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	Desa	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.8	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	Desa	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.9	Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	orang	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.10	Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota	Lembaga	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Satuan	TARGET (Jumlah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2018.1.11	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	Lembaga	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.12	Jumlah TBM memperoleh bantuan Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	Lembaga	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.13	Jumlah Lembaga TBM Baru yang dibentuk di satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	Lembaga	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.14	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan Dikmas	Lembaga	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.15	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran Dikmas	Lembaga	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.16	Jumlah Dokumen NSPK Pendidikan Masyarakat	Dokumen	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.17	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	Dokumen	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.18	Jumlah Dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	Dokumen	100	100	100	100	100

3. Perubahan target renstra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 2015-2019

Perubahan Renstra Direktorat Bindiktara sangat diperlukan mengingat setiap tahun pagu anggaran DIPA disetiap satker yang ada di Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas termasuk satker Direktorat Bindiktara terjadi revisi. Hal ini menyebabkan sebagian target dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sudah tidak relevan lagi. Kondisi tersebut menuntut perubahan target & strategi dalam Renstra Direktorat Bindiktara 2015-2019.

Rumusan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasar hasil perubahan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target IKK berdasarkan jumlah

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET (Jumlah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2018.1.1	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar	150.525	150.525	150.525	150.525	150.525
IKK.4.2018.1.2	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
IKK.4.2018.1.3	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	3.140	2.635	2.345	2.245	2.025
IKK.4.2018.1.4	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	652.213	169.660	156.558	143.456	130.354
IKK.4.2018.1.5	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	25.200	407.070	427.449	433.308	429.611
IKK.4.2018.1.6	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	-	68	68	68	68
IKK.4.2018.1.7	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	-	68	68	68	68
IKK.4.2018.1.8	Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	10.000	13.000	15.500	18.000	20.500
IKK.4.2018.1.9	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	445	545	600	625	675
IKK.4.2018.1.10	Jumlah TBM yang dirintis dan memperoleh penguatan	-	214	235	257	280
IKK.4.2018.1.11	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	-	20	10	25	25
IKK.4.2018.1.12	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	-	68	80	100	120
IKK.4.2018.1.13	Jumlah Dokumen NSPK/Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	20	15	10	10	10
IKK.4.2018.1.14	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	2	2	2	2	2
IKK.4.2018.1.15	Jumlah Dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	1	1	1	1	1

Tabel 2.4 Target IKK berdasarkan persentase

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2018.1.1	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar	97	97	97	97	98
IKK.4.2018.1.2	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.3	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.4	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Pendidikan Dasar: Jumlah Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.5	Jumlah Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Setara Menengah Umum (Paket C) dan Vokasional	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.6	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.7	Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.8	Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.9	Jumlah PKBM Memperoleh bantuan penguatan kelembagaan PKBM	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.10	Jumlah TBM yang dirintis dan memperoleh penguatan	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.11	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.12	Jumlah Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	-	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.13	Jumlah Dokumen NSPK/Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.14	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan rencana	100	100	100	100	100
IKK.4.2018.1.15	Jumlah Dokumen penyelenggaraan HAI, Lomba dan Apresiasi	100	100	100	100	100

B. Program Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan serta program prioritas nasional dan program terobosan

1. Program Direktorat yang sudah berjalan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Bindiktara memiliki tugas pokok adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, maka program dan kegiatan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang dikembangkan dan dikemas kedalam beberapa menu program, antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca

Tabel 2.5 Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca

No	Program	Deskripsi
1.	Pendidikan Keaksaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum : Permendikbud No.86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
	a. Pendidikan Keaksaraan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi : Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
	b. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum : Permendikbud Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan. • Definisi Pendidikan keaksaraan lanjutan adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar

No	Program	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Keaksaraan Lanjutan terdiri dari: 1) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan usaha dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca keaksaraan dasar, yang menekankan peningkatan keberaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. 2) Pendidikan Multikeaksaraan Pendidikan Multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keberagaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang dimiliki dan diminati peserta didik. Pendidikan multikeaksaraan diarahkan sesuai dengan minat peserta didik tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, atau politik dan kebangsaan, serta pekerjaan atau profesi.
2.	Pengembangan Budaya Baca	<p>Dasar Hukum :</p> <p>UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.</p> <p>Perdirjen No 35 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Penyelenggaraan Program Pengembangan Budaya Baca tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan umum program pengembangan budaya baca adalah membangun masyarakat gemar belajar agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup yang dilandasi oleh budaya bangsa. • Tujuan Khusus program pengembangan budaya baca: <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat meliputi literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi keuangan, literasi teknologi informasi dan komunikasi, dan literasi kewarganegaraan dan budaya; 2) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat; 3) Membangun peradaban masyarakat yang dilandasi oleh sistem nilai dan budaya bangsa; 4) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. • Sasaran/penerima manfaat program pengembangan budaya baca adalah remaja dan orang dewasa. Pelaksanaan program ini dapat melibatkan lembaga swasta, beberapa organisasi sosial, kemasyarakatan, kepemudaan, lembaga keagamaan, profesi, dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan. • Bentuk layanan yang melembaga dari pengembangan budaya baca antara lain adalah Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah tempat penyelenggaraan pembinaan kemampuan membaca dan belajar, sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.

b. Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

Tabel 2.6 Program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

No	PROGRAM	DESKRIPSI
1	Pendidikan Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi : Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA • Tujuan Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SD/MI untuk Paket A, anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SMP/MTs untuk Paket B, dan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/MA untuk Paket C;

		<p>2) mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah dua belas tahun atau pendidikan menengah universal;</p> <p>3) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan formal;</p> <p>4) membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;</p> <p>5) membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Satuan pendidikan nonformal penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C.
2	Pendidikan Berkelanjutan Bentuk Implementasi Pendidikan Berkelanjutan:	<p>Pendidikan berkelanjutan merupakan program pendidikan nonformal bagi orang dewasa setelah menyelesaikan pendidikan dasar dalam rangka meningkatkan kemampuan setelah mereka melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan di masyarakat.</p> <p>Pendidikan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi.</p>
	a. Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan (PKHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan merupakan tindakan pembelajaran dan pelatihan yang berpihak (<i>affirmative action</i>) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup perempuan yang meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga. • Tujuan Tujuan Penyelenggaraan program PKHP antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kecakapan hidup (<i>lifeskills</i>) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya. 2) Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. 3) Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha. 4) Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM. 5) Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah. 6) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Perempuan (khususnya ibu rumah tangga) berusia produktif, prioritas berdomisili di perdesaan dari kalangan masyarakat kurang beruntung secara ekonomi dan rentan terhadap dampak resiko sosial yang diakibatkan oleh kondisi sosial kehidupan masyarakat kaum marginal, seperti komunitas petani, nelayan, calon atau tenaga kerja perempuan marginal, buruh migran, dan lain-lain. • Penyelenggara program Penyelenggara program adalah satuan pendidikan nonformal diantaranya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan, rumah pintar, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau perguruan tinggi yang memiliki fungsi sejenis, Pusat Studi pada Perguruan Tinggi yang membidangi Gender dan/ atau perempuan, Organisasi sosial dan kemasyarakatan, Organisasi keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, persyarikatan, atau sejenis.
	b. Vokasi Paket C	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Vokasi Paket C adalah program vokasi yang diberikan kepada peserta didik program paket c dalam bentuk keterampilan yang terstruktur yang bertujuan membekali peserta didik dengan satu kompetensi keterampilan tertentu. • Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan kualitas dan relevansi Pendidikan kesetaraan sesuai dengan khitahnya dalam memberikan pengetahuan, keterampilan fungsional dan kepribadian profesional; 2) membekali peserta didik Paket C dengan kompetensi keterampilan tertentu; 3) membekali keterampilan yang berstandar KKNi yang dapat digunakan untuk bekerja di seluruh wilayah Indonesia. • Sasaran Peserta program adalah peserta didik Paket C, diutamakan kelas akhir. • Penyelenggara Program lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal penyelenggara program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga kursus dan pelatihan.

2. Program Prioritas Nasional dan Program Terobosan

Program prioritas adalah program yang berdasarkan kebijakan Kemendikbud yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2015-2019. Sedangkan program terobosan adalah program yang mendukung program prioritas dalam upaya pengembangan program atau memperkuat dampak dan efek program di masyarakat.

a. Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian/Lembaga

Program prioritas nasional merupakan program yang menjadi fokus pemerintah secara nasional yang harus dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga. Kemendikbud menjadi salah satu kementerian dari 10 kementerian lainnya yang menggaungkan mengenai program di satuan kerjanya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati Prioritas Nasional yang meliputi: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.

Program prioritas kemendikbud merupakan program yang menjadi fokus utama di lingkungan Kemdikbud antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan Pendidikan Vokasi.

1) Program Indonesia Pintar

Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 2 masih dalam Permendikbud No 19 tahun 2016, PIP bertujuan untuk:

- Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan samapi tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 (dua belas). Tahun;
- Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/ atau
- Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja.

Gambar 2.1 Alur Penanganan PIP Tahun 2016-2017



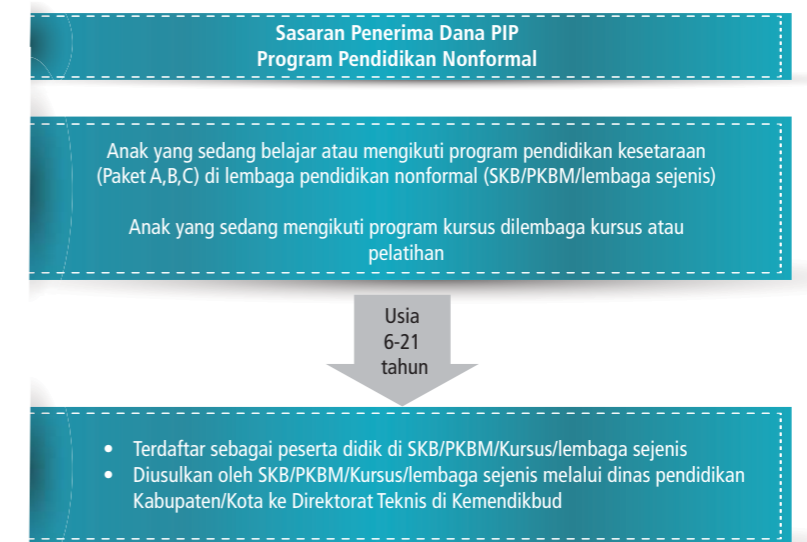
Sumber: Kemdikbud 2015

PIP dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, direktorat jenderal yang menangani pendidikan nonformal, dinas pendidikan propinsi, dan pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. KIP dan PIP sudah diatur dalam Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Nomor 08/D/PP/2016 dan Nomor 04/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016.

Pemanfaatan PIP sesuai peruntukannya:

- Membeli buku dan alat tulis;
- Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
- Uang saku peserta didik;
- Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
- Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal

Gambar 2.2 Sasaran Penerima Dana PIP Program Pendidikan nonformal



Sumber: Kemdikbud 2015

Gambar 2.3 Pembagian Peran dan Fungsi dalam Pelaksanaan PIP

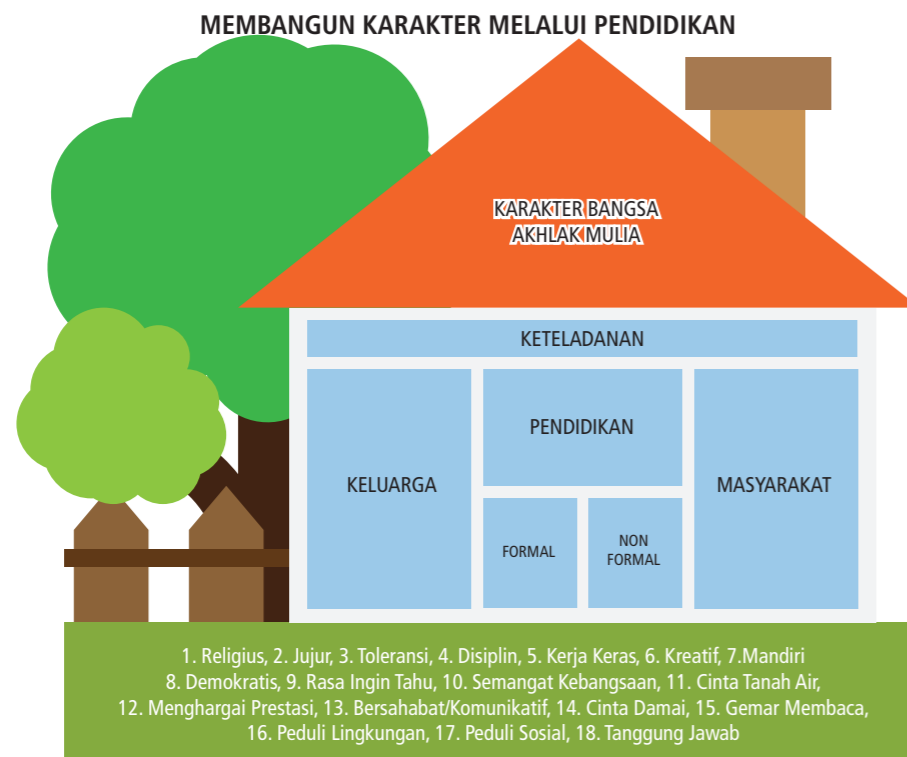


Sumber: Kemdikbud 2015

2) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai dan sikap, bukan pengajaran, sehingga memerlukan pola pembelajaran fungsional. Pendidikan karakter menuntut pelaksanaan oleh 3 (tiga) pihak secara sinergis, yaitu: orang tua, satuan/lembaga pendidikan, dan masyarakat. Materi dan pola pembelajaran disesuaikan dengan pertumbuhan psikologis peserta didik. Materi pendidikan karakter berbasis kearifan local. Materi pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran lain.

Gambar 2.4 Membangun Karakter melalui Pendidikan Keluarga



Sumber : Kemdikbud 2015

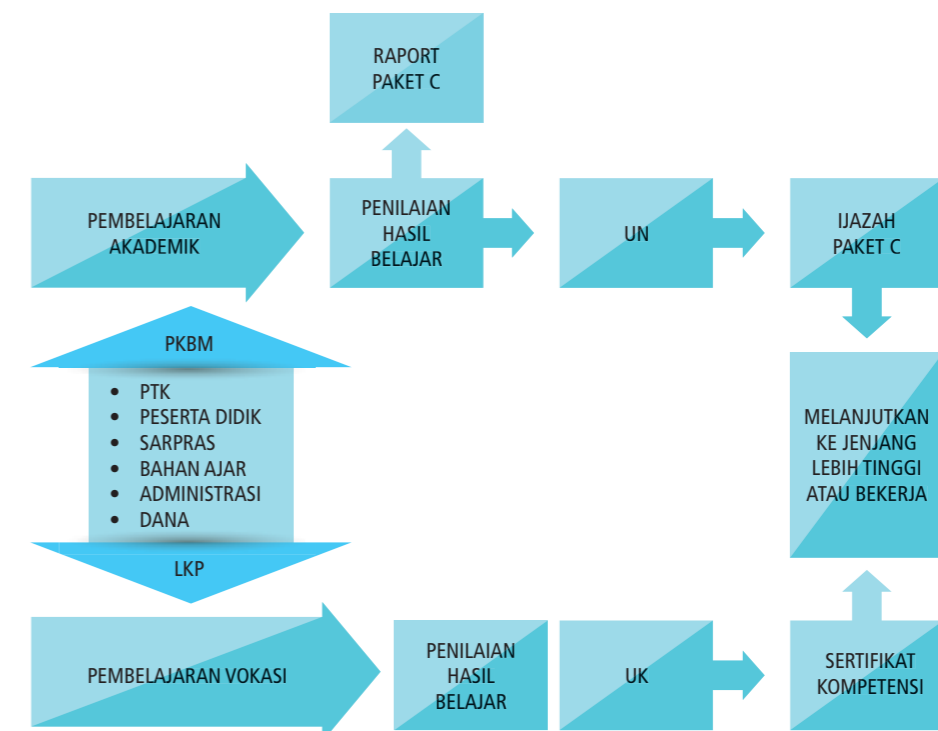
- a) Penyelenggaraan Pendidikan karakter di SPNF dilakukan dalam bentuk penguatan karakter positif melalui kegiatan :
 - i) Intrakurikuler berupa tatap muka, tutorial, pembelajaran mandiri
 - ii) Ko-kurikuler berupa kepramukaan, lomba, pembinaan/ pendampingan
 - iii) Ekstra kurikuler berupa kegiatan keagamaan, olahraga, dan kesenian.
- b) Pengintegrasian unsur-unsur terkait dalam pembentukan karakter :
 - iv) Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) : pengintegrasian karakter dalam pembelajaran, memberikan keteladanan perilaku, memanfaatkan materi dengan nilai dan norma positif, menggunakan bahan ajar pendukung karakter, tindak lanjut penilaian sikap
 - v) SPNF : pengelolaan/manajemen, lingkungan bersih dan sehat,
 - vi) Pengintegrasian karakter di SPNF, fasilitasi dan pemeliharaan karakter di masyarakat, administrasi kelembagaan tertib dan transparan.
 - vii) Peserta didik berupa kepribadian baik, motivasi belajar meningkat, disiplin, terampil dan produktif.

3) Pendidikan Vokasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Program pendidikan dipendidikan tinggi mencakup (1) Pendidikan akademik, pendidikan profesi/spesialis dan pendidikan vokasi (diploma). Masih dalam UU Sisdiknas Pasal 15 dijelaskan bahwa *pendidikan kejuruan* merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sedangkan *pendidikan vokasi* adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Pendidikan vokasi berdasarkan program prioritas Kemendikbud mencakup makna yang luas tidak hanya diterapkan di perguruan tinggi saja dengan tujuan untuk memiliki pekerjaan atau di pendidikan formal dalam bentuk sekolah menengah kejuruan (SMK). Pengembangan vokasi sudah masuk ke pendidikan nonformal dengan istilah Paket C Vokasi/ Kejuruan yang mulai diselenggarakan sejak tahun 2015. Benang merahnya sama yaitu penguasaan ilmu terapan sehingga dalam menghadapi bonus demografi peserta didik sudah dibekali dengan keahlian yang bisa dipraktikkan dan diakui secara nasional melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta siap masuk ke dunia kerja atau mempunyai usaha sendiri. Melalui KKNI bisa saja peserta didik Paket C yang mempunyai keahlian bisa setara dengan tingkat diploma. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Hal ini diatur dalam Perpres No 8 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi

Gambar 2.5 Model Pengelolaan Vokasi Paket C

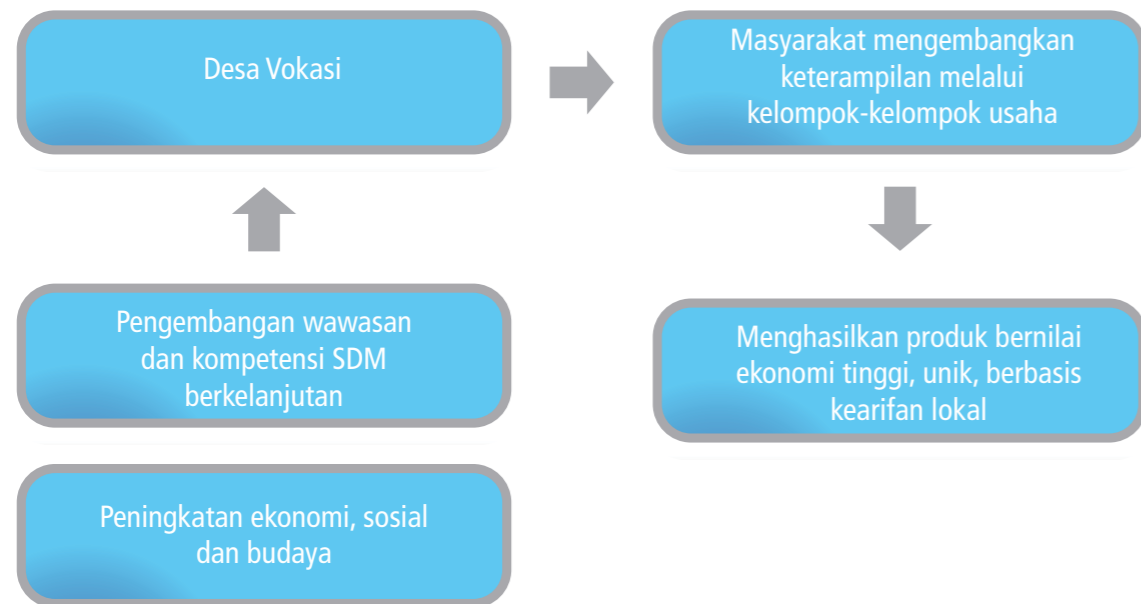


Sumber: Kemdikbud 2017

Model pendidikan vokasi harus mengacu pada kurikulum yang terstruktur serta adanya pengujian kompetensi sehingga diharapkan individu menjadi terampil, mandiri, kompetitif, dan kreatif sehingga bisa mempunyai keterampilan baik untuk masuk di dunia kerja ataupun membuka usaha.

Keberhasilan program vokasi pada Paket C diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja ketika mereka kembali di masyarakat. Di samping pemberian vokasi untuk kesetaraan Paket C, Direktorat Bindiktara telah merintis program lainnya yaitu “Desa Vokasi”, untuk memberikan keterampilan bermatapencaharian untuk masyarakat, terutama yang telah tamat pendidikan keaksaraan atau yang sedang mengikuti.

Gambar 2.6 Desain Pengembangan Desa Vokasi



Sumber: Kemdikbud

Pengembangan desa vokasi dilakukan di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok usaha untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang ada di daerah didasarkan pada sumber daya alam dan kekhasan daerahnya sehingga menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi, unik dan berbasis kearifan lokal. Lokasi pemilihan tempat desa vokasi merupakan wilayah yang sudah mempunyai embrio atau kekhasan di daerahnya agar lebih dikenal dan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga mempunyai daya jual. Materi yang diajarkan di desa vokasi mulai dari pemilihan bahan pengemasan sampai bagaimana menjual serta strategi lain yang digunakan untuk mengembangkan SDM dan peningkatan ekonomi, sosial dan budaya yang disesuaikan dengan kemampuan daerahnya masing-masing.

b. Program Terobosan

1) Program Keaksaraan dan Budaya Baca

Tabel 2.7 Program Terobosan Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca

No	Program	Deskripsi
1	Keaksaraan Dasar (daerah terpadat tuna aksara)	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Pendidikan Keaksaraan Dasar (daerah terpadat buta ksara) merupakan layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin dan berada di kabupaten terpadat angka buta aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Tujuan Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Sasaran Penduduk tuna aksara latin, prioritas berusia 15 – 59 tahun yang berada di 40 kabupaten terpadat tuna aksara (di luar provinsi Papua dan Papua Barat) Lembaga penyelenggara Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar.
2	Keaksaraan Dasar Papua dan 3T	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T merupakan afirmasi layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T), agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Tujuan Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Sasaran Penduduk buta aksara latin, prioritas berusia 15 – 59 tahun, yang berada (afirmasi) di kabupaten terpadat angka tuna aksara di Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3 T). Lembaga penyelenggara Penerima bantuan adalah lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Rumpin, lembaga keagamaan, dan lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar
3	Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT)	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan afirmasi layanan pendidikan keaksaraan dasar yang ditujukan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin, yang berada di komunitas adat terpencil, agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Tujuan Memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik (warga belajar) agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.

No	Program	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Penduduk buta aksara prioritas berusia 15 – 59 tahun yang berada di daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT) • Lembaga penyelenggara lembaga satuan pendidikan nonformal seperti PKBM, SKB, Kelompok belajar, dan lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
4	Gerakan Indonesia Membaca (GIM)	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan, menggerakkan, dan membangkitkan kesadaran para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan membaca menuju pembudayaan membaca dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. • Tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat dan mengembangkan budaya baca masyarakat b. menyusun rencana aksi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) kabupaten/kota c. mensosialisasikan manfaat kebiasaan membaca menuju pembudayaan membaca dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. • Sasaran Tahun 2016 lokasi GIM dilaksanakan di 28 titik sedangkan tahun 2017 dilaksanakan di 18 titik dengan prioritas pada daerah yang merupakan kantong-kantong tuna aksara dan memiliki komitmen kuat untuk melakukan percepatan penuntasan tuna aksara. Sasaran program GIM adalah anak usia dini, anak usia sekolah sampai dengan orang dewasa dan orang tua, lembaga swasta, organisasi sosial, kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, profesi dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan • Lembaga penyelenggara Dinas pendidikan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan
5	Kampung Literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Kampung Literasi merupakan suatu kawasan kampung/desa yang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang memiliki 6 komponen literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan serta membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat. • Tujuan Tujuan khusus dari penyelenggaraan program Kampung Literasi ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan layanan informasi dan pengetahuan di jalur pendidikan nonformal kepada masyarakat. Layanan tersebut berupa buku dan non-buku yang disediakan di TBM, pojok baca atau sejenisnya, serta dilengkapi dengan teknologi informasi b. Mengembangkan minimal dua dari enam komponen literasi, yaitu literasi baca-tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga memiliki kualitas hidup yang baik

No	Program	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Tahun 2016 Sebanyak 31 desa yang berada di beberapa daerah, selama ini dijadikan sebagai basis pembelajaran pendidikan keaksaraan, memiliki sumber daya atau potensi secara ekonomi untuk berkembang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 42 titik prioritas layanan untuk masyarakat dengan kondisi berkeaksaraan rendah, masyarakat yang sedang menempuh program pendidikan kesetaraan, Paket A, B, dan C, masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan literasinya, dan warga belajar yang sedang mendalami keterampilan sesuai dengan kegiatan yang sedang tersedia dalam program kampung literasi. • Penyelenggara PKBM atau TBM yang memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan, mempunyai NPWP atas nama lembaga, mempunyai rekening Bank atas nama lembaga
6	Pengembangan Program Donasi Buku Online	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Program donasi buku online adalah program menghimpun dan menyalurkan buku yang digagas oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD Dikmas, Kemdikbud, Forum Taman Bacaan Masyarakat dan beberapa lembaga pegiat literasi dan dari kalangan penerbit buku. • Tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. memudahkan distribusi buku-buku bermutu dari pihak yang memberikan donasi ke lebih dari 10 ribu taman-taman bacaan masyarakat dan komunitas literasi yang ada di Indonesia. b. media publikasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat (TBM)/ komunitas literasi/pegiat literasi di seluruh Indonesia. • Cara donasi buku <ol style="list-style-type: none"> a. Para donator buku baik secara pribadi, philantropi, lembaga social, donor dan program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari dunia usaha menyalurkan donasi bukunya melalui laman donasi buku : http://donasibuku.kemdikbud.go.id. Aplikasi donasi buku Daring ini sudah tersedia di Google Play Store dan juga bentuk website seperti laman diatas. b. Pemberian buku secara langsung (berbentuk buku) kepada pegiat literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi, dapat menghubungi Subdit Keaksaraan dan pengembangan budaya baca, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan atau menghubungi admin yang ada di laman buku.

2) Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

Tabel 2.8 Program Terobosan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

No	Program	Deskripsi
1	Pengembangan Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud No.20/2016) b. Standar Isi (Permendikbud No.21/2016) c. Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar Dikdasmen (Permendikbud No.24/2016) • Kurikulum Kesetaraan <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan didasarkan pada kompetensi kelompok umum, kelompok minat dan kelompok khusus. <ol style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi kelompok umum Paket A, Paket B dan Paket C berupa kelompok sikap dan pengetahuan umum; 2) Kompetensi kelompok minat hanya ada di Paket C berupa minat IPA, minat IPS dan minat bahasa;

No	Program	Deskripsi
		<p>3) Kompetensi kelompok khusus untuk Paket A, Paket B dan Paket C berupa pemberdayaan dan keterampilan. Struktur pembelajaran berupa muatan olahraga kesehatan, seni budaya, dan keterampilan.</p> <p>b. Muatan keterampilan pendidikan kesetaraan dibedakan menjadi kurikulum terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>Kurikulum terstruktur sistem pengujian yang dilakukan berupa uji kompetensi dengan pengujian Lembaga Sertifikasi Kompetensi.</p> <p>Keterampilan tidak terstruktur sistem pengujian berupa unjuk kerja dengan pengujian pemakai/user/ekspert.</p> <p>c. Model pembelajaran keterampilan terstruktur menggunakan modul secara bertahap dan berjenjang</p> <p>d. Sistem pembelajaran pendidikan kesetaraan konvensional klasikal (kelompok belajar) dengan perorangan (<i>home schooling</i> pembelajaran daring <i>massive open online course (MOOC)</i>). Pembelajaran perorangan (<i>homeschooling</i>) dengan komunitas pembelajaran daring.</p> <p>e. Sistem pengujian menggunakan uji kompetensi berbasis kertas dan pensil dengan unjuk kerja ujian berbasis komputer.</p>
2	Pengembangan pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket C online)	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar pijakan <ol style="list-style-type: none"> a. PP 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam PP 32 tahun 2013 dan PP 13 tahun 2015 b. Standar proses pendidikan kesetaraan tidak harus sama dengan pendidikan formal c. Keberagaman peserta didik dari segi usia, kondisi sosial dan letak geografis d. Kesempatan waktu belajar yang terbatas e. Terbatasnya sumber belajar di satuan pendidikan f. Kesempatan belajar mandiri terbuka lebar • Pembelajaran Paket C online <ol style="list-style-type: none"> a. di-launching tanggal 20 Oktober 2016 di Palu, Sulteng b. alamat web: kesetaraan.kemdikbud.go.id c. menggunakan sistem modular d. penilaian hasil belajar ditentukan oleh kesiapan warga belajar (tidak harus sama) e. dapat menggunakan fasilitas HP/Laptop/PC f. belajar dapat dilakukan dimana saja tanpa mengenal waktu dan batas/fleksibel g. aplikasi ini dapat digunakan di setiap satuan pendidikan di Indonesia h. efisiensi dari segi biaya dan waktu • Pendukung pendidikan kesetaraan yang sedang dipersiapkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Permendikbud b. Pedoman pengelolaan dan Penyelenggaraan c. Pedoman plafement test d. Pedoman pembelajaran online e. Modul-modul pembelajaran f. Ujian berstandar Nasional Berbasis komputer
3	Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan marginal merupakan salah satu program yang ditujukan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga, prioritas berusia muda antara (15-45 tahun) yang selama ini termarginalkan (miskin dan berpendidikan rendah) di perdesaan. • Tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kecakapan hidup (<i>lifeskills</i>) perempuan marginal, sehingga memiliki kemampuan berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat jati diri dan kualitas hidup keluarganya. b. Menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

No	Program	Deskripsi
		<ol style="list-style-type: none"> c. Menumbuhkan keinginan untuk terus belajar dan berkarya, melalui keterlibatannya dalam kelompok pembelajaran dan berusaha. d. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai warga negara yang didasari atas pemahaman tentang HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM. e. Membentuk sikap positif dalam menghadapi perbedaan peran sosial di masyarakat serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah. f. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya. <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Tahun 2016 sasaran GP3M sebanyak 21 titik dan tahun 2017 sebanyak 34 lembaga dengan sasaran peserta didik adalah perempuan marginal di beberapa daerah khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan tertinggal prioritas berusia muda antara 15-45 tahun.
4	Desa Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Desa yang dinilai memiliki potensi sumber daya dan keterampilan yang khas atau unik, agar desa memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi menuju desa yang maju dan sejahtera. • Tujuan <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap warga desa dalam mengelola usaha kecil secara mandiri atau kelompok b. Membangun kebersamaan antara sesama warga desa dalam mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan untuk perbaikan dan kemajuan perekonomian desa. c. Mengembangkan perekonomian desa yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga desa setempat. • Sasaran Tahun 2016 Sebanyak 20 desa yang memiliki sumber daya atau potensi secara ekonomi untuk berkembang, yang berada di 20 daerah. Tahun 2017 sebanyak 35 desa yang menjadi sasaran desa vokasi. • Lembaga penyelenggara Lembaga satuan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Rumah Pintar (Rumpin), sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKB), dan organisasi/ lembaga pemberdayaan masyarakat.

C. Alokasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2017

Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015-2017

No	Jenis Belanja	Tahun		
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.559.056.000	5.033.873.000	5.121.579.000
2.	Belanja Barang	177.870.134.000	600.965.568.000	448.061.623.000
3.	Belanja Modal	1.250.000.000	779.000.000	1.921.662.000
4.	Belanja Bansos	202.880.750.000	800.000.000	500.000.000
	Jumlah	386.559.940.000	607.578.441.000	455.604.864.000

Pagu Anggaran tahun 2015 - 2017 dengan Total masing-masing anggaran sebesar Rp. 386.559.940.000 pada tahun 2015, Rp. 607.578.441.000 pada tahun 2016 dan Rp. 455.604.864.000 pada tahun 2017.

Dari tabel tersebut terlihat ada kenaikan pada belanja pegawai dan belanja modal. Belanja barang mengalami kenaikan yang drastis, karena semua bantuan pemerintah tahun 2016 dan 2017 masuk ke dalam komponen belanja barang yang sebelumnya masuk kedalam komponen belanja bansos. Pada tahun 2016 dan 2017 Bantuan sosial diperuntukan hanya untuk bantuan bagi lembaga/satuan penyelenggara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang mengalami dampak bencana alam.

2. Belanja Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2015 – 2017

a. Target Fisik Belanja Bantuan Direktorat Bindiktara tahun 2015-2017

Tabel 2.10 Target Fisik Belanja Bantuan Direktorat Bindiktara Tahun 2015-2017

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
			Fisik	Fisik	Fisik
1	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Suku Terasing/Komunitas Adat Terpencil	ORG	-	100	2.500
2	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar	ORG	150.525	39.850	36.200
3	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T	ORG	-	7.500	15.000
4	BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri	ORG	95.200	57.940	41.400
5	BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar Orang Dewasa/BOP Multikeaksaraan	ORG	9.500	5.000	5.000
6	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	ORG	11.583	9.500	6.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	ORG	86.098	70.027	67.120
8	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	ORG	24.190	85.875	98.500
9	Bantuan Pendidikan Vokasional	ORG	1.880	11.000	8.000
10	Bantuan Sarana dan Prasarana SKB/Bantuan Prasarana SKB	LBG	100	20	25
11	Bantuan Sarana dan Prasarana SKB sebagai satuan Pendidikan (Rintisan)/Bantuan Sarana SKB	LBG	2	147	79
12	Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM dan Rumah Pintar/Bantuan Sarana Satuan Pendidikan Nonformal	LBG	193	259	161
13	Bantuan Kerja sama dengan Organisasi Mitra	LBG	-	30	30
14	Bantuan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (Sarasehan GP3M)	LBG	-	25	34
15	Bantuan Desa Vokasi	DESA	-	20	35
16	BOP Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	ORG	10.000	10.000	5.430
17	Bantuan Pasca Bencana	PKT	-	6	10
18	Bantuan Sarana dan Prasarana bagi TBM/Bantuan Sarana TBM	LBG	150	80	40
19	Kampung Literasi dan Gerakan Indonesia Membaca	LBG	-	31	60
20	BOP Kampung Literasi	LBG	-	31	21
21	Bantuan Rintisan SKB	LBG	2	-	-
22	Bantuan Penataan SKB	LBG	98	-	-
23	Bantuan Pengembangan Penjaminan Mutu SKB berbasis TI	LBG	30	-	-
24	Bantuan Penataan PKBM	LBG	160	-	-
25	Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan di Provinsi	LBG	21	-	-
26	Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/ Kota	LBG	25	-	-

b. Target Anggaran Belanja Bantuan Direktorat Bindiktara tahun 2015-2017

Tabel 2.11 Target Anggaran Belanja Bantuan Direktorat Bindiktara tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015	2016	2017
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
1	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Suku Terasing/Komunitas Adat Terpencil	-	2.500.000.000	2.500.000.000
2	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar	60.210.000.000	17.932.500.000	16.290.000.000
3	BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T	-	5.625.000.000	11.250.000.000
4	BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri	52.397.887.000	34.764.000.000	24.840.000.000
5	BOP Pendidikan Kesetaraan Dasar Orang Dewasa/BOP Multikeaksaraan	9.215.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A	970.000	10.670.000.000	5.820.000.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B	120.537.200.000	98.040.600.000	93.968.000.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C	41.123.000.000	145.987.500.000	167.450.000.000
9	Bantuan Pendidikan Vokasional	21.760.000.000	22.000.000.000	13.600.000.000
10	Bantuan Sarana dan Prasarana SKB/Bantuan Prasarana SKB	5.794.000.000	44.155.910.000	25.000.000.000
11	Bantuan Sarana dan Prasarana SKB sebagai satuan Pendidikan (Rintisan)/Bantuan Sarana SKB	1.000.000.000	12.675.241.000	7.900.000.000
12	Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM dan Rumah Pintar/Bantuan Sarana Satuan Pendidikan Nonformal	9.650.000.000	31.877.681.000	8.050.000.000
13	Bantuan Kerja sama dengan Organisasi Mitra	-	1.050.000.000	1.480.000.000
14	Bantuan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (Sarasehan GP3M)	-	2.500.000.000	1.700.000.000
15	Bantuan Desa Vokasi	-	2.800.000.000	3.500.000.000
16	BOP Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	11.972.634.000	16.853.578.000	5.430.000.000
17	Bantuan Pasca Bencana	-	579.600.000	500.000.000
18	Bantuan Sarana dan Prasarana bagi TBM/Bantuan Sarana TBM	8.250.000.000	4.000.000.000	1.200.000.000
19	Kampung Literasi dan Gerakan Indonesia Membaca	-	4.209.272.000	6.000.000.000
20	BOP Kampung Literasi	-	4.273.365.000	525.000.000
21	Bantuan Rintisan SKB	6.000.000.000	-	-
22	Bantuan Penataan SKB	16.261.042.000	-	-
23	Bantuan Pengembangan Penjaminan Mutu SKB berbasis TI	1.500.000.000	-	-
24	Bantuan Penataan PKBM	11.200.000.000	-	-
25	Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan di Provinsi	2.972.340.000	-	-
26	Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/ Kota	3.701.010.000	-	-



BAB III

CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

A. Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca Tahun 2015-2017

1. Perkembangan Pendidikan Keaksaraan

Pengurangan jumlah buta aksara dari tahun ke tahun, memberikan indikasi bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun. Untuk itu, selain terus menggiatkan program melek aksara melalui program keaksaraan, pemerintah juga berusaha agar masyarakat melek aksara dapat terjaga kompetensinya dengan memberikan berbagai program yang mendukung masyarakat selain semakin baik kompetensi keaksaraannya juga dapat meningkatkan kompetensi wisarusahanya melalui program keaksaraan lanjutan.

Sampai dengan tahun 2017 perkembangan pendidikan keaksaraan dan budaya baca sangat menggembarakan. Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan program/layanan pendidikan keaksaraan dan budaya baca yang semula hanya pemberantasan buta aksara. Program/layanan yang merupakan terobosan baru antara lain: 1) pendidikan keaksaraan usaha mandiri; 2) pendidikan multikeaksaraan; 3) pengembangan kampung literasi; 4) gebyar Gerakan Indonesia Membaca; serta 5) donasi buku online. Kesemua program/layanan tersebut dimaksudkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca.

a. Jumlah dan Persentase Penduduk Buta Aksara (Nasional)

Penduduk Indonesia yang buta aksara setiap tahunnya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2014, jumlah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun sebesar 5.967.120 orang (3,70%). Tahun 2015 jumlah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun sebesar 5.629.943 orang (3,43%). Sedangkan tahun 2016 jumlah buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 3.416.693 orang (2,07%) (Susenas, 2017).

Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Buta Aksara Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Buta Aksara	% Buta Aksara	Penurunan (%)
2014	5.967.120	3,70	-
2015	5.629.943	3,43	0,27
2016	3.416.693	2,07	1,36
Total			1,63

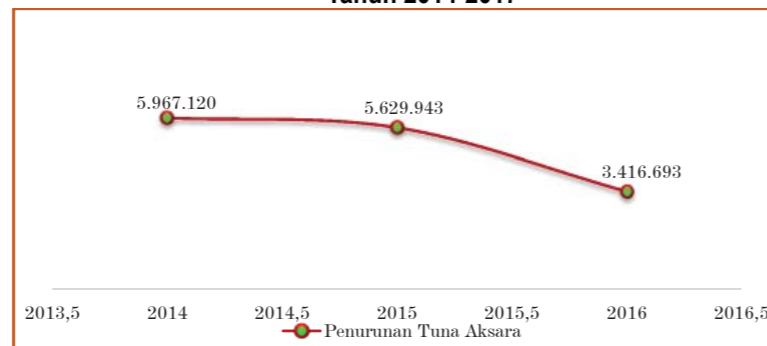
Selama tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara dari 5,9 juta orang pada tahun 2014 menjadi berkurang sekitar 3,4 juta orang. Kondisi tersebut tercapai karena pengaruh berbagai faktor sebagai berikut:

- 1) Angka melek huruf dijadikan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 2) Kebijakan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara (GNPBA) dan Wajib Belajar Sebilan Tahun (Permendiknas Nomor 35 Tahun 2006);
- 3) Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, satuan pendidikan dan mahasiswa KKN dalam peningkatan keaksaraan fungsional;
- 4) Dukungan dana APBN dan APBD untuk penuntasan buta aksara;

Trend penurunan buta aksara tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

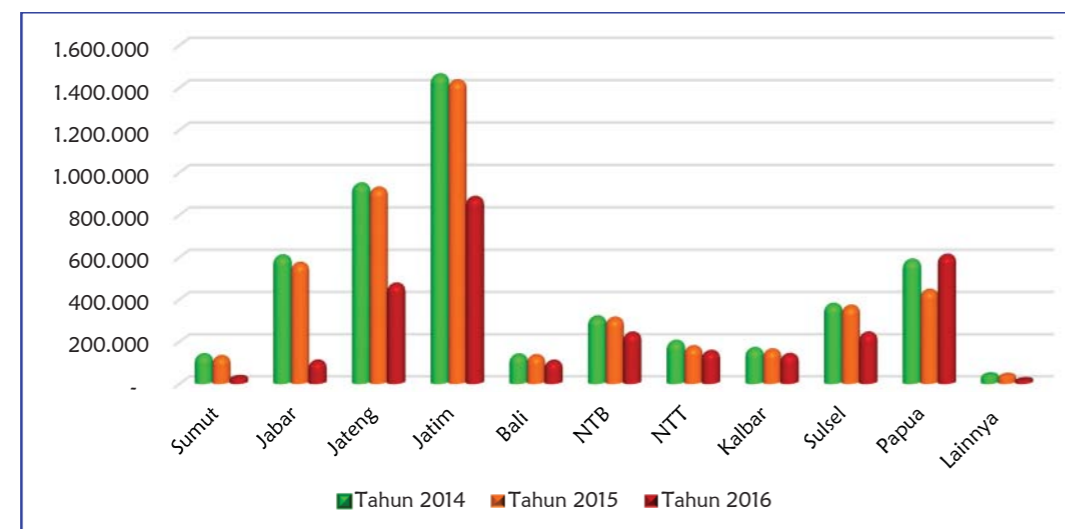
Pada tahun 2014, jumlah buta aksara di Indonesia berdasarkan data Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) berjumlah 5.967.120 orang. Dari angka tersebut, berhasil diturunkan pada tahun 2015 berjumlah 337.177 orang. Selanjutnya pada tahun 2015, jumlah buta aksara berjumlah 5.629.943 orang. Dari jumlah tersebut berhasil diturunkan secara drastis yakni sebanyak 2.213.250 orang dengan melibatkan dana APBN dan APBD I dan APBD II. Dengan demikian angka buta aksara yang tersisa pada tahun 2017 sebanyak 3.416.693 orang.

Grafik 3.1 Trend Penurunan Buta Aksara Nasional Tahun 2014-2017



Selanjutnya perbandingan angka buta aksara per Provinsi tahun 2014-2016 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2 Penurunan Buta Aksara per Provinsi tahun 2014-2016



^{*)} sumber data: BPS dan PDSPK yang diolah

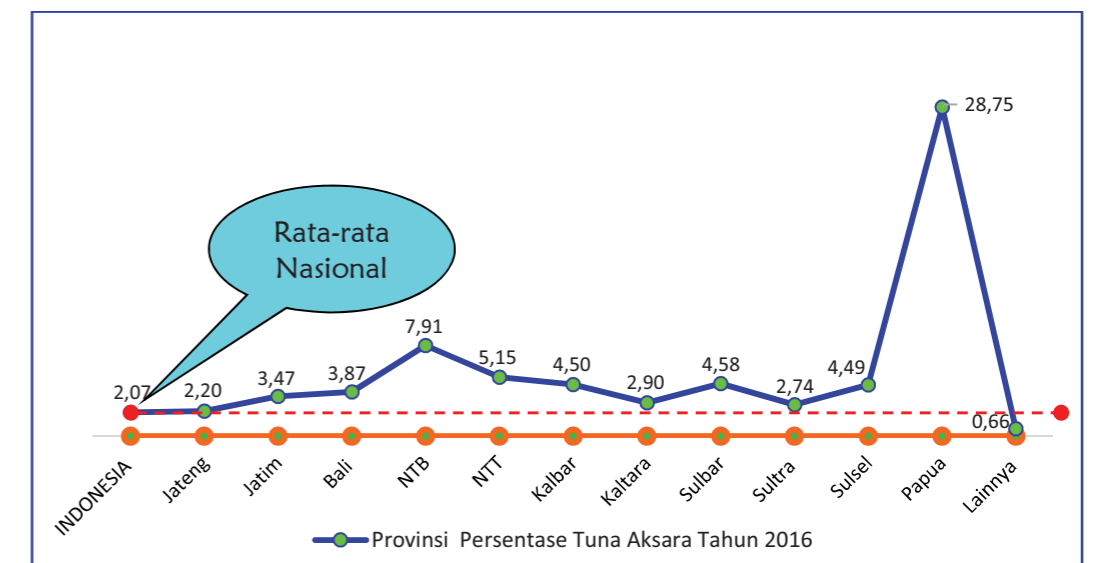
Grafik tersebut menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi penurunan jumlah dan angka buta aksara di seluruh provinsi di Indonesia. Setiap tahun menunjukkan penurunan angka buta aksara secara signifikan. Penurunan angka buta aksara yang tinggi tersebut lebih disebabkan karena:

- 1) Alokasi dana program keaksaraan lebih difokuskan pada daerah-daerah yang terpadat buta aksara;
- 2) Adanya alokasi dana APBD yang turut meningkatkan jumlah warga belajar yang dituntaskan buta aksaranya;
- 3) Usaha dan kerja keras para penggiat literasi dilapangan yang membelajarkan warga belajar yang masih buta aksara;
- 4) Adanya berbagai program terobosan untuk membelajarkan warga, dan menjada kompetensi keberaksaraan warga.

Namun demikian, masih terdapat 9 provinsi yang menunjukkan buta aksara di atas 100.000 orang pada tahun 2016. Secara berurutan dari yang paling besar adalah Provinsi Jawa Timur, Papua, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Bali. Kondisi tersebut lebih disebabkan karena populasi penduduk buta aksara awalnya besar dan program pemberantasan buta aksara belum sepenuhnya sampai kesasaran karena alasan pendanaan dan faktor geografis.

Provinsi dengan angka buta aksara di atas angka nasional adalah sebagai berikut:

Grafik 3.3 Angka Buta Aksara diatas angka Nasional Tahun 2016



^{*)} sumber data: BPS dan PDSPK yang diolah

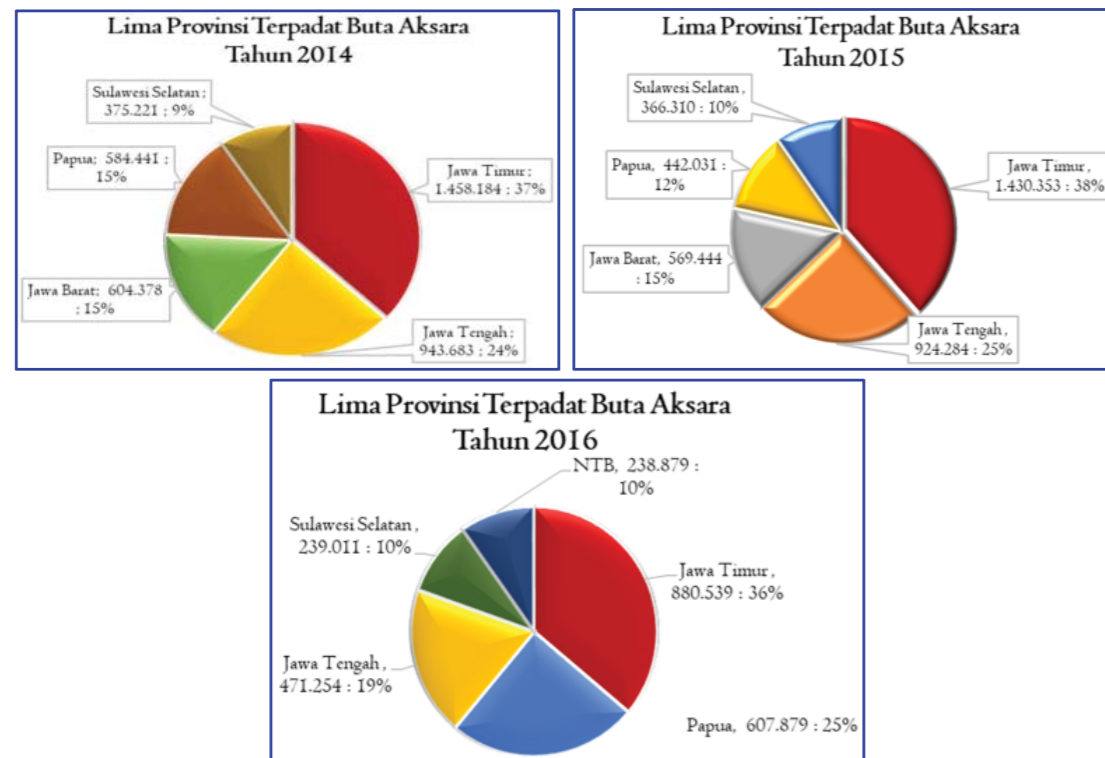
Pada tahun 2016 persentase buta aksara secara nasional usia 15-59 tahun sebesar 2,07% atau 3.416.693 jiwa. Masih ada 11 provinsi yang memiliki angka buta huruf diatas angka nasional yaitu Papua (28,75%), Nusa Tenggara Barat (7,91%), Nusa Tenggara Timur (5,15%), Sulawesi Barat (4,58%), Kalimantan Barat (4,50%), Sulawesi Selatan (4,49%), Bali (3,57%), Jawa Timur (3,47%), Kalimantan Utara (2,90%), Sulawesi Tenggara (2,74%), dan Jawa Tengah (2,20%).

Masih adanya provinsi yang persentase buta aksaranya masih di atas rata-rata nasional (11 provinsi), menjadi perhatian utama pemerintah khususnya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud. Hal ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing untuk menemukan formula yang tepat sehingga persentase buta aksara dapat diturunkan di bawah rata-rata nasional.

b. Wilayah Provinsi, dan Kabupaten Terpadat Buta Aksara

Dari data yang dirilis oleh PDSPK terkait jumlah buta aksara, terungkap lima provinsi dengan jumlah terpadat buta aksara dari tahun-ketahun. Untuk lebih jelasnya kelima provinsi dengan buta aksara terpadat tiga tahun terakhir (tahun 2014, 2015, dan 2016) tersaji pada tiga grafik di bawah ini:

Grafik 3.4 Lima Provinsi Terpadat Buta Aksara Tahun 2015-2017



Pada tahun tahun 2014, kelima provinsi tersebut yakni Jawa Timur (1.458.184 orang), Jawa Tengah (943.683 orang), Jawa Barat (604.378 orang), Papua (584.441 orang), dan Sulawesi Selatan (375.221 orang). Dari kelima provinsi tersebut, bila dijumlahkan, maka terdapat sebanyak 3.965.907 orang buta aksara.

Untuk tahun 2015, jumlah provinsi dengan jumlah buta aksara terpadat terdapat pada provinsi Jawa Timur (1.430.353 orang), Jawa Tengah (924.284 orang), Jawa Barat (569.444 orang), Papua (442.031 orang) dan Sulawesi Selatan (366.310 orang). Dari kelima provinsi tersebut, bila dijumlahkan, maka terdapat sebanyak 3.732.422 orang buta aksara.

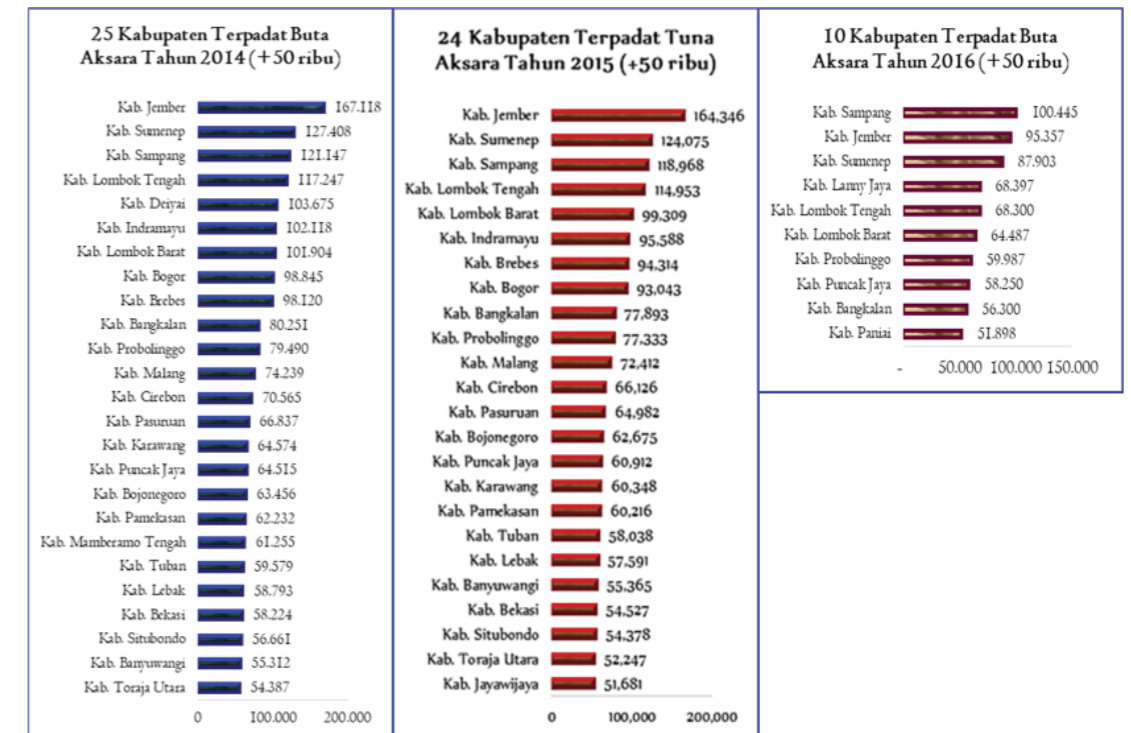
Pada tahun 2016, lima provinsi terpadat buta aksara di Indonesia pada tahun 2016 terdapat pada provinsi Jawa Timur (880.539 orang), Papua (607.879 orang), Jawa Tengah (471.254 orang), Sulawesi Selatan (239.011 orang), dan NTB (238.879 orang). Dari kelima provinsi tersebut, bila dijumlahkan, maka terdapat sebanyak 2.437.562 orang buta aksara.

Pada tahun 2014 dan 2015 provinsi yang terpadat buta aksara tetap di seputar Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan Sulawesi Selatan. Tetapi di atas tahun 2015 mulai terdapat pergeseran dimana Jawa Barat tidak lagi termasuk kelompok terpadat. Posisinya diganti dengan NTB di posisi kelima. Keberhasilan Provinsi Jawa Barat mengurangi jumlah buta aksara melalui keterlibatan para penggiat literasi di PKBM dan TBM dengan dana APBN dan APBD serta dampak dari GIM dan Kampung Literasi yang telah di dilakukan di Kabupaten/Kota.

Buta aksara merupakan masalah mendasar yang harus ditangani dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Untuk menurunkan angka buta aksara, pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk menyelenggarakan program keaksaraan disetiap provinsi.

Lebih detail dapat dilihat kabupaten terpadat buta aksara diatas 50ribu orang selama tiga tahun terakhir tahun 2014-2016 yang tersaji pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.5 Kabupaten Terpadat Buta Aksara Tahun 2014-2016 (diatas 50ribu orang)



Pada tahun 2014 terdapat 25 kabupaten yang penduduk buta aksaranya di atas 50ribu orang. Tertinggi di Kabupaten Jember yang berjumlah 167.118 orang dan terendah di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 54.387 orang. Pada tahun 2015, jumlah kabupaten dengan angka buta aksara di atas 50ribu berkurang menjadi 24 kabupaten dimana tertinggi di Kabupaten Jember (164.346 orang) dan terendah berada di Kabupaten Jayawijaya (51.681 orang). Untuk tahun 2016, menurun drastis. Data PDSPK menunjukkan, kabupaten dengan jumlah buta aksara diatas 50 ribu orang ada di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Sampang (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), Sumenep (Jawa Timur), Lanny Jaya (Papua), Lombok Tengah (NTB), Lombok Barat (NTB), Probolinggo (Jawa Timur), Puncak Jaya (Papua), Bangkalan (Jawa Timur) dan Paniai (Papua).

Dari 10 kabupaten tersebut, daerah terpadat berada di Kabupaten Sampang (Jawa Timur) berjumlah 100.445 orang dan terendah di Kabupaten Paniai (Papua) berjumlah 51.898 orang.

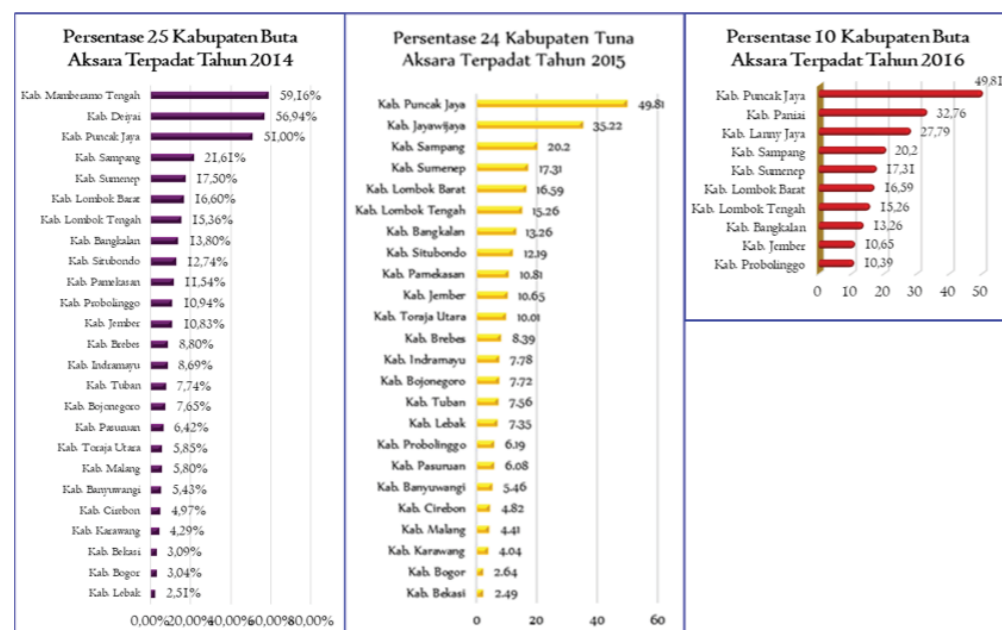
Pemerintah terus berusaha menurunkan jumlah buta aksara. Dari tahun-ketahun angka buta aksara terus berkurang secara signifikan dan diharapkan beberapa tahun kedepan sudah dapat diturunkan hingga pada kategori tuntas. Keberhasilan menurunkan angka buta aksara tidak terlepas dari peran berbagai pihak yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, lembaga SPNF, maupun para penggiat-penggiat literasi.

Keberhasilan penyelenggaraan program keaksaraan hingga tahun 2016 telah memberikan dampak positif dengan semakin menurunnya angka buta aksara pada daerah-daerah yang buta aksaranya di atas 50ribu orang. Pemerintah terus berharap dengan penyelenggaraan program keaksaraan pada tahun 2017, dapat menurunkan jumlah angka buta aksara dibawah 50ribu orang di semua kabupaten.

Selanjutnya, selain mengeluarkan data buta aksara secara absolut, PDSPK juga mengeluarkan data secara persentase. Hal ini untuk memudahkan pihak-pihak terkait untuk melihat dengan detail posisi buta aksara di semua kabupaten/kota. Angka buta aksara secara persentase tidak berbanding lurus dengan jumlah secara absolut karena angka secara persentase diperoleh dari hasil perbandingan dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu provinsi/kabupaten/kota tertentu.

Berikut adalah data persentase penduduk buta aksara selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2014, 2015 dan 2016 yang tersaji pada grafik berikut:

Grafik 3.6 Persentase Kabupaten Terpadat Buta Aksara Tahun 2014-2016 (diatas 50ribu orang)



Dari grafik di atas dapat terlihat dengan jelas persentase penduduk buta aksara pada masing-masing kabupaten. Pada tahun 2014 persentase tertinggi buta aksara pada kabupaten yang buta aksaranya di atas 50ribu orang terdapat pada Kabupaten Memberamo Tengah (Papua) yakni sebesar 59,16% dan terendah (urutan ke-25) berada pada Kabupaten Lebak (Banten)

yakni sebesar 2,51%. Kabupaten Memberamo Tengah menempati urutan pertama jika dilihat dari persentase, namun berada diurutan ke-19 secara absolut. Seperti halnya dengan Kabupaten Lebak yang secara persentase berada pada urutan terendah (urutan ke-25) (untuk kabupaten dengan buta aksara diatas 50ribu), jika diamati secara absolut berada pada urutan ke-21.

Untuk tahun 2015, persentase tertinggi (urutan ke-1) buta aksara pada kabupaten yang buta aksaranya di atas 50ribu orang terdapat pada Kabupaten Puncak Jaya, Papua (49,81%) dan terendah (urutan ke-24) terdapat pada Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (2,49%). Bila dibandingkan dengan angka absolut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua berada pada urutan ke-15 dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berada pada urutan ke-21.

Data persentase buta aksara yang buta aksaranya berada di atas 50ribu orang untuk tahun 2016 terdapat 10 kabupaten. Persentase tertinggi (urutan ke-1) terdapat pada Kabupaten Puncak Jaya, Papua yakni 49,81% dan terendah (urutan ke-10) terdapat pada Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yakni 10,39%. Jika dibandingkan dengan angka absolut buta aksara, maka Kabupaten Puncak Jaya, Papua berada pada urutan ke-8 yakni sebanyak 58.250 orang dan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berada pada urutan ke-7 yakni sebanyak 59.987 orang.

c. Alokasi Program dan Anggaran Pendidikan Keaksaraan

1) Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjutan

Untuk tiga tahun terakhir yakni tahun 2015, 2016, dan 2017 pemerintah secara kontinu terus menganggarkan program keaksaraan khususnya Keaksaraan Dasar. Berikut alokasi program dan anggaran Keaksaraan Dasar untuk tiga tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Gambar 3.1 Jumlah Sasaran dan Anggaran Keaksaraan Dasar Tahun 2015-2017



Terjadi penurunan pagu anggaran untuk Keaksaraan Dasar selama 3 tahun anggaran tahun 2015-2017. Begitu juga dengan jumlah sasaran Keaksaraan Dasar jumlahnya terus menurun berbanding lurus dengan penurunan jumlah pagu anggaran yang mulai tahun 2015 lebih fokus pada program pendidikan karakter (PPK) dan pendidikan vokasi yang disamping penambahan alokasi untuk sertifikasi guru. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) sendiri ada sebagian dana yang dialihkan untuk penambahan dana vokasi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), menambah dana yang dialihkan UPT Baru serta penanganan data Anak Tidak Sekolah (ATS).

Penurunan alokasi anggaran APBN selama periode 2015-2017 untuk program Keaksaraan Dasar disebabkan beberapa faktor yakni:

- Turunnya pagu alokasi anggaran untuk Ditjen PAUD dan Dikmas termasuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan karena perubahan prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud);
- Berkurangnya jumlah sasaran warga belajar keaksaraan dasar terutama di tahun 2017, menjadikan program Keaksaraan Dasar (KD) tidak prioritas, bergeser untuk memperkuat program keaksaraan lanjutan yang meliputi Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Multikeaksaraan;
- Merealokasikan dana keaksaraan dasar ke dana keaksaraan lanjutan untuk program memelihara keberaksaraan warga;

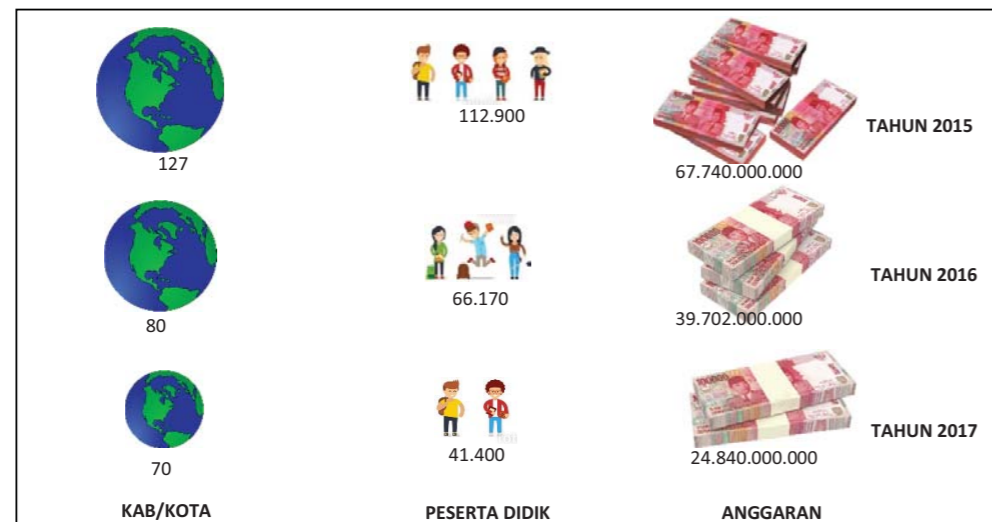
Walaupun anggaran program Keaksaraan Dasar terus mengalami penurunan, pemerintah terus berkomitmen untuk menuntaskan buta aksara terkhusus pada daerah-daerah terpadat sekaligus menyelenggarakan program keaksaraan lanjutan untuk memelihara keberaksaraan warga masyarakat.

Selain program pendidikan keaksaraan dasar, alokasi program dan anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit.Bindiktara) juga dialokasikan untuk pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan lanjutan terdiri dari dua jenis yakni Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Multikeaksaraan.

Sama halnya dengan keaksaraan dasar, selama tiga tahun terakhir (2015-2017), Dit.Bindiktara juga secara kontinyu mengalokasikan dana untuk program KUM. Pada tahun 2015 Dit.Bindiktara mengalokasikan dana sebesar Rp. 67,70M untuk 112.900 peserta didik yang tersebar pada 127 kabupaten/kota di 14 provinsi. Pada tahun 2016, Dit.Bindiktara mengalokasikan dana sebesar Rp. 39,70M untuk 66.170 peserta didik yang tersebar pada 80 kabupaten/kota di 18 provinsi. Pada tahun 2017, Dit.Bindiktara mengalokasikan dana sebesar Rp. 24,84M untuk 41.400 peserta didik yang tersebar pada 70 kabupaten/kota di 17 provinsi.

Kondisi yang tergambar tersebut di atas dapat diamati pada grafik di bawah ini:

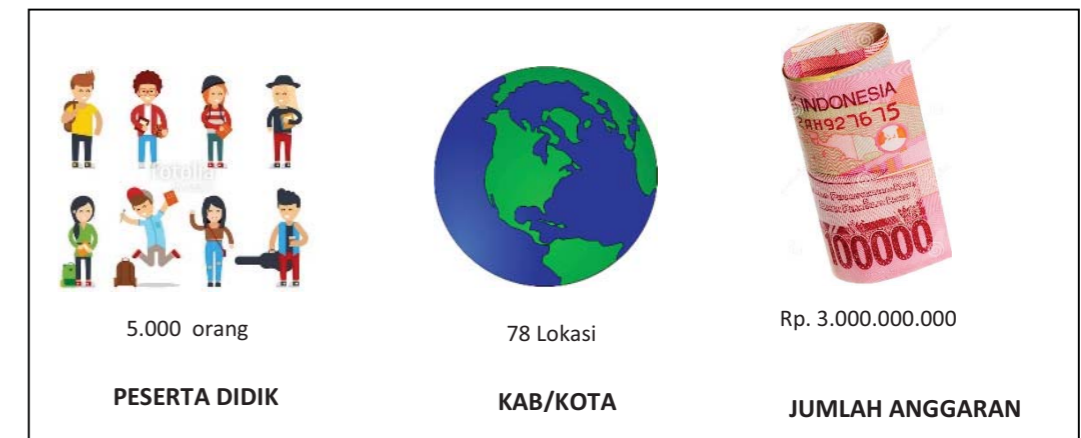
Gambar 3.2 Jumlah Sasaran dan Anggaran KUM Tahun 2015-2017



Alokasi program dan anggaran untuk Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) selama tiga tahun terakhir terus menurun baik jumlah anggaran, peserta didik ataupun jumlah kabupaten/kota penerima. Hal ini tentunya berkaitan dengan penurunan jumlah sasaran KD karena peserta didik KUM adalah mereka yang sudah mengikuti program KD dan mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Lain halnya dengan program KUM yang telah diluncurkan setiap tahun, program multikeaksaraan merupakan program yang baru diluncurkan pada tahun 2017. Untuk program ini, Dit.Bindiktara mengalokasikan dana sebesar 3 Milyar rupiah pada 78 kabupaten/kota untuk membelajarkan 5.000 peserta didik. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.3 Jumlah Sasaran dan Anggaran Multikeaksaraan Tahun 2017



Tahun 2017 menandai dimulainya program pendidikan multikeaksaraan (MK). Hal ini terkait dengan kebijakan multilateral antar negara UNESCO yang memiliki landasan untuk menerapkan program literasi abad 21 yang meliputi: (1) baca tulis; (2) berhitung; (3) sains; (4) TIK; (5) keuangan; dan (6) budaya dan kewarganegaraan.

Selain itu, Direktorat Bindiktara juga telah mengembangkan perangkat kurikulum multikeaksaraan dengan menentukan 5 tema dan 5 subtema pembelajaran yang dapat dikembangkan. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan. Setiap lembaga penyelenggara program multikeaksaraan wajib memilih salah satu dari kelima tema tersebut untuk dibelajarkan. Setiap tema dibelajarkan selama 86 jam @60menit. Beberapa tema dan sub tema yang dapat dikembangkan dalam pendidikan multikeaksaraan adalah:

- Tema profesi, keahlian, dan pekerjaan. Dengan subtema yang dikembangkan adalah pekerjaan dan usaha di bidang pertanian;
- Tema pengembangan seni budaya. Dengan subtema yang dikembangkan adalah kearifan budaya lokal;
- Tema sosial, politik, dan kebangsaan. Dengan subtema yang dikembangkan adalah wawasan kebangsaan;
- Tema kesehatan dan olahraga. Dengan subtema yang dikembangkan adalah kesehatan lansia;
- Tema ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan subtema yang dikembangkan adalah literasi keuangan.

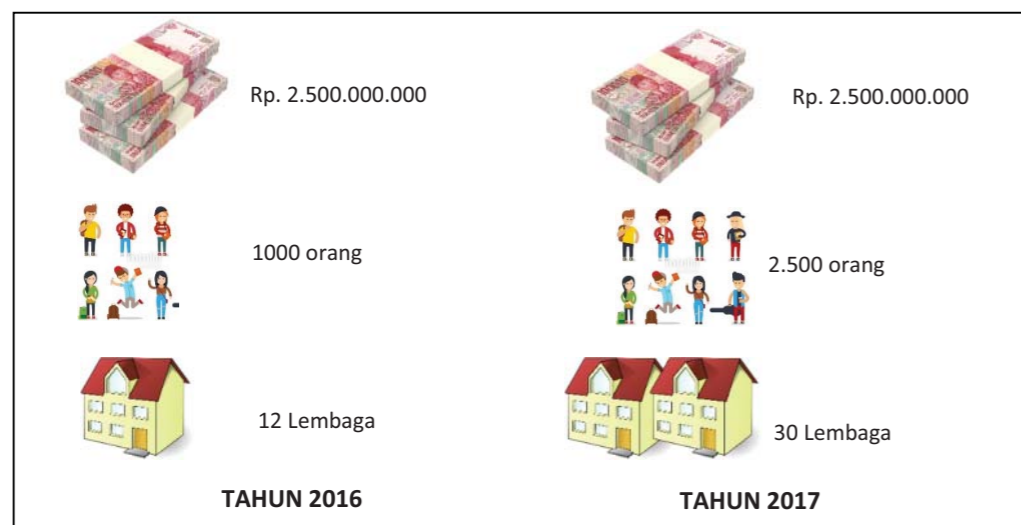
2) Keaksaraan Dasar untuk Daerah Khusus (KAT/KAK), 3T, Papua dan Papua Barat

Sejak tahun 2016, pemerintah meluncurkan program Keaksaraan Dasar untuk memberdayakan masyarakat pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)/Komunitas Adat Khusus (KAK), 3T, Papua dan Papua Barat.

Pendidikan keaksaraan dasar di daerah Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara latin usia 15-59 tahun di komunitas adat terpencil/khusus. KAT dimasukkan agar warga masyarakat memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis, dan berhitung, untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Alokasi program dan anggaran Keaksaraan Dasar di daerah KAT/KAK terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.4 Program Keaksaraan Dasar di Daerah KAT/KAK Tahun 2016-2017



Selama 2 tahun, rintisan KAT/KAK telah terjadi penurunan harga satuan dari Rp. 2,5 juta/orang/pertahun turun menjadi Rp. 1 juta/orang/ tahun. Hal tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi pada pembelajaran yang berdasarkan pada pengalaman pada tahun pertama yang dinyatakan cukup dengan dana Rp. 1 juta/orang/tahun.

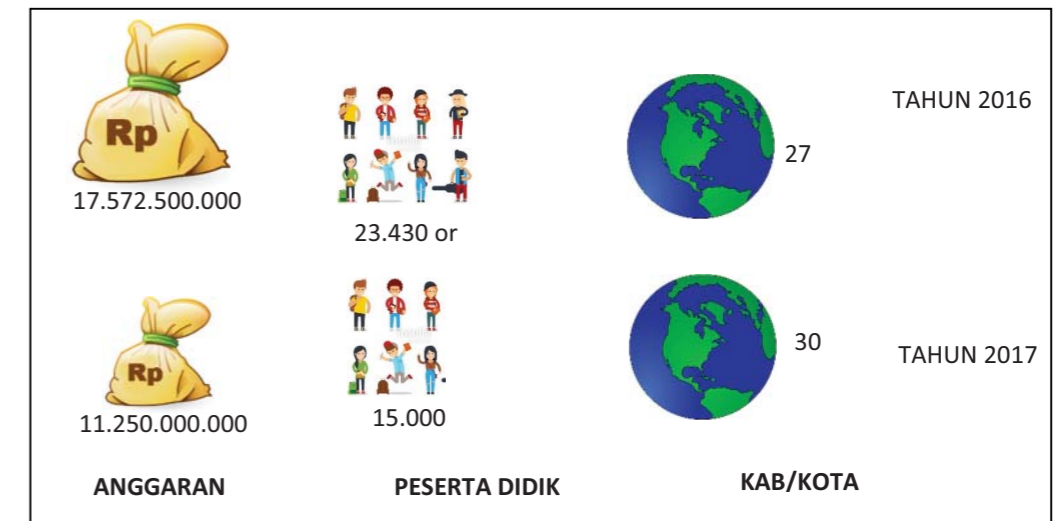
Selain pendidikan keaksaraan dasar untuk warga di KAT/KAK, pemerintah juga memberikan meluncurkan anggaran keaksaraan dasar untuk warga di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), serta Papua dan Papua Barat.

Tujuan pendidikan keaksaraan dasar pada Daerah 3T, serta Papua dan Papua Barat sama dengan yang dilakukan masyarakat di wilayah KAT/KAK memberikan peluang kepada mereka yang ada pada daerah 3T, serta Papua dan Papua Barat untuk bisa mengaktualisasikan diri dan berkembang seperti masyarakat Indonesia di wilayah lain.

Program keaksaraan dasar untuk daerah 3T, Papua dan Papua Barat mulai diluncurkan pada tahun 2016. Alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 17,57M untuk membelajarkan sebanyak 23.430 peserta didik di 27 kabupaten/kota di 11 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Tahun 2017, jumlah alokasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 11,25M untuk membelajarkan peserta didik sebanyak 15.000 orang yang tersebar di 30 kabupaten/kota di 12 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua.

Gambar 3.5 Jumlah Sasaran dan Anggaran KD untuk Daerah 3T, Papua dan Papua Barat Tahun 2016-2017



Anggaran program keaksaraan dasar untuk daerah 3T, Papua dan Papua Barat tahun 2017 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan alokasi anggaran ini disebabkan karena menurunnya jumlah pagu anggaran yang diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017.

3) Kajian Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjutan

Penurunan angka buta aksara selama 3 tahun yakni 2014 s.d 2016 dipengaruhi oleh penyelenggaraan program keaksaraan dasar melalui dana APBN dan APBD (I dan II), partisipasi lembaga mitra, dan para penggiat/masyarakat yang didukung oleh beberapa program terobosan seperti penyelenggaraan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) dan program Kampung Literasi (KL). Selain itu, alokasi program penuntasan buta aksara diprioritaskan pada daerah-daerah terpadat buta aksara. Program ini cukup membantu membelajarkan warga yang masih buta aksara di berbagai daerah yang memiliki angka buta aksara tinggi. Selain itu, pemerintah daerah bersama para penggiat literasi terlibat aktif dalam menurunkan angka buta aksara secara serentak diberbagai daerah.

Dibanyak daerah di Indonesia, masyarakat turut aktif dalam menggiatkan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan keaksaraan. Hal ini membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengurangi jumlah buta aksara yang ada di daerahnya masing-masing. Selain itu, berbagai metode pembelajaran keaksaraan juga diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat warga buta aksara dalam belajar keaksaraan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) masyarakat, terdapat tiga hal yang dilakukan yakni:

- Menumbuhkan kesadaran akan motivasi belajar. Sebab lemahnya motivasi belajar merupakan akar permasalahan dalam usaha penuntasan buta aksara.
 - Melakukan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan swasta dalam upaya gerakan masif penuntasan buta aksara, misalnya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - Mengintegrasikan program pendidikan keaksaraan dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini dapat dimaksimalkan melalui dukungan anggaran APBN sebagai investasi dalam menciptakan masyarakat yang melek aksara
- Setiap tahun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan yang telah membantu pemerintah berpartisipasi dalam menurunkan angka buta aksara.

Untuk tiga tahun terakhir, pemerintah telah menyelenggarakan peringatan Hari Aksara Internasional (HAI), yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2015-2017

No.	Waktu Puncak HAI	Tempat	Penerima Anugera Aksara
1.	24 Oktober 2015	Kab. Karawang Prov. Jawa Barat	Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kab. Karawang (Jabar), Banjar (Kalsel), Cirebon (Jabar), Deliserdang (Sumut), Sukabumi (Jabar), Bogor (Jabar), Donggala (Sulteng), Pasuruan (Jatim), Kepulauan Mentawai (Sumbar), ParigiMoutong (Sulteng), Bantaeng (Sulsel), dan Kota Jayapura (Papua)
2.	20 Oktober 2016	Kota Palu Prov. Sulawesi Barat	Kab. Bogor (Jabar), Kab. Jember (Jatim), Kab. Sumenep (Jatim), Kab. Bulukumba (Sulsel), Kab. ParigiMoutong (Sulteng)
3.	8 September 2017	Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat	Kab. Kuningan (Jabar), Cirebon (Jabar), Kab. Probolinggo (Jatim), dan Kab. Sigi (SulTeng)

Selain pemerintah daerah, penghargaan anugerah aksara juga diberikan kepada pegiat keaksaraan dan lembaga pendidikan nonformal.

Keaksaraan di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah mengingat buta aksara tersebut tergolong pada usia produktif yakni antara usia 15-59 tahun yang semestinya memiliki sumber daya yang bermutu. Untuk menjadikannya memiliki mutu sumber daya yang baik, pemerintah tidak hanya dilakukan melalui pendidikan keaksaraan yang hanya mengajarkan warga membaca, menulis dan berhitung. Tetapi dilanjutkan dengan program Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multikeaksaraan.

Selain program keaksaraan tersebut di atas, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan juga menyelenggarakan berbagai program yang memungkinkan terjadinya peningkatan mutu dan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Selama tahun 2015, pemerintah terus berupaya mengembangkan keberaksaraan masyarakat dengan menerapkan kebijakan pengembangan literasi abad 21.

Program keaksaraan dan program pendukung keaksaraan dinilai cukup baik dalam menurunkan angka buta aksara khususnya pada lima provinsi terpadat pada tahun 2014. Pada tahun 2015, lima provinsi terpadat masih terdapat pada provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan Sulawesi Selatan. Namun demikian, dengan program keaksaraan yang diluncurkan pada tahun 2014, jumlah buta aksara berhasil turunkan sebanyak 337.177 orang.

Untuk menurunkan angka buta aksara pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan berbagai program keaksaraan yakni: (1) 3T; (2) Keaksaraan Usaha Mandiri; (3) Multikeaksaraan.

Pengembangan program pendidikan keaksaraan dilanjutkan dengan program pendukung sekaligus program terobosan yakni Gerakan Indonesia Membaca (GIM), Kampung Literasi (KL), penguatan penggiat literasi, dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan TBM.

Program-program tersebut disambut baik oleh setiap penggiat literasi di lapangan dalam mendukung setiap aktivitas literasi pada skala yang lebih luas yang didukung oleh kebijakan pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Misalnya program Kampung Literasi, program terobosan ini memberikan warna tersendiri dalam penyelenggaraan keaksaraan dan pengembangan budaya baca dan mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun pihak terkait lainnya.

Disaat yang sama program terobosan ini dinilai memberikan andil yang baik dalam menurunkan buta aksara di lapangan secara drastic sekaligus mengembangkan dan meningkatkan budaya baca masyarakat. Tidak hanya dalam meningkatkan Calistung masyarakat, melainkan juga dalam hal keberaksaraan yang lebih luas.

GIM dirancang sebagai event untuk sosialisasi, koordinasi dan meningkatkan pemahaman serta kepedulian pemerintah daerah beserta masyarakat terhadap urgensi program literasi masyarakat yang akan mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi dari gerakan pengembangan literasi masyarakat tersebut sangat diharapkan dapat diwujudkan secara ril melalui rintisan pengembangan Kampung Literasi.

Kampung Literasi diharapkan menjadi pusat pengembangan keberaksaraan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan. Kampung Literasi dalam kurung waktu tertentu diharapkan dapat meningkatkan spirit, pembiasaan dan kretivitas masyarakat untuk mengembankan wawasan dan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi secara efektif sehingga pada saat yang saat sama mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan. Jika hal itu terjadi, akan sangat berdampak terhadap peningkatan keberaksaraan/literasi masyarakat di desa/wilayah lainnya. Dengan kata lain, kampong literasi diharapkan dapat menjadi model pengembangan efektivitas keberaksaraan bagi daerah lainnya.

Tahun kedua pelaksanaan GIM dan Kampung Literasi tampaknya belum mencapai hasil yang diharapkan. GIM selama ini masih dipandang sebagai kegiatan seremonial karena sangat tergantung pada pendanaan APBN. Begitu juga Kampung Literasi belum bisa berkembang secara optimal. Selama ini kampung literasi masih seperti pemusatan kegiatan literasi di satu lembaga Pendidikan Nonformal. Pemaknaan Kampung Literasi sebagai pusat para pegiat dan pusat pengembangan keberaksaraan terpadu daerah lain belum begitu tampak.

Kondisi tersebut perlu diperbaiki oleh semua pihak termasuk dalam pengembangan program dan penganggaran di tingkat Direktorat Jenderal.

2. Pengembangan Budaya Baca

a. Penguatan TBM

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan non formal yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Keberadaan TBM terutama dari sisi program dan layanan pendidikan keberaksaraan (literasi) sungguh suatu hal yang menarik untuk didiskusikan.

Kelembagaan TBM tidak dapat dikategorikan sebagai satuan pendidikan karena tidak ada payung hukum (permendikbud) yang relevan. Kendatipun demikian, dari sisi layanan pendidikan terutama pendidikan keaksaraan dan budaya baca sungguh luar biasa. Bahkan pada rangkaian perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017 tidak kurang dari 38 tokoh/penggiat layanan TBM mendapat kehormatan untuk ketemu dan berbincang-bincang tentang pengalaman penyelenggaraan literasi bersama Presiden RI Jokowi di istana negara, Jakarta.

Kiprah para penggiat TBM sudah tidak diragukan lagi dalam menunjang pengembangan literasi masyarakat di Indonesia. Karenanya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan seringkali mengundang para penggiat literasi diberbagai daerah untuk mendorong peningkatan kapasitas dan efisiensi.

Pada tahun 2016 para pengelola TBM yang aktif telah tergolong dalam kelompok Donasi Buku Online. Sampai dengan saat ini sekitar 1500 TBM sudah aktif berbagi informasi dan berbagai buku/sumber belajar di web tersebut dengan melibatkan para penerbit dan para donatur buku lainnya yang siap mendistribusikan buku-buku dan sumber belajar kepada seluruh anggota Donasi Buku Online.

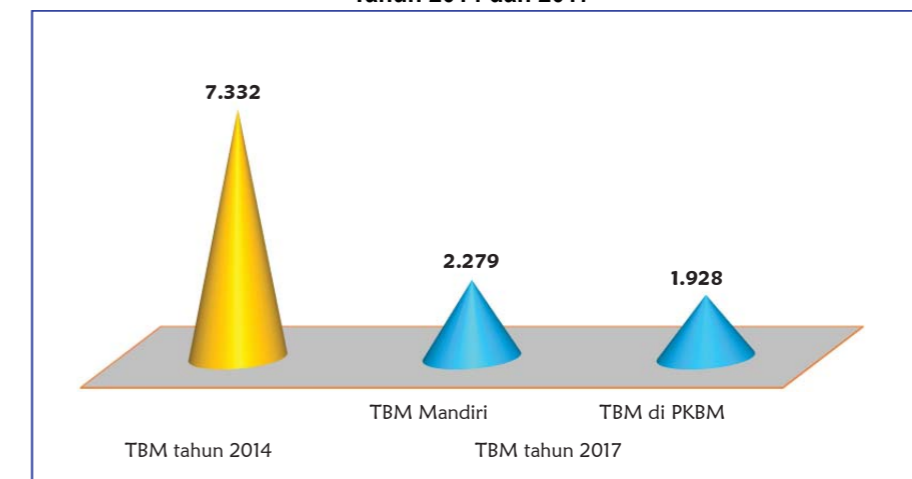
Untuk penguatan program dan layanan TBM, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit.Bindiktara) mengalokasikan beberapa bantuan program terkait dengan penyelenggaraan TBM di Indonesia. Beberapa program tersebut diantaranya TBM Rintisan, TBM penguatan, TBM Ruang Publik, dan TBM Berbasis Elektronik. Untuk memahami lebih baik terhadap perbedaan keempat jenis bantuan TBM tersebut dapat diamati pada pengertian di bawah ini:

- 1) TBM Rintisan merupakan upaya merintis TBM baru di kabupaten/kota yang belum memiliki 10 TBM dengan menyediakan bahan-bahan bacaan bagi masyarakat serta melakukan berbagai kegiatan membaca-menulis dan kegiatan literasi lainnya;
- 2) TBM Penguatan adalah fasilitasi untuk memperkuat kelembagaan TBM dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan, penyediaan tambahan koleksi, sebagian biaya operasional penyelenggaraan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan keberaksaraan, minat serta budaya baca;
- 3) Taman Bacaan Masyarakat berbasis elektronik merupakan layanan taman bacaan yang dalam penyelenggaraannya sudah memadukan dan memanfaatkan bahan pustakan dan sumber-sumber informasi yang dikemas secara digital dan dioperasikan menggunakan sejumlah peralatan elektronik;
- 4) TBM Ruang Publik adalah penyediaan layanan TBM yang berlokasi di ruang publik (Mall, Rumah Sakit, dll).

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan akses kepada setiap orang yang ingin mendirikan TBM baru dan penguatan terhadap TBM yang sudah berjalan agar dapat meningkatkan mutu dan layanan kepada masyarakat.

Mengingat TBM bukan satuan pendidikan, pendataan tentang TBM belum dilakukan dengan baik di Indonesia. Sehingga untuk mengetahui jumlah TBM yang aktif dan tidak aktif serta TBM mandiri dan TBM yang berada dibawah naungan SPNF belum diketahui dengan pasti. TBM yang terdata pada tahun 2014 berjumlah 7.332, terdiri dari TBM mandiri dan TBM pada satuan pendidikan. Pada tahun 2017 jumlah TBM mandiri sebanyak 2.279 lembaga dan TBM di PKBM berjumlah 1.928. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.7 Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Tahun 2014 dan 2017



Sumber: Data Bindiktara, Dapodik, dan Donasi Buku Online

Data tersebut masih bersifat data sementara yang terdata melalui aplikasi donasi buku online dan melalui Data Pokok Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas) tahun 2017. Tahun 2017 menunjukkan klasifikasi dua TBM yakni TBM Mandiri dan TBM di PKBM. Perbedaan keduanya dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbedaan TBM Mandiri dan TBM di PKBM

TBM Mandiri	TBM di PKBM
1. Didirikan atas nama TBM itu sendiri dan tidak bernaung dibawah lembaga induknya (lembaga lain)	1. Bernaung dibawah PKBM (atau lembaga SPNF lainnya) sebagai induk
2. Memiliki struktur organisasi lembaga sendiri	2. Struktur organisasi menginduk pada lembaga induk
3. Memiliki prasarana dan sarana khusus untuk TBM	3. Hanya menyediakan layanan TBM, sarana dan prasarana yang digunakan menginduk pada lembaga naungannya
4. Memiliki surat/akte pendirian atas nama TBM	4. Surat/akte pendirian atas nama lembaga induk

Perkembangan jumlah lembaga ataupun aktivitas di TBM dalam meningkatkan budaya masyarakat akhir-akhir ini belum dilaksanakan secara maksimal. Hanya sebagian kecil dari ribuan TBM (TBM mandiri dan TBM di PKBM) yang ada di Indonesia yang melaksanakan fungsinya meningkatkan literasi dan budaya membaca masyarakat. Pemerintah juga sejauh ini masih mengalami beberapa kendala dalam mengembangkan TBM. Beberapa kendala dalam mengembangkan peningkatan mutu dan layanan TBM diuraikan sebagai berikut:

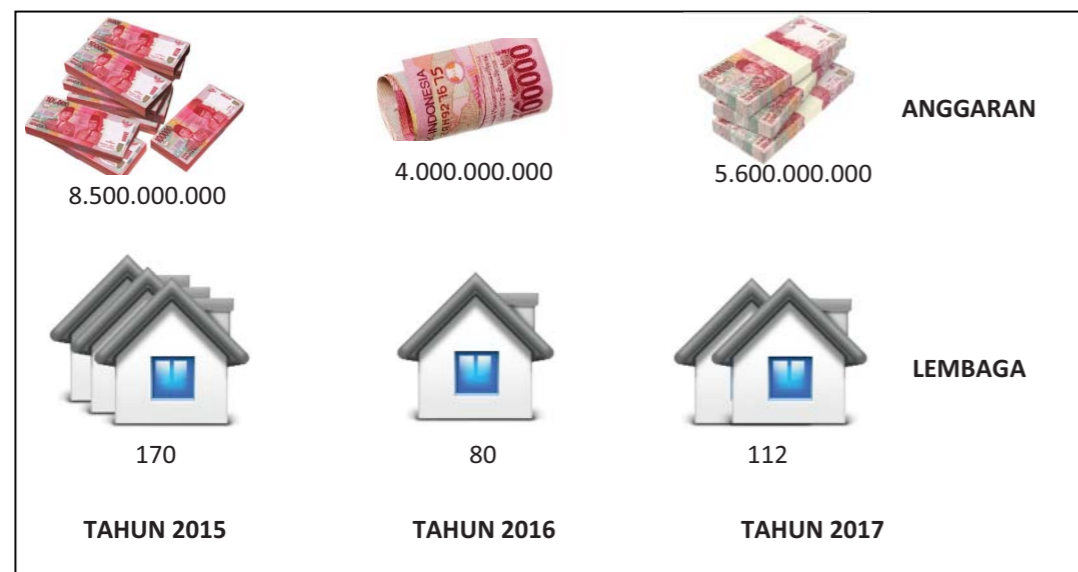
- 1) TBM bukanlah satuan pendidikan sehingga tidak dapat mengakses berbagai program pendidikan;
- 2) Umumnya TBM masih mengharapkan dana bantuan pemerintah pusat sehingga aktivitas TBM bersifat *on-off* tergantung dana yang diperoleh;
- 3) Pengelola TBM masih kesulitan memperoleh buku-buku yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- 4) Harga buku bacaan yang masih mahal sehingga dana yang diperoleh TBM hanya mampu menghadirkan beberapa buku bacaan;
- 5) Masih sedikit dari pengelola yang *all out* (totalitas) dalam mengelola dan memberikan layanan TBM yang berkualitas;
- 6) Minat baca masyarakat yang belum begitu menggembirakan;
- 7) Forum TBM (provinsi maupun nasional) yang belum berfungsi maksimal dalam mengelola dan mengatur aktivitas-aktivitas TBM dibawahnya;
- 8) Masih rendahnya kemampuan pengelola TBM dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan akses, mutu dan layanan.

b. Alokasi Program dan Anggaran TBM

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah terus mengalokasikan anggaran Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Anggaran ini diperuntukkan untuk meningkatkan sarana TBM yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan layanan TBM termasuk didalamnya melakukan ekspansi layanan peningkatan minat baca ke lokasi-lokasi yang baru.

Berikut ini adalah alokasi program dan anggaran peningkatan TBM untuk tiga tahun terakhir yakni tahun 2015, 2016 dan 2017 yakni:

Gambar 3.6 Alokasi Program dan Anggaran Peningkatan Sarana TBM Tahun 2015-2017



Pada tahun 2015, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan (Dit. Bindiktara) mengalokasikan program peningkatan sarana TBM sebesar 8,5 milyar rupiah yang diberikan kepada 170 lembaga yang tersebar di 26 provinsi.

Tahun 2016, Dit.Bindiktara mengalokasikan dana untuk peningkatan sarana TBM sebesar 4 milyar rupiah yang diberikan kepada 80 lembaga yang tersebar di 22 provinsi.

Pada tahun 2017, Dit.Bindiktara mengalokasikan dana untuk peningkatan sarana TBM sebesar 5,6 milyar rupiah yang diberikan kepada 112 lembaga yang tersebar di 24 provinsi.

Pada tahun 2016, alokasi anggaran untuk peningkatan sarana TBM diturunkan karena disebabkan oleh berkurangnya alokasi dana yang diberikan kepada Dit.Bindiktara. Sama halnya dengan tahun 2017, alokasi anggaran untuk peningkatan sarana TBM juga terus berkurang. Namun demikian, karena TBM dianggap penting sebagai motor penggerak dalam meningkatkan budaya baca di masyarakat maka pada tahun 2017 jumlah alokasi dana ditingkatkan melalui realokasi anggaran.

Kendatipun demikian, target peningkatan kapasitas TBM melalui peningkatan sarana TIK (seperti tertuang pada Renstra) belum tercapai. Urgensi TBM sebagai pusat pengembangan dan penyebaran spirit literasi bagi masyarakat belum dipahami oleh semua pihak, termasuk oleh para pembina/pengambil kebijakan pendidik baik ditingkat pusat maupun di daerah.

c. Peran GIM dan Kampung Literasi

Gerakan Indonesia Membaca merupakan upaya mempercepat program pengembangan budaya baca melalui gerakan/gebyar kegiatan yang melibatkan para pengiat literasi, pemerintah daerah, dan berbagai unsur masyarakat dalam suatu wilayah (kab/kota). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses sosialisasi tentang kegiatan literasi, menjangkau dukungan dan kolaborasi antar berbagai pihak agar mulai tumbuh dan berkembang kesadaran untuk mengembangkan dan membudayakan kegiatan literasi dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Hal-hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan GIM adalah sebagai berikut:




- 1) Meningkatkan wawasan dan pemahaman pemerintah kabupaten/kota, lembaga swasta, berbagai organisasi mitra, serta masyarakat tentang pentingnya kesadaran berakarsa untuk peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 2) Mewujudkan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan program pengembangan budaya baca yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD);
- 3) Melakukan publikasi, penyusunan RAD, program aksi dan apresiasi literasi, sarasehan dan melakukan donasi buku.

Kampung literasi adalah sebuah gagasan untuk membuat model/percontohan rintisan pengembangan budaya baca (literasi) masyarakat melalui peran para pegiat disuatu wilayah. Beberapa aktivitas yang diharapkan dapat dilakukan dan terus berkembang di lingkungan masyarakat tersebut antara lain: 1) peningkatan minat baca masyarakat melalui pelatihan, beda buku, lomba karya tulis, dan arisan buku; 2) peningkatan program multiliterasi melalui donasi buku, pojok baca, seni budaya dan kewirausahaan.

Penyelenggaraan Kampung Literasi dapat dilakukan oleh TBM/satuan pendidikan nonformal, lembaga/organisasi maupun perkumpulan yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki jiwa mengabdikan dan membangun masyarakat di sekitarnya.

Penyelenggaraan GIM dan Kampung Literasi dilaksanakan sejak dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan tahun 2017, dengan jumlah sasaran dan anggaran sebagai berikut:

Gambar 3.7 Program dan Anggaran GIM dan Kampung Literasi Tahun 2016-2017

	28 lokasi	28 lokasi		31 Lembaga	42 lembaga
	Rp. 7.000.000.000	Rp. 1.800.000.000		Rp. 3.680.000.000	Rp. 4.200.000.000
Gerakan Indonesia Membaca		Kampung Literasi			
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017		

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa selama dua tahun berturut-turut GIM mengalami penurunan dan Kampung Literasi mengalami penambahan

Penurunan jumlah lokasi penyelenggaraan GIM dan peningkatan jumlah lokasi penyelenggaraan Kampung Literasi tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi dapat yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tidak semua daerah siap untuk menyelenggarakan GIM;
- 2) Penyelenggaraan GIM lebih bersifat seremonial, dan tidak semua kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dapat dipersiapkan dalam kegiatan GIM;
- 3) Pemerintah berusaha lebih selektif dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan GIM dan lebih memprioritaskan kegiatan Kampung Literasi yang kegiatannya lebih nyata di daerah dalam meningkatkan budaya baca masyarakat.

GIM dan Kampung Literasi merupakan kegiatan dan program yang saling mendukung satu sama lain di lapangan. Namun demikian, Kampung Literasi lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan langsung mengarah pada sasaran yang tepat karena diperkuat oleh aktivitas para pegiat literasi di setiap daerah.

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah pada Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca

Beberapa tantangan besar dalam pengentasan dan penuntasan buta aksara sekarang ini terbagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. Karakteristik penduduk buta aksara yang tersisa 2,07% adalah mereka dari kelompok miskin, terpencil dan terpencar, serta sebagian dari mereka berada pada komunitas dengan budaya tertentu;
- b. Masih besarnya jumlah aksarawan baru yang mengalami relapsing (menjadi buta aksara kembali), karena kurangnya motivasi untuk memelihara melek aksara yang telah diperoleh;
- c. Masih adanya potensi bertambahnya penduduk buta aksara, yakni dari jumlah siswa SD kelas awal (1-3) yang drop-out, yang berpotensi menjadi buta aksara.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan GIM adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan GIM belum secara signifikan dalam membangkitkan semangat dan minat membaca masyarakat;
- b. Penyelenggaraan GIM masih terfokus pada kegiatan publikasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), program aksi, apresiasi literasi, sarasehan dan donasi buku yang sifatnya formalitas;
- c. Euforia penyelenggaraan GIM belum dibarengi dengan aksi kongkrit dalam menyelenggarakan program keaksaraan dan budaya baca di daerah.

Selanjutnya beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kampung Literasi adalah sebagai berikut:

- a. Kampung literasi masih dianggap sebagai program yang berjalan selama setahun sehingga pada akhir tahun aktivitas membaca semakin berkurang bahkan tidak ada;
- b. Ketergantungan lembaga penyelenggara Kampung Literasi terhadap dana APBN masih sangat tinggi yang berpengaruh pada aktivitas literasi yang membutuhkan dana tambahan;
- c. Masih sedikitnya lembaga pengelola Kampung Literasi yang memiliki sumber usaha sendiri sehingga hanya ketergantungan dari dana APBN yang diterima;
- d. Masih kurang dan sulitnya memenuhi kebutuhan literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Masih mahal dan sulitnya memperoleh sumber informasi berupa buku (cetak dan non cetak) dengan kualitas yang baik;
- f. Sulitnya menemukan pengelola yang memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan Kampung Literasi;
- g. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kampung yang terfasilitasi dengan sumber bacaan belum seimbang;
- h. Anggapan masyarakat yang mengisyaratkan bekerja lebih penting dari membaca dan bahkan menganggap tidak ada relevansi antara membaca dengan pendapatan yang diperoleh;
- i. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah untuk membudayakan membaca sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari;

Tantangan tersulit terletak pada kesadaran dan komitmen tentang pentingnya keaksaraan. Keterlibatan pemerintah baik pusat, daerah, para pengiat serta kesadaran setiap individu untuk terus menghadirkan sarana dan media baca dan terus meningkatkan minat baca sangat diperlukan. Studi-studi yang berkaitan dengan minat baca dan manfaatnya terus dilakukan agar semua unsur memahami manfaat penting dari membaca ditengah-tengah kehidupan global.

Program pendidikan keaksaraan ke depan diharapkan tidak hanya menjadi gerakan nasional yang bertumpu hanya pada upaya pemerintah, tetapi lebih kuat hingga menjadi sebuah gerakan masyarakat yang mampu untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, dan berperan dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan dunia informasi digital serta dalam rangka membangun dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (MDG's) seperti yang telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2017.

Minat baca menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasarkan data yang diungkapkan melalui studi *Most Littered Nation in The World* Tahun 2016, minat baca di Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara. Urutan yang besar namun bermakna miris yang menggambarkan

rendahnya minat baca masyarakat Indonesia secara umum. Indonesia berada di bawah Thailand yang menduduki posisi 59 dan berada di atas Bostwana peringkat 61. Padahal, dari segi penilaian infrastuktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Indonesia berada di urutan ke 34 di atas Jerman, Portugal, Selandia Baru dan Korea Selatan. Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia masih minim dalam memanfaatkan infrastruktur membaca yang telah disiapkan. Banyaknya perpustakaan, taman baca, mobil keliling, kapal perpustakaan, perpustakaan kuda keliling dan sejenisnya tidak berbanding lurus dengan meningkatnya minat baca masyarakat.

Kendati demikian, ada tiga provinsi di Indonesia memiliki minat baca yang tinggi yakni Provinsi Kepulauan Riau (94,01%), DKI Jakarta (93,10%), dan Bali (92,44%). Tingginya minat baca tersebut diklasifikasi berdasarkan jenis bacaan diantaranya majalah, surat kabar, buku pelajaran dan pelajaran serta artikel elektronik.

Berbagai sarana dan media pembelajaran yang dihadirkan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas-komunitas baca di tanah air baik pada pendidikan formal, non formal maupun informal belum mampu meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia secara signifikan.

Singkatnya, permasalahan minat baca di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a. Minimnya contoh anggota keluarga, masyarakat, dan publik figur yang rajin membaca;
- b. Perkembangan teknologi yang memudahkan setiap pengguna untuk mengakses informasi namun tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai di masyarakat;
- c. Aktivitas media sosial yang berlebihan dan memungkinkan setiap penggunanya rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berinteraksi satu-sama lain;
- d. Masih rendah dan minimnya ransangan membaca pada lembaga-lembaga pendidikan;
- e. Kurang terpenuhinya informasi yang dibutuhkan menjadi minat baca masyarakat;
- f. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap membaca tidak terlalu penting karena tidak berhubungan dengan pendapatan ekonomi.
- g. Masih minimnya sarana yang mendukung kegiatan membaca;
- h. Masih sedikitnya gerakan-gerakan membaca khususnya pada kalangan remaja.

Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, forum PKBM dan TBM, bersama para penggiat telah dan akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menjadikan keluarga sebagai tempat yang pertama untuk mendidik dan mencotohkan sikap budaya baca. Dalam hal ini, semua anggota keluarga menjadi agen pelopor dalam membudayakan membaca yang diharapkan akan dicontoh oleh anggota keluarga yang lain;
- b. Peranan pemerintah dalam meningkatkan mutu dan layanan yang memungkinkan setiap orang dapat menikmati teknologi untuk mengakses multiinformasi. Hingga saat ini dan rencana kedepan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, forum PKBM dan TBM, terus berkomitmen berpartisipasi aktif dalam pengembangan perpustakaan, taman baca, dan sarana-sarana sejenis lainnya yang memungkinkan setiap orang mampu mengakses informasi dengan mudah. Tidak sebatas pada sarana fisik dan buku cetak. Pemerintah dan semua

unsur-unsur terkait memahami tentang pergeseran penggunaan sarana baca pada yang lebih praktis dengan menggunakan media digital. Komputer, e-book, internet, dan layanan-layanan berbasis teknologi lain turut menjadi bagian dalam rencana strategis pemerintah;

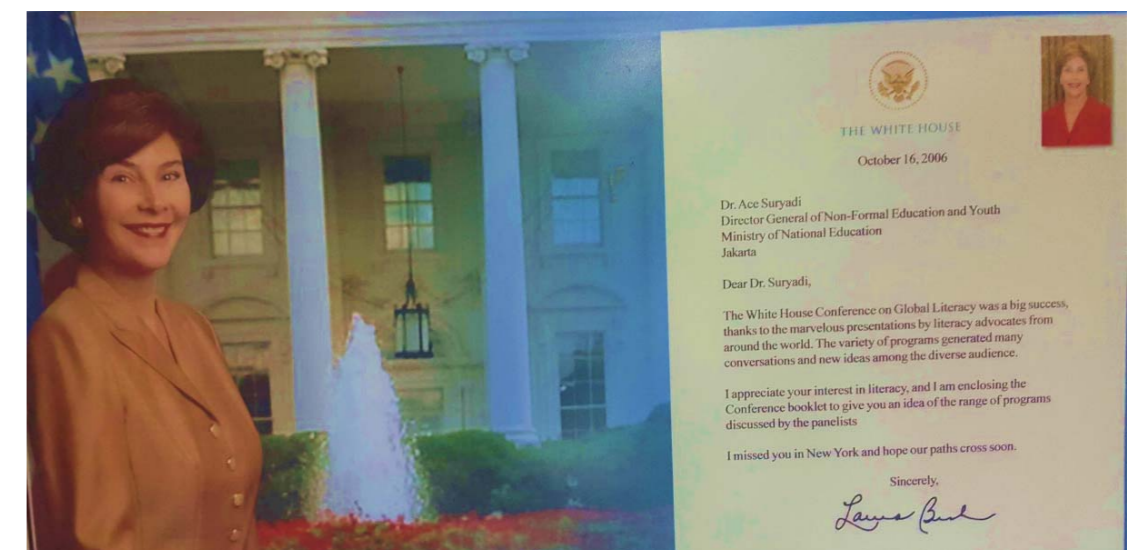
- c. Pemerintah, swasta, dan keluarga berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya budaya membaca dan bijak dalam penggunaan media sosial;
- d. Setiap lembaga pendidikan proaktif dalam mengkampanyekan budaya membaca dan menyiapkan fasilitas dan bahan-bahan bacaan yang dibutuhkan bagi peserta didiknya;
- e. Menyediakan berbagai bacaan atau sumber informasi elektronik lainnya yang dibutuhkan oleh warga;
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi langsung, poster, dan menggiatkan aktivitas membaca yang langsung dikaitkan dengan dunia kerja yang memungkinkan masyarakat memahami keterkaitan antara membaca dan pekerjaan yang digeluti;
- g. Meningkatkan sarana-sarana membaca melalui kerja sama berbagai pihak termasuk para komunitas literasi khususnya dalam peningkatan akses informasi;
- h. Melibatkan remaja-remaja khususnya publik figur sebagai duta baca yang mampu membangkitkan komunitas-komunitas baca di kalangan remaja.

4. Penghargaan yang Diraih

Penghargaan internasional telah dicapai oleh Indonesia sebagai pengakuan atas capaian keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program keaksaraan secara konsisten dengan hasil yang signifikan. Penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penghargaan dari Ibu Negara Amerika Serikat (Duta Baca Internasional)

Penghargaan ini diberikan oleh Duta Aksara Internasional sekaligus sebagai Ibu Negara Amerika Serikat yakni Laura Lane Welch Bush pada tanggal 16 Oktober 2006 kepada Dr. Ace Suryadi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



Penghargaan ini diberikan karena keberhasilan Indonesia dalam penuntasan tuna aksara. Hal ini pula yang mengantarkan Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Juli 2007 berbicara upaya pemberantasan Buta Huruf se-Dunia (*UNESCO Regional Conferences in Support of Global Literacy*) pada Konferensi Regional UNESCO di Beijing China.

b. King sejong Literacy Prize

Pada bulan september tahun 2012, Indonesia meraih *Anugera King Sejong Literacy Prize*. Pemberian penghargaan atas dasar komitmen tinggi dan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan keaksaraan. Program meningkatkan kualitas keaksaraan melalui aksara kewirausahaan, budaya baca dan pelatihan tutor telah memikat UNESCO karena jangkauannya yang luas mendekati tiga juga orang dalam pendekatan pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan pengenalan kewirausahaan dan pembinaan taman baca masyarakat di ruang publik, seperti pasar dan tempat ibadah, serta pengembangan tutor profesional.



Anugera ini langsung diterima oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat yakni Ella Yulaelawati, Ph.D. penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bukova di Paris Prancis.

c. Penghargaan UNESCO-Japan Prize on ESD

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova kepada Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Jayagiri Bandung (PP-PAUDNI Bandung) pada tanggal 5 November 2015 di Paris Prancis.



Penghargaan yang diterima berkat program yang dikembangkan yakni *"Eco-friendly Entrepreneurship for Youth and Adults/Eko Kewirausahaan Ramah Pemuda dan Dewasa"*. Produk pendidikan unggulan yang dikembangkan menyasar pada usia 18-45 tahun. Tujuan dari program ini adalah menciptakan wirausahawan baru berbasis keunggulan dan daya saing lokal untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang bersamaan, program ini juga berupaya melestarikan budaya lokal serta mempertahankan konservasi lingkungan.

5. Contoh Praktik Baik Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca

Berikut ini adalah beberapa praktik baik tentang penyelenggaraan program keaksaraan dan budaya baca yang dilaksanakan di beberapa daerah yakni:

a. TBM Ruang Publik RSUD Dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

Membaca itu Menyehatkan

Ketika anda berada di RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya, di lantai 2 area poliklinik, tampak 2 orang perawat sedang serius membaca buku, rupanya disela kesibukannya, mereka menyempatkan untuk membaca buku yang ada di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tersebut. *"Disamping membaca untuk mengisi waktu luang, kadangkali kami memanfaatkan jaringan internet (wifi) di TBM sini untuk mencari bahan-bahan tugas kuliah"* mereka menjelaskan. TBM Ruang Publik ini memang menyediakan sarana untuk mengakses internet gratis dengan sarana sofa, kursi dan ruangan AC.

TBM Ruang Publik @RSUD dr. Doris Sylvanus ini sebenarnya terbilang baru yang berdiri pada tanggal 24 Juni 2013 dikelola oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Alim Kota Palangkaraya. Model TBM ini dikenal dengan sebutan TBM Ruang Publik yang dulunya diawali dengan TBM @Mall dimana keberadaan TBM @Mall ini berada di Mall. TBM Ruang Publik berkembang dengan pesat dengan adanya TBM Ruang Publik di tempat umum seperti rumah sakit, pasar, terminal, stasiun, puskesmas induk dan rumah ibadah.

TBM Ruang Publik yang berada di tengah kota Palangkaraya Kalteng ini keberadaannya sangat didukung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah dan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus dengan program Kalteng Harati (Kalimantan Tengah Cerdas) dan Ayo Pintar dengan B5 (Buku, Buka, Baca, Budaya, Bisa). *"TBM Publik ini mendapatkan area/ space dari RSUD dr. Doris Sylvanus Poliklinik lantai dua dengan luas 4m x 8m secara gratis"* kata Hafis Akbar Tamimi, ketua PKBM Al Alim sekaligus pengelola TBM ini menjelaskan.

Kegiatan yang bertempat di Aula Disdik Provinsi Kalteng tersebut berjalan sukses dimana mampu menghadirkan 660 anak dan orang tua, dan guru yang berlomba dan pendamping. Undangan yang hadir mencapai 1.400 orang. Acara ini menjadi agenda tahunan dimana TBM Ruang Publik membuat piala bergilir yang menjadi *icon* eksistensi TBM Ruang Publik.

"TBM Ruang Publik @RSUD dr. Doris Sylvanus buka setiap hari Senin s.d Sabtu pukul 08.00 – 13.00 WIB dan ada petugas yang sudah dilatih untuk melayani pengunjung secara baik" kata Hafis menjelaskan.

Sistem pengelolaan TBM ini dioptimalkan secara profesional. *"Sementara menunggu aplikasi/program dari Kemendikbud tentang tata kelola manajemen buku di Taman Bacaan, kami memakai Aplikasi Perpustakaan 3.0 dari Bamboomedia untuk memudahkan manajemen di TBM Ruang Publik.* Ujarnya menambahkan. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu pengelola dan kru baik dalam transaksi peminjaman maupun pengembalian buku, terlebih dapat mencetak kartu anggota dan rekap buku secara online melalui email. Software Perpustakaan 3.0 memiliki fitur-fitur yang sangat bagus dan praktis yang sangat bermanfaat di TBM Ruang Publik. *"Kami dapat mencetak kartu anggota TBM lewat aplikasi ini, bahkan aplikasi ini dapat mengetahui bahan bacaan yang paling disenangi pengunjung ketika meminjam"* katanyamenjelaskan

Layaknya kantor, TBM ini menggunakan mesin absensi sidik jari untuk petugas, untuk mengoptimalkan kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya sebagai kru di TBM Ruang Publik. Hal ini juga memudahkan pengelola untuk mengontrol jam operasional layanan TBM Ruang Publik serta proses administrasi

Dalam rangka memberikan layanan yang baik, ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengelola TBM ini diantaranya program *Take n' Give Book*, sebuah program dimana para kru TBM Ruang Publik menawarkan buku ke bangsal/ruangan opname. Setiap hari para kru TBM Ruang Publik membawa sebanyak 50 buku tentang kesehatan dan novel untuk dipinjamkan ke pasien atau pengunjung pasien yang ada di bangsal, biasanya para kru membuat jadwal untuk berkunjung ke bangsal.

Pengelola TBM ini terus memikirkan agar lembaga bisa mandiri dengan memiliki suatu unit usaha. Gayungpun bersambut, ketika TBM mendapatkan tawaran untuk menerima jasa laundry pakaian pasien atau penunggu pasien. Usaha laundry ini ternyata dirasa cukup bagus karena jasa laundry sangatlah diperlukan ketika seseorang dalam keadaan sakit maupun para penunggu pasien yang tidak ada waktu untuk mencuci pakaian. Pengelola menerima pakaian untuk dicuci tetapi pengerjaan *laundry* ini dikerjakan di rumah lalu pakaian yang telah selesai dilaunder diantarkan ke pelanggan/pasien yang memakai jasa kami.

Para pekerja jasa usaha laundry ini adalah dari kru TBM Ruang Publik ini sendiri, setelah pulang dari bekerja di TBM Ruang Publik. Usaha jasa laundry ini hanya untuk pasien dan penunggu pasien. Sistem pembagian keuntungan sentra usaha jasa laundry ini dengan cara system pembagian hasil dimana untuk kru yang mengerjakan mendapatkan 30% dari keuntungan, 20% untuk pembelian atau *"update"* buku-buku, 10% untuk pengelola dan 40% untuk operasional TBM Ruang Publik.

Berdasarkan pada jumlah anak putus sekolah dan putus lanjut tahun pelajaran 2014/2015-2016/2017

Tabel 3.5 Jumlah putus sekolah (DO) dan putus lanjut tahun pelajaran 2015-2017

Tahun	ATS	Paket A (DO) SD	Paket B (DO-SMP/MTs+PL SD)	Paket C (DO-SMA/SMK/MA+PL SMP)	Jumlah
2015		176,909	85,000	68,219	330,128
2016		68,066	405,939	783,336	891,995
2017	4,100,000	39,213	466,613	474,259	980,085
Jumlah					2,202,208

Sumber: Data Bindiktara

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tidak Sekolah

Sesuai dengan data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) terdapat ATS usia 7-21 tahun sebanyak 4,1 juta anak. Pada akhir tahun 2016, Ditjen PAUD dan Dikmas telah mengirimkan data ATS tersebut ke kabupaten/kota sebanyak 2,9 juta ATS lengkap dengan nama, umur, identitas orang tua dan alamat untuk dilakukan penjarangan dan melakukan pembinaan agar kembali ke sekolah, mengikuti program kesetaraan atau kursus keterampilan.

Dari data di atas, maka Direktorat Diktara menargetkan sasaran ATS pada tahun 2017 adalah 514.000 anak.

2) Putus Sekolah (DO)

Jumlah putus sekolah (DO) SD yang merupakan sasaran pendidikan kesetaraan paket A dari tahun 2014-2016 pada tahun 2014 jumlah DO-SD sebanyak 176.909 orang, dan tahun 2015 sebanyak 68.066 orang, serta tahun 2016 hanya 39.213 orang.

Jumlah ini menurun karena peserta didik yang biasanya putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan jarak tempat tinggal sangat terbantu dengan peningkatan jumlah BOS, BSM, serta Program Indonesia Pintar (KIP/PIP). Selain itu penurunan disebabkan oleh tingginya partisipasi anak yang putus sekolah (DO) untuk melanjutkan sekolahnya melalui program pendidikan kesetaraan Paket A. Anak putus sekolah (DO) SD inilah yang menjadi sasaran pendidikan kesetaraan paket A.

3) DO- SMP dan Putus Lanjut SD

Jumlah putus sekolah (DO) SMP dan putus lanjut SD yang merupakan sasaran pendidikan kesetaraan paket B dari tahun 2014-2016, pada tahun 2014 jumlah DO-SMP dan putus lanjut SD sebanyak 85,000 orang, tahun 2015 sebanyak 405,939 orang, dan tahun 2016 sebanyak 466,613 orang. Angka DO SMP dan putus lanjut SD selama periode 2014-2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Peningkatan angka DO SMP dan DO SD ini disebabkan oleh tingginya jumlah anak lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang di atasnya. Anak pada usia ini lebih memilih untuk tidak sekolah karena membantu orang tua untuk bekerja mencari nafkah, hal ini disebabkan karena himpitan ekonomi keluarga. Selain itu ada sebagian lulusan SD yang melanjutkan ke MTs atau satuan pendidikan lainnya yang tidak terdeteksi oleh DAPODIK Kemdikbud. Anak DO SMP dan putus lanjut SD inilah yang menjadikan sasaran pendidikan kesetaraan paket B.

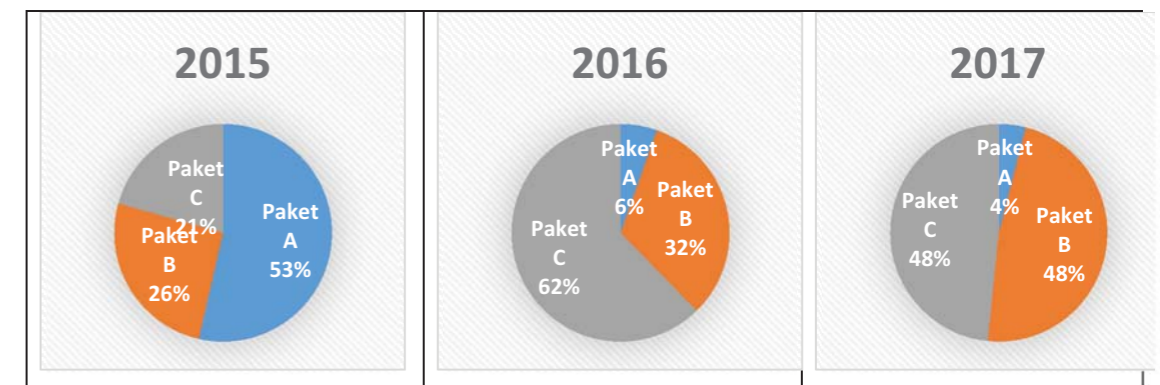
4) DO-SMA/SMK/MA dan Putus Lanjut SMP/MTs

Jumlah putus sekolah (DO) SMA/SMK/MA dan putus lanjut SMP/MTs dari tahun 2014-2016, pada tahun 2014 sebanyak 68,219 orang, dan tahun 2015 sebanyak 783,336 orang, serta tahun 2016 sebanyak 474,259 orang. Angka DO SMA/SMK/MA dan putus lanjut SMP/MTs selama periode 2014-2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya walau jumlah itu masih tinggi di bandingkan dengan tahun 2014/2015. Peningkatan angka SMA/SMK/MA dan putus lanjut SMP/MTs ini disebabkan oleh tingginya jumlah anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang di atasnya. Anak pada usia ini lebih memilih untuk tidak sekolah karena membantu orang tua untuk bekerja mencari nafkah, hal ini disebabkan karena himpitan ekonomi keluarga. Selain itu ada sebagian lulusan SMP yang melanjutkan ke MA atau satuan pendidikan lainnya yang tidak dapat terdeteksi oleh DAPODIK Kemdikbud. Anak SMA/SMK/MA dan putus lanjut SMP/MTs inilah yang menjadikan sasaran pendidikan kesetaraan paket C.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan ternyata anak yang putus sekolah lebih banyak disebabkan faktor ekonomi, kemudian diikuti secara berturut-turut faktor minat anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar yang minim, budaya, ketiadaan sekolah, dan kelainan jiwa/cacat. Tingginya biaya pendidikan menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (DO).

Data jumlah orang yang putus sekolah (DO) dan putus lanjut yang menjadi sasaran pendidikan kesetaraan selama tiga tahun terakhir (2015-2017), secara kumulatif dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8 Jumlah DO dan Putus Lanjut tahun 2015-2017



Total sasaran 2,202,208 orang

Secara kumulatif jumlah sasaran program paket B dan paket C lebih banyak terutama di 2 tahun terakhir yaitu 94,58% pada tahun 2016 dan 95,99% pada tahun 2017. Kondisi ini tentunya terkait dengan berbagai alasan yang telah disebutkan di atas. Beberapa hal yang tidak tampak adalah adanya kemungkinan lulusan SD dan lulusan SMP sebagian melanjutkan ke MTs dan MA. Data tersebut tentunya akan mengurangi jumlah sasaran program paket B dan paket C. kendatipun demikian, jika melihat jumlah putus sekolah (DO) yang cenderung konsisten dari tahun ke tahun, jumlah sasaran pendidikan kesetaraan khususnya untuk program paket B dan paket C masih tetap banyak.

b. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan merupakan suatu bentuk realisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu jalur pendidikan adalah pendidikan nonformal. Di samping itu pasal 26 ayat (6) tersebut menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

Pendidikan kesetaraan berfungsi menguatkan (*reinforcement*) kreativitas dan produktivitas yang telah menyatu dan berkembang pada diri setiap peserta didik melalui pembelajaran akademik yang dipadukan dengan pendidikan kecakapan hidup. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan perlu dikembangkan sejalan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat terutama mereka yang terkendala ke pendidikan formal komunitas seniman, anak pesantren, anak lapang, komunitas masyarakat yang bekerja dan bagi mereka yang telah usia dewasa ingin meningkatkan kompetensi dan klasifikasi pendidikannya.

1) Perkembangan Jumlah Penyelenggara

Pendidikan kesetaraan dilaksanakan oleh lembaga satuan pendidikan yang bernaung dalam pendidikan nonformal, misalnya PKBM, SKB, kelompok belajar atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

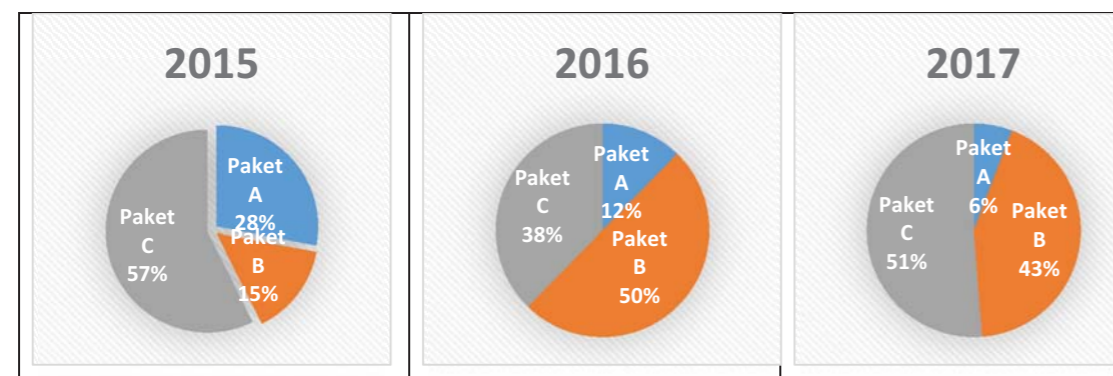
Berikut ini disajikan jumlah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan tahun 2015-2017.

Tabel 3.6 Perkembangan jumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Nama Program	Jumlah Penyelenggara		
	2015	2016	2017
Paket A	332	296	293
Paket B	175	1.202	2170
Paket C	681	906	2590

Perkembangan jumlah lembaga/Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan tiga tahun terakhir secara kumulatif adalah sebagai berikut:

Grafik 3.9 Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017 (dalam %)



Total penyelenggara 8645 lembaga

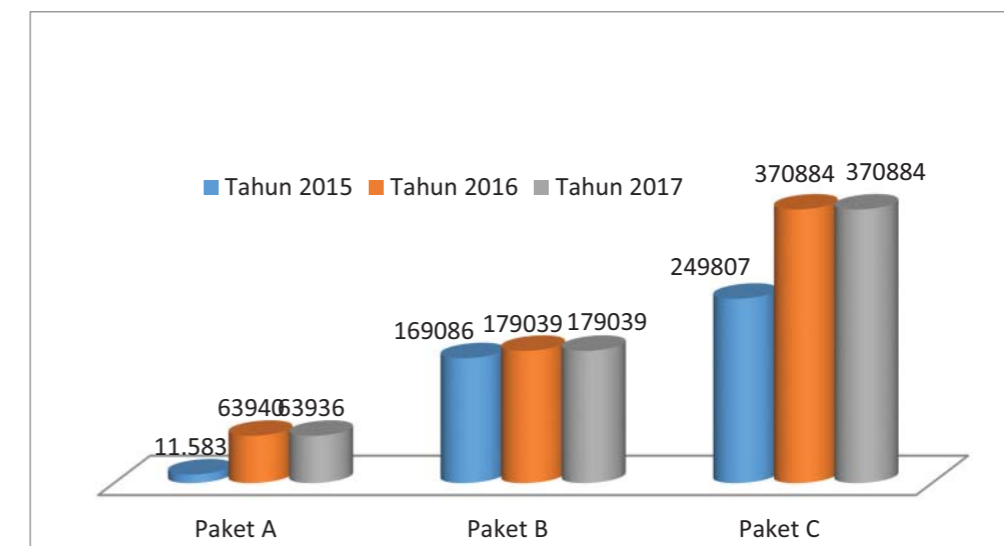
Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dinyatakan bahwa jumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan baik Program Paket A, B, dan C dari tahun 2015-2017 telah mengalami peningkatan terutama jumlah penyelenggara program Paket A, B, dan C. Penambahan jumlah lembaga tersebut tentunya bukan karena adanya bantuan biaya operasional yang disediakan pemerintah karena masih terbatas. Pembiayaan program tersebut lebih banyak melalui dana mandiri, peserta didik tetapi para pengelola program pendidikan kesetaraan lebih optimis untuk mengembangkan pendidikan kesetaraan karena sejak tahun 2015 dukungan peningkatan kualitas SPNF lebih jelas dengan adanya akreditasi. Hal lain sebagai faktor penyebabnya adalah meningkatnya peran masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan nonformal disertai meningkatnya perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. Selain itu sejak diberlakukannya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komputer (UNPK BK) kepada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) memiliki antusias untuk menerbitkan dan menandatangani ijazah pendidikan kesetaraan.

2) Jumlah Peserta Didik Program paket A, B, dan C

Perkembangan dan pesatnya pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam mengikuti program pendidikan kesetaraan sebagai peserta didik.

Untuk melihat perkembangan jumlah peserta didik, maka berikut ini ditampilkan jumlah peserta didik dalam kurun waktu 2015-2017.

Grafik 3.10 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2017



Sumber: data Bindiktara.

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015-2017, jumlah peserta didik paket A pada tahun 2015 sebanyak 11.583 orang dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 63.940.

Pada program paket B, jika tahun 2015 jumlah peserta didik sebanyak 169.086, dan pada tahun 2017 naik menjadi 179.039 atau naik sekitar 94,44%. Sedangkan program Paket C, pada tahun 2015 sebanyak 249.807 dan pada tahun 2017 sebanyak 370.884 atau naik sebanyak 67,35%.

Gambar 3.8. Data Peserta Didik dan Anggaran Afirmasi Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Paket A	666.390	465.600	1.242.570
	687 orang	480 orang	1.281 orang
Paket B	3.413.200	2.380.000	814.436
	2.438 orang	1.700 orang	2.320 orang
Paket C	28.616.100	2.312.000	7.072.000
	16.833 orang	1.360 orang	4.160 orang

Dari tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kecenderungan jumlah peserta didik dan jumlah dana untuk 3T Papua dan Papua Barat telah mengalami penurunan. Dalam 3 tahun terakhir alokasi anggaran dan jumlah sasaran peserta didik sebagai berikut:

- Paket A naik dari 687 orang menjadi 1.281
- Paket B turun dari 2.438 orang menjadi 1.700 orang, namun pada tahun 2017 naik lagi menjadi 2.320 orang
- Paket C turun dari 16.833 orang menjadi 4.160 orang

Alasannya sasaran paket A dan B di wilayah Papua dan Papua Barat menjadi prioritas untuk mendapatkan layanan pendidikan karena jumlah masih banyak dan tersebar di seluruh Kab/Kota, karena ada sebagian anggaran paket C dialihkan ke program paket A dan paket B.

Alokasi dana BOP pendidikan kesetaraan pada daerah khusus dan afirmasi Papua dan Papua Barat sama dengan daerah lainnya, tetapi untuk daerah 3T serta Papua dan Papua Barat dananya dialokasikan secara khusus dan tidak bias dialihkan ke propinsi lain.

2. Perkembangan Program Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan *Lifelong Learning for All* sebagai bagian dari program *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pendidikan berkelanjutan memiliki bidang garapan yang sangat luas, karena itu diperlukan harmonisasi program-program di bidang Pendidikan Berkelanjutan. Dimensi pendidikan berkelanjutan mewadahi program-program yang antara lain Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan berbagai pendidikan Vokasi. Dalam Konteks Pendidikan Berkelanjutan yang dimaksud lebih menekankan pada upaya peningkatan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, oleh karenanya yang menjadi lingkup dari program pendidikan berkelanjutan dimaksud meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Perempuan Marginal dan Pendidikan Vokasi Perempuan Marginal serta program Desa Vokasi. Berbagai

program tersebut di atas membawa misi penting dalam mengimplementasikan kesepakatan dunia tentang *Lifelong Learning for All* melalui upaya peningkatan kecakapan vokasional termasuk pendidikan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kreativitas, daya saing melalui pendidikan. Pemerintah juga menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan pelayanan pendidikan akan tetapi juga pemberian keterampilan yang dapat menunjang pendidikan yang dijalani. Dengan demikian setiap individu memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kesehariannya.

Adapun variasi program Pendidikan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Program Pendidikan Berkelanjutan

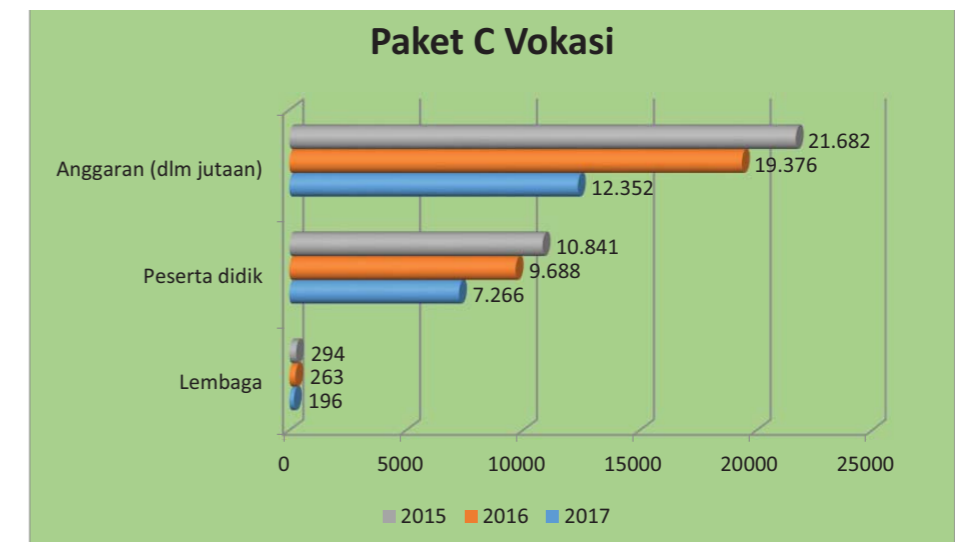
Tahun	Jumlah Lembaga Pelaksana			
	Vokasi Paket C	GP3M	Desa Vokasi	PKH-P
2015	294	-	-	248
2016	263	21	20	195
2017	196	31	33	113

a. Vokasi Paket C

Vokasi Paket C adalah program vokasi yang diberikan kepada peserta didik program paket c dalam bentuk keterampilan yang terstruktur yang bertujuan membekali peserta didik dengan satu kompetensi keterampilan tertentu. Dengan pendidikan vokasi yang diberikan ini, peserta didik diharapkan memiliki kecakapan hidup yang bermanfaat untuk dapat bekerja pada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) atau membuka usaha sendiri. Program Vokasi ini bertujuan untuk memberikan keterampilan terstruktur yang sesuai dengan pilihan peserta didik dengan diakhiri Uji Kompetensi yang diharapkan setelah lulus Paket C mereka memiliki sertifikat ganda yaitu Ijazah Pendidikan Kesetaraan dan Sertifikat Kompetensi.

Dalam perkembangannya, lembaga penyelenggara Vokasi Paket C mengalami penurunan selama 3 tahun pelaksanaannya. Dimana pada tahun 2015 sebanyak 294 lembaga pelaksana (PKBM dan SKB), mengalami penurunan menjadi 263 lembaga di tahun 2016 dan 196 lembaga di tahun 2017.

Grafik 3.12 Perkembangan Jumlah Lembaga Penyelenggara, Peserta Didik dan Alokasi Anggaran Vokasi Paket C Tahun 2015-2017



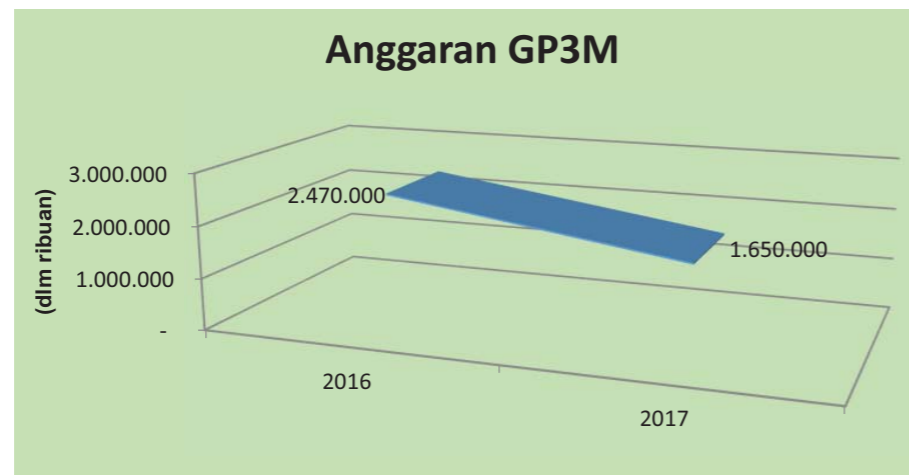
Selain itu, juga terdapat penurunan jumlah peserta didik dan alokasi anggaran program Vokasi Paket C. Peserta didik mengalami penurunan dari 10,841 di tahun 2015 menjadi 7,266 di tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena anak yang tadinya anak yang putus sekolah (DO) dan putus lanjut mereka sudah melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan. Selain itu pula disebabkan karena program Vokasi Paket C menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan anggaran untuk pendidikan kesetaraan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Program Vokasi Paket C mendapatkan anggaran sebesar Rp. 21,682 miliar di tahun 2015, kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp. 19,376 miliar dan di tahun 2017 sebesar 12,352 miliar. Penurunan ini salah satunya disebabkan karena berkurangnya jumlah peserta didik dan alokasi per peserta didik, yang semula Rp. 2 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 1,7 juta per peserta didik.

b. Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M)

Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M) merupakan kegiatan berupa sarasehan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih di Indonesia, serta untuk memotivasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan marginal yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi berikutnya.

GP3M yang baru dilaksanakan selama 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terpilih, mendapatkan bantuan anggaran yang bersumber dari APBN. Program GP3M juga mengalami penurunan alokasi anggaran dari Rp. 2,470 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 1,65 miliar pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena turunnya harga satuan dari Rp. 130 juta di tahun 2016 menjadi Rp. 50 juta per Kabupaten/Kota di tahun 2017.

Grafik 3.13 Alokasi Anggaran GP3M Tahun 2016-2017



Program GP3M mengalami perkembangan dengan meningkatnya jumlah provinsi yang melaksanakannya dari 17 provinsi di tahun 2016 meningkat menjadi 30 Provinsi di tahun 2017. Dari 17 provinsi penyelenggara GP3M di Tahun 2016, sebanyak 21 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan program ini. Sedangkan dari 30 provinsi di tahun 2017, sebanyak 31 lokasi pelaksanaan GP3M oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selain itu, lokasi penyelenggaraan GP3M terdapat beberapa Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk satu provinsi. Tahun 2017 lokasi penyelenggara program ini lebih luas lagi jangkauannya,

dimana diharapkan bahwa program GP3M ini dapat menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia secara merata.

c. Desa Vokasi

Desa Vokasi sebagai salah satu program baru yang di Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengalami peningkatan dilihat dari jumlah penyelenggaranya. Desa Vokasi dilaksanakan hampir di semua provinsi di Indonesia, kecuali Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2016, sebanyak 20 lembaga yang menyelenggarakan program Desa Vokasi. Tahun 2017, meningkat menjadi sebanyak 35 lembaga penyelenggara. Dengan demikian, jumlah lembaga penyelenggara mengalami peningkatan sebanyak 1.75%.

Anggaran program desa vokasi mengalami peningkatan dari Rp. 3,2 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 3,5 miliar di tahun 2017. Peningkatan ini dikarenakan jumlah lembaga penyelenggara desa vokasi yang bertambah. Dari 20 lembaga pada tahun 2016 menjadi 35 pada tahun 2017, walaupun dari segi anggaran mengalami penurunan dari Rp. 160 juta per lembaga pada tahun 2016 menjadi Rp. 100 juta per lembaga pada tahun 2017.

Grafik 3.14 Jumlah Penyelenggara dan Anggaran Desa Vokasi Tahun 2016-2017



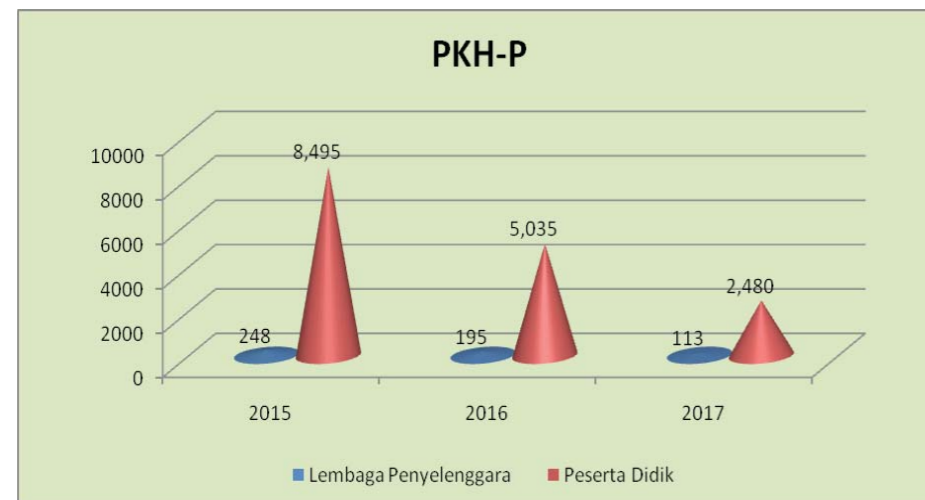
Program Desa Vokasi mengalami perkembangan dilihat dari jumlah lembaga penyelenggara dan alokasi anggaran yang mengalami peningkatan. Selain itu juga dapat dilihat dari banyaknya ragam vokasi yang menjadi pilihan pengembangan program Desa Vokasi ini. Hasil dari program Desa Vokasi ini juga dapat dilihat dari beberapa unit usaha mandiri hasil binaan lembaga penyelenggara program Desa Vokasi ini.

d. Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P)

Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P) merupakan program pemberdayaan perempuan marginal yang membekali mereka dengan keterampilan agar dapat hidup mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini merupakan salah satu primadona di Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengalami penurunan dilihat dari jumlah lembaga penyelenggaranya dan peserta didiknya. Pada tahun 2015, sebanyak 248 lembaga penyelenggara program PKH-P dengan jumlah peserta didik sebanyak 8.495, 195 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 5.035 di tahun 2016 dan 113 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 2.480 di tahun 2017. Dengan demikian, jumlah lembaga penyelenggara PKH-P sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan sebesar 0.45%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah anggaran secara simultan untuk program pendidikan kesetaraan.

Sedangkan untuk program PKH-P mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.495 miliar di tahun 2015 untuk kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 5.035 miliar dan di tahun 2017 sebesar Rp. 2.480 miliar. Penurunan ini juga dikarenakan berkurangnya alokasi peserta didik PKH-P walaupun untuk harga satuan tetap, yaitu Rp. 1 juta per peserta didik.

Grafik 3.15 Lembaga Penyelenggara PKH-P Tahun 2015-2017



*sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dit. Bindiktara

Dalam pelaksanaannya, jenis-jenis keterampilan yang telah diselenggarakan di Desa Vokasi dan program PKH-P sejak tahun 2015 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Produk yang dihasilkan dari Penyelenggaraan Desa Vokasi dan PKH-P

No.	Jenis Produk yang telah dihasilkan
1.	Sulaman karawo, membuat kue, menjahit
2.	Ikan asam cair, abon ikan
3.	Aneka kerajinan lontar, Dodol Bali sari
4.	Bordir, Sulaman suji
5.	menjahit tas souvenir, menjahit busana muslim, tata boga/pembuatan kue, ambo ternak dan aplikasi pakan ternak, budidaya jamur
6.	Bidaran ikan tuna, abon ikan tuna, pentol tuna, semppol tuna, krupuk, molen pisang
7.	Cinderamata/souvenir, Kambing, Aneka boga, Bubuk kopi
8.	Tata boga, pertukangan.meubel, holtikutura
9.	Dodol amboo, dodol pisang, bika gedong, keripik pisang, dodol melinjo, steak melinjo, handicraft dari batok kelapa
10.	Lembaran bahan baju/jas, sarung, Selendeng, Pasima
11.	Batik tulis
12.	Makanan olahan/kripik, tenun songket, tes kreatif, barang dari koran
13.	Aneka ikan kering (asin+tawar), rempeyek ikan teri, rempeyek udang rebon, kripik ikan beledong
14.	Anyaman amboo, susu kedelai, bros, Baju/kaos, ternak kambing
15.	Sayuran pak coy, sayuran kol, sayuran2an

Sedangkan untuk alokasi anggaran yang diberikan, baik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, peserta, maupun lembaga pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat. Dana bantuan untuk penyelenggaraan program Pendidikan Berkelanjutan (GP3M, Desa Vokasi, dan PKH-P) yang diberikan ini diperuntukkan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan Direktorat Diktara.

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah pada Program Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

Dalam upaya untuk memastikan pengelolaan program pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan, maka harus dipetakan masalah dan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut ini adalah permasalahan dan upaya pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Pendidikan kesetaraan

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapatnya tempat pembelajaran yang terletak jauh dari rumah peserta didik
- 2) Masih rendahnya kompetensi tutor pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan
- 3) Dalam hal pembelajaran, masih adanya tutor yang belum memiliki modul/silabus pembelajaran serta RPP
- 4) Lembaga penyelenggara program masih kurang menguasai Juknis penyelenggaraan program
- 5) Masih kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan sebagai pembina program dengan lembaga penyelenggara program
- 6) Lemahnya pemahaman lembaga terhadap juknis penyelenggaraan program
- 7) Kurangnya jumlah tutor pembelajaran di lembaga penyelenggara.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka beberapa upaya pemecahannya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan tempat pembelajaran yang tidak jauh dari sasaran peserta didik, yang juga bisa dilakukan dengan meminjam Balai Pertemuan kelurahan atau sekolah.
- 2) Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas tutor pendidikan kesetaraan.
- 3) Pihak pengelola untuk sering melakukan pengawasan khususnya dalam perangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh tutor seperti modul/silabus pembelajaran serta RPP.
- 4) Pendampingan yang intens oleh direktorat dalam hal ini subdit teknis, BP PAUD dan Dikmas, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk dalam hal penguasaan juknis penyelenggaraan program.
- 5) Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan sebagai pembina program dengan lembaga penyelenggara program agar penyelenggaraan program berjalan dengan baik.
- 6) Mengadakan pengangkatan tutor kontrak agar jumlah tutor dapat memadai.

b. Pendidikan Berkelanjutan

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada program vokasi, masih adanya produk yang dihasilkan tidak mencirikan pengembangan produk unggulan yang berbasis kearifan lokal
- 2) Program kegiatan vokasional yang tidak mencirikan kegiatan vokasional (keterampilan) di masyarakat.
- 3) Sulitnya pemasaran hasil-hasil kerajinan vokasional
- 4) Lemahnya dukungan pemerintah desa/kelurahan pada program vokasi di masyarakat.
- 5) Pelaksanaan GP3M masih terkesan seremonial dan belum adanya rencana aksi pengembangan GP3M tersebut

- 6) Rendahnya kompetensi lembaga penyelenggara program pendidikan berkelanjutan
- 7) Masih kurangnya sharing dana dari APBD bahkan tidak ada
- 8) Kurangnya koordinasi antara pihak dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai pembina program pusat dengan lembaga penyelenggara program.

Dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan di atas, maka beberapa upaya pemecahannya penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan proposal pengajuan bantuan kegiatan vokasi harus sesuai dengan produk unggulan yang berbasis kearifan lokal dan sesuai dengan kegiatan vokasi (keterampilan)
- 2) Melakukan koordinasi dan bekerja dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemasaran hasil-hasil kerajinan vokasional
- 3) Bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan pada program vokasi di masyarakat dan memasukan program-program dari pendidikan berkelanjutan masuk dalam program yang didanai oleh pemerintah desa/kelurahan.
- 4) Pelaksanaan GP3M tidak seremonial lagi dengan mengupayakan adanya rencana aksi oleh pemerintah daerah sebagai pengembangan GP3M tersebut
- 5) Pelatihan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara program pendidikan berkelanjutan
- 6) Mengupayakan sharing dana dari APBD Kab/kota dan dana desa.
- 7) Melakukan koordinasi antara pihak dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai pembina program pusat dengan lembaga penyelenggara program.

4. Contoh Kisah Sukses dan Praktik Baik Pengelolaan Program Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan

a. Arie S. Binanggal

SUKSES BERKAT PAKET B DAN PAKET C

Pendidikan kesetaraan adalah hal yang luar biasa ketika Arie S. Binanggal, biasa disebut Arie oleh rekan-rekannya memasuki Kepolisian Nasional, pelindung masyarakat yang mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C.

Arie tidak malu memiliki ijazah Paket B dan Paket C setara dengan pendidikan formal dan Kepolisian pun mengakui legalitasnya. "Awalnya saya adalah polisi tingkat satu dengan ijazah SD, dan kemudian melanjutkan ke SMP namun saya berhenti, jadi saya mengikuti Paket B di Manado pada tahun 1987 untuk meningkatkan karir saya di Kepolisian Nasional".

Berkat pendidikan kesetaraan, dia dapat kembali ke sekolah tanpa memikirkan sulitnya berbagi antara waktu dan belajar. "Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi kami," tutur Arie.

Pria dengan 30 tahun pengalaman di kepolisian ini ingin meningkatkan jabatannya dari Bintara menjadi Perwira. Hal ini memotivasinya untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

Arie tanpa ragu-ragu menceritakan pengalamannya mengikuti Paket C, "Saya mendaftar sebagai peserta didik Paket C pada tahun 2009, mengikuti ujian di bulan Juli. Saya tidak lulus satu mata pelajaran karena saya sedang bertugas jadi saya tidak bolos lima kali dan pada bulan November saya lulus." ujarnya dengan nyaring. Dia menambahkan, "Tidak ada penolakan penggunaan Paket C untuk promosi jabatan. Merupakan kebanggaan dipromosikan sebagai Perwira untuk anggota Polisi. Hanya Paket C ini yang bisa membantu."

Dia berharap pemerintah, "agar melanjutkan program ini, sebab masih banyak orang-orang yang memerlukan program Kesetaraan." Dia menambahkan "Saya bertugas di daerah dan akan selalu mensosialisasikan program pendidikan kesetaraan ini, karena banyak orang-orang yang putus sekolah dan saya ingin memotivasi mereka bahwa walaupun sudah menjadi polisi saya masih ingin bersekolah."

Kesuksesan bukanlah sesuatu yang harus disimpan sendiri. Kita dapat berbagi dengan memotivasi orang lain dalam membuat keputusan terhadap hidup mereka. Sebagaimana Arie katakan, bahwa sebagai polisi pun dia masih ingin bersekolah, apapun pendidikan yang dipegangnya dan masyarakat tidak akan memandang rendah pendidikan kesetaraan karena pemerintah mengakuinya setara dengan pendidikan formal

b. PKBM Cemerlang: Vokasi "Buah Carica" Bernilai Tinggi

VOKASI "BUAH CARICA" BERNILAI TINGGI

PKBM Cemerlang yang didirikan dan dipimpin Anna Wardiyati SE sejak 2010, terus melakukan berbagai upaya dalam membantu memberikan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang kurang mampu di daerah Wonosobo Pegunungan Dieng.

Anna Wardiyati memiliki harapan atau cita-cita untuk membangun semangat masyarakat sekitarnya untuk maju terutama dalam kegiatan kewirausahaan. Anna melibatkan sebagian besar perempuan-perempuan yang termarginalkan, yaitu diantaranya para janda, perempuan pengangguran, perempuan putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga dari keluarga tidak mampu untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan uang sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan PKBM dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang terlibat.

Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan adalah memproduksi minuman buah Carica dengan brand Carica Cemerlang. Bahan baku minuman ini berasal dari buah Carica, yang merupakan buah dari rumpun pepaya kerdil yang pohonnya hanya dapat tumbuh dan berbuah di dataran tinggi saja, yang memiliki ketinggian antara 1500 sampai dengan 3000 dpl. Buah Carica ini selain tumbuh liar di Dataran Tinggi Dieng, dan merupakan buah yang berlimpah dan ketersediaannya setiap saat ada, namun juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan arginin, yang dapat menghambat tumbuhnya sel kanker dalam tubuh.

"Kami menginginkan masyarakat di daerah ini dapat memiliki pendidikan yang tinggi, dan mampu memberdayakan potensi lingkungannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga." Kata Anna.

Tahun 2011 merupakan tonggak pendidikan keterampilan peserta didik dengan keterampilan membuat manisan carica. Sejak itu peserta didik dan lembaga sepakat mendirikan Kelompok Usaha Produktif (KUP) sebagai wadah untuk memberdayakan kemampuan ekonomi peserta. KUP didirikan untuk menampung kemandirian peserta, selain sesuai dengan kebijakan Direktorat, program ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Perlahan tapi pasti, pendidikan keterampilan boga ini berjalan, dengan kesungguhan dan kebersamaan manisan buah carica dibuat, dikemas dan dipasarkan.

Dengan meningkatkan peran masyarakat setempat, PKBM Cemerlang mengelola produksi dari hulu hingga hilir, melibatkan banyak pihak, antara lain para petani pemasok bahan baku buah Carica, hingga packing produknya. Saat ini Carica Cemerlang rutin memproduksi minimal 200kg/2 kwintal setiap harinya, beromzet Rp 65 juta hingga Rp 80an juta setiap bulannya, yang dipasarkan baik melalui penjualan secara online, penjualan langsung di outlet-outlet cabang Carica Cemerlang, dan penjualan melalui kerjasama kemitraan dengan ritel-ritel modern sebagai pemasok/suplier diantaranya yaitu bermitra dengan PT Indomarco Prismatama Tbk (Indomaret), PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir), Carefour, PT Lion Superindo (Superindo) dan berbagai peritel, supermarket maupun swalayan lainnya.

PKBM Cemerlang telah berhasil melatih ratusan peserta didik yang berlatih keterampilan dan mereka mengelola KUP dan mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp.15.000,- per proses produksi selama 3 hari. Manisan karya PKBM Cemerlang telah mendapatkan ijin Dinkes IRT No: 1.13.33.07.03.946 dan sertifikat halal dari MUI No. 1512006390812.

Menurut Anna, kunci sukses PKBM Cemerlang dalam melaksanakan pendidikan keterampilan ini adalah niat tulus, kesungguhan, kerja keras, keyakinan dan inovasi yang kreatif, memperkuat kebersamaan dengan seluruh pengelola dan peserta didik serta membangun kerjasama dengan banyak pihak.

C. Perkembangan Mutu Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bagi masyarakat akan bertumpu pada dua aspek yaitu pemerataan dan mutu. Pada aspek pemerataan, keterjangkauan program di setiap daerah menjadi prioritas, dimana semua wilayah dapat mengakses dengan baik layanan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Data menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota sudah mengakses dan melaksanakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan mulai Program Paket A, setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMP. Daerah-daerah khusus yang belum mendapatkan layanan ini karena secara geografis dan fasilitas serta sumber daya manusianya belum mendukung, sehingga harus bergerak ke wilayah-wilayah terdekat yang sudah melaksanakan.

Tantangan utama saat ini ketika semua program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dilakukan di kabupaten/kota seluruh Indonesia adalah pada persoalan mutu layanan. Persoalan mutu ini

menjadi prioritas Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Penataan kelembagaan Program Keaksaraan dan Kesetaraan melalui PKBM, SKB dan Satuan Pendidikan Sejenis merupakan langkah menuju layanan yang lebih bermutu. Upaya peningkatan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bermutu dilakukan melalui penguatan system pendataan kelembagaan melalui pendataan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk lembaga pendidikan nonformal dan percepatan program akreditasi lembaga SPNF (Satuan Pendidikan Nonformal) melalui Gerakan Akreditasi PKBM Nasional.

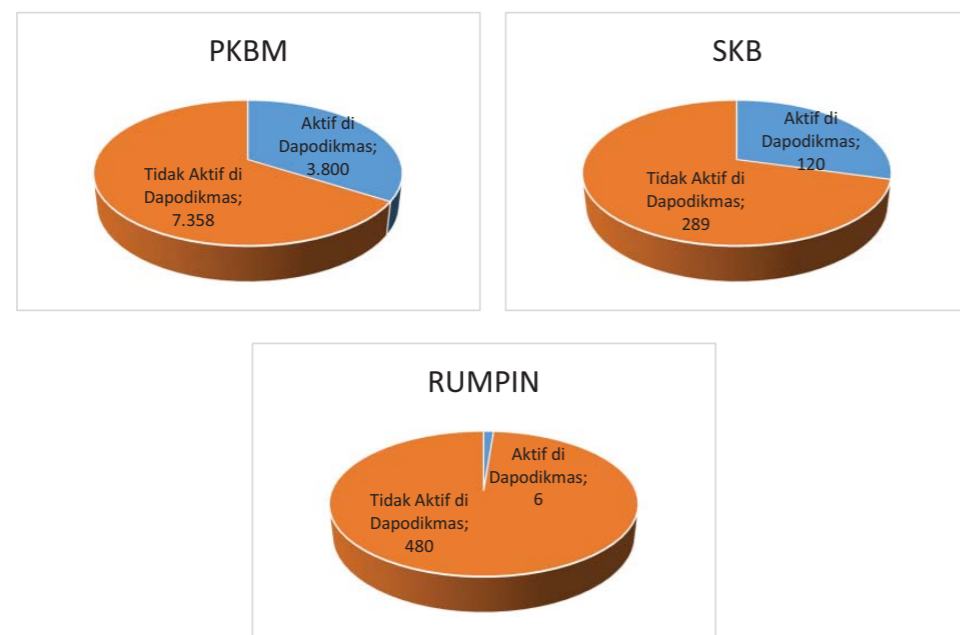
Berikut adalah gambaran capaian peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan selama 2015 sampai dengan 2017.

1. Jumlah SPNF (SKB dan PKBM)

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) terus ditata agar menjadi satuan pendidikan nonformal yang profesional dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Selama periode 2015-2017 PKBM dan SKB yang telah menjadi SPNF mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kecenderungan peningkatan mutu SPNF yang dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui aktifitas yang dilakukan oleh SPNF baik itu PKBM, SKB, Rumah Pintar atau lembaga nonformal lainnya. Salah satu metode untuk memantau kinerja SPNF dilakukan melalui indikator *updating* kegiatan dan kelembagaan secara online melalui laman data pokok pendidikan (dapodik) Dikmas.

Berdasarkan data di Dapodik sampai dengan November 2017, lembaga SPNF yang aktif melakukan *updating* data kelembagaan adalah 3.800 lembaga PKBM, dan yang tidak melakukan *updating* sebanyak 7.358 lembaga. Lembaga SKB yang melakukan *updating* kelembagaan dan programnya sebanyak 120 lembaga dan yang tidak *updating* sebanyak 289 lembaga. Kecenderungan paling rendah terjadi di lembaga Rumah Pintar (rumpin) dimana lembaga yang mengupdate di Dapodikmas sebanyak 6 lembaga sedangkan yang tidak melakukan *updating* sebanyak 480 lembaga.

Grafik 3.16 Keaktifan Lembaga dalam Dapodik PAUD dan Dikmas Nov. 2017



Khusus mengenai rumah pintar memang masih masih dalam pembahasan, karena penginputan data dapodikmas untuk Rumpin masih menggunakan instrument yang digunakan untuk PKBM, belum ada instrument khusus untuk Rumpin, sehingga Nomor Pokok Sekolah/Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) Rumpin masih menginduk ke PKBM. Hal inilah yang menyebabkan rumpin masih sedikit sekali yang melakukan *updating* data di Dapodikmas.

Kecenderungan yang menarik adalah kebijakan mengenai SKB yang terus didorong menjadi SPNF dengan membangun kesepahaman antara Kemdikbud dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, sehingga keberadaan SKB benar-benar menjadi lembaga yang berperan aktif dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

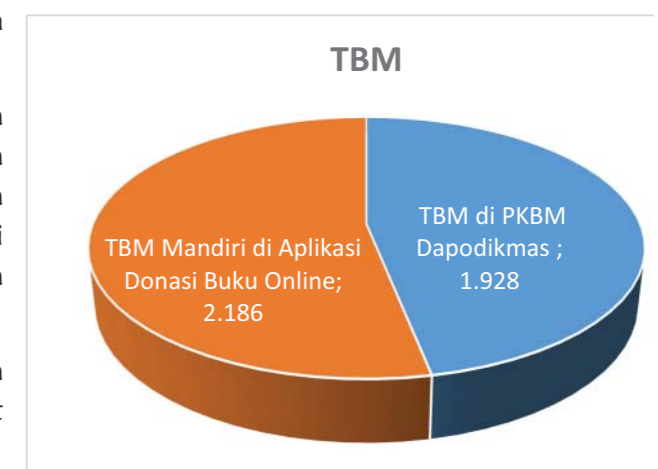
Berdasarkan sebaran setiap provinsi maka provinsi yang mempunyai seluruh SKB-nya sudah SPNF (100%) yaitu Provinsi Lampung, Jogjakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku. Sedangkan Provinsi dengan SKB SPNF terendah yaitu Banten dan DKI Jakarta dimana belum ada satupun SKB nya yang sudah SPNF atau (0%).

2. Jumlah PKBM dan SKB yang memiliki Layanan TBM

Peningkatan minat baca masyarakat melalui pendidikan nonformal dilakukan dengan mendirikan dan membuka layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Layanan peningkatan minat baca melalui TBM lebih difokuskan pada komunitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Ragam kegiatan TBM mulai dari belajar baca tulis hitung atau belajar keaksaraan dasar, serta meningkatkan kemampuan membaca untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti buku-buku keterampilan, kesehatan dan keagamaan.

TBM dapat dikategorikan menjadi dua, TBM yang mandiri yang tidak menginduk pada lembaga lain seperti PKBM, SKB atau lainnya, dan TBM yang menginduk di PKBM/lainnya. Sesuai dengan gambar 3.2. diketahui bahwa TBM mandiri sebanyak 2.186 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan TBM yang layanannya berada di PKBM sebanyak 1.928 unit.

Gambar 3.17 Layanan TBM Mandiri dan Layanan TBM di PKBM November 2017



Berdasarkan gambar di atas maka layanan TBM mandiri memiliki kecenderungan lebih tinggi dibanding dengan layanan TBM yang berada di PKBM. Hal ini menunjukkan terikat oleh layanan pendidikan nonformal lainnya.

Secara umum kendala atau tantangan dalam peningkatan minat baca masyarakat melalui layanan TBM diantaranya:

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ruang baca dan ruang penyimpanan bahan bacaan dan media baca lainnya yang representative masih terhitung sangat sedikit dalam layanan TBM. Masih banyak ruang baca menginduk pada salah satu ruang pada sebagian gedung atau rumah yang terkadang juga digunakan untuk aktifitas lainnya.

b. Kualitas dan Inovasi layanan

Bahan bacaan yang ada di TBM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keingintahuan masyarakat terhadap bahan bacaan yang diharapkan. Bahan bacaan yang ada terkadang sudah sangat lama sehingga kondisinya sudah kurang baik. Tantangan ketersediaan bahan bacaan juga terjadi karena belum adanya program penambahan bahan bacaan secara periodic, sehingga bahan bacaan setiap tahunnya belum terupdate dengan baik.

Upaya meningkatkan minat baca masyarakat harus diawali dari layanan yang baik dari penyedia program TBM. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang tepat tentang mengapa mereka harus memiliki budaya baca yang baik. Kedua mereka harus mendapatkan layanan baik ketika berada di fasilitas TBM, sehingga bentuk layanan yang berkualitas secara moral akan memotivasi masyarakat untuk datang kembali ke TBM-TBM yang ada.

Program inovasi layanan TBM juga perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat secara geografis, social dan budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Contoh praktek baik inovasi layanan TBM sudah dipraktekan oleh banyak lembaga namun penyebaran informasinya masih perlu ditingkatkan.

c. Keterkaitan budaya baca dengan kehidupan

Membaca adalah memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip ini yang harus ada dalam penyediaan jasa TBM. Keterkaitan antara bahan bacaan yang disediakan dengan kebutuhan masyarakat setempat harus dipetakan dengan sebaik-baiknya. Jika masyarakat merasa bahwa pekerjaan atau kehidupan kesehariannya sangat terbantu dengan membaca bahan bacaan yang ada di TBM maka TBM tersebut sudah melakukan program yang tepat yaitu dengan memenuhi keingintahuan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya melalui bahan bacaan yang ada di TBM.

d. Apresiasi

Pemberian apresiasi terhadap para pelaku dan penyedia jasa layanan TBM memang masih minim, sehingga perlu ditingkatkan. Pemberian apresiasi juga perlu diperluas dengan memberikan apresiasi kepada warga pembelajar melalui layanan TBM, dengan kesuksesan atau peningkatan taraf hidupnya menjadi lebih baik karena memiliki budaya baca yang baik di masyarakat.

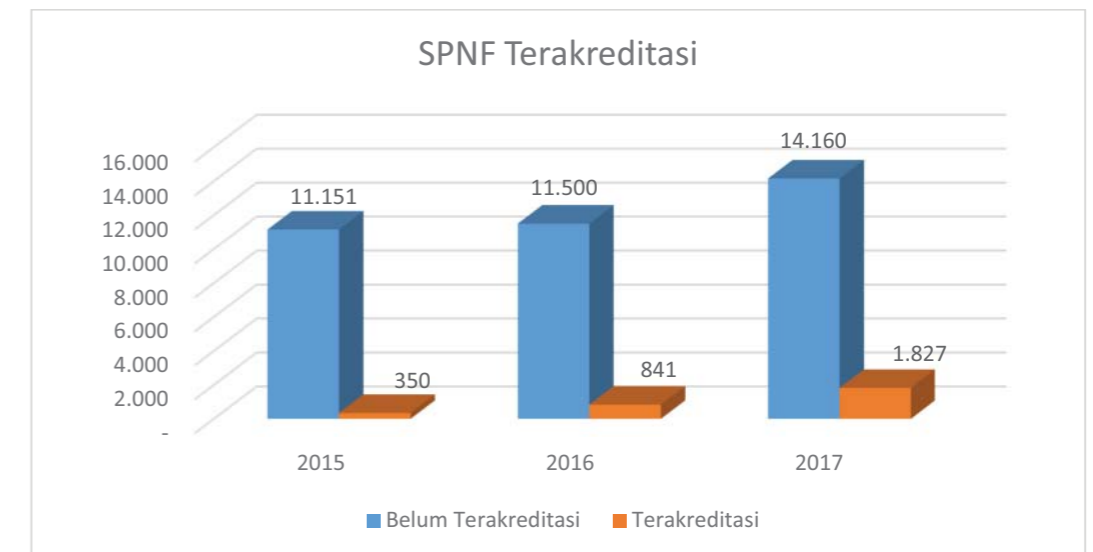
Apresiasi tertinggi bagi pegiat literasi yang sekaligus pengelola TBM adalah bahwa 38 orang pegiat literasi diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo untuk menerima penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah ikut menjalankan literasi masyarakat dengan berbagai cara yang unik.

3. Jumlah SPNF (SKB dan PKBM) yang Terakreditasi

Akreditasi sebagai media penilaian kelayakan program dan satuan PNF merupakan salah satu proses penting dalam penjaminan mutu pendidikan. Pelaksanaan akreditasi SPNF dilakukan secara obyektif, adil dan transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik PNF. Syarat utama lembaga pendidikan nonformal mengikuti akreditasi yaitu sudah operasional selama dua tahun, jumlah murid minimal 20 siswa, mendapatkan ijin operasional dari dinas pendidikan, memiliki sarana dan prasarana yang jelas, memiliki kurikulum pembelajaran yang dilakukan serta syarat lainnya.

Perkembangan PKBM yang terakreditasi sampai tahun 2017 mengalami trend yang cukup menarik. Walaupun dilihat secara prosentase masih sangat kecil, namun dari segi jumlah dengan waktu yang sangat singkat perkembangannya sangat signifikan yaitu pada tahun 2015 dari total lembaga SPNF sebanyak 11.151 lembaga yang sudah terakreditasi sebanyak 841 lembaga. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 1.734 lembaga, dan pada tahun 2017 sebanyak 1.827 lembaga dari total lembaga yang terdata sebanyak 14.160 lembaga yakni sebesar 12.9%. perkembangan data SPNF yang terakreditasi dapat dilihat pada gambar 3.3. berikut.

Gambar 3.18 SPNF Terakreditasi BAN PNF Tahun 2017



Jika kita cermati data di atas terjadi kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan perubahan SPNF yang terakreditasi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Berdasarkan hasil analisa program yang dilakukan bahwa pada tahun 2016 diadakan beberapa program diantaranya Bimbingan Teknis Akreditasi yang dilakukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, koordinasi dengan BAN PNF, pengembangan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) di 34 Provinsi, pengembangan pokja akreditasi di kab/kota, Bimtek/pendampingan/pemetaan mutu dan supervisi di Balai/Pusat Pengembangan PAUD & Dikmas.

4. Ujian Pendidikan Kesetaraan

Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C dilaksanakan dengan mengikuti standar nasional pendidikan yang berlaku. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam Pendidikan Kesetaraan mencakup standar isi, standar proses, standar mutu lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Dalam mengukur ketercapaian mutu layanan pendidikan kesetaraan maka diadakan penilaian. Penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL) yaitu melalui Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan atau sering disebut dengan UNPK. Sesuai dengan peraturan pemerintah, maka UNPK dilakukan untuk program kesetaraan paket B dan paket C, sedangkan untuk ujian pendidikan kesetaraan Paket A diadakan pada satuan pendidikan masing-masing.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemdikbud sesuai dengan tabel 3.4 tergambar bahwa jumlah lembaga yang menyelenggarakan UNPK Paket B dan Paket C terjadi secara fluktuatif.

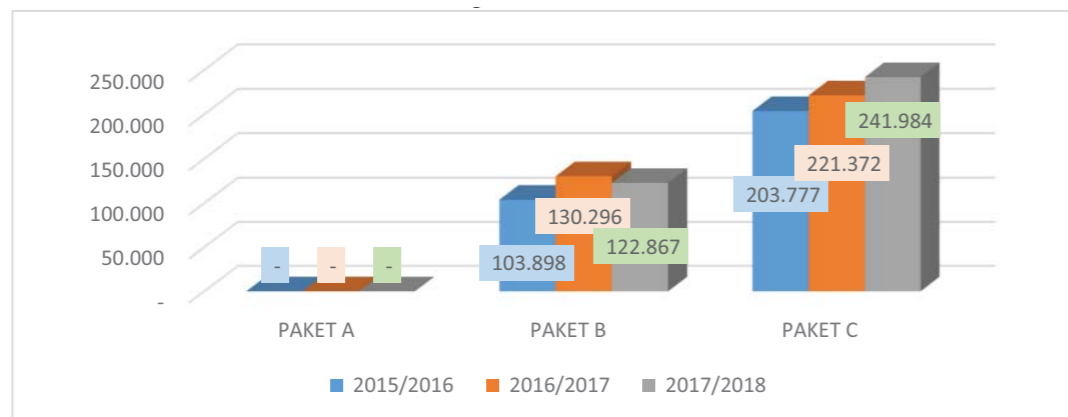
Tabel 3.13 Lembaga Penyelenggara dan Peserta UNPK Tahun 2015-2017

Tahun	Paket B		Paket C		Jumlah Lembaga	JumlahPD
	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta		
2015 (UNKP)	5.446	103.898	7.080	203.777	12.526	307.675
2016 (UNKP)	5.571	130.296	5.722	221.372	11.293	351.668
2017 (UNKP-Gel 1)	702	14.871	3.633	170.890		
2017 (UNBK-Gel 1)	3.810	91.772	931	32.383		
2017 (UNBK-Gel 2)	1.406	16.224	1.642	38.711		
2017 (UNKP & UNBK Gel 1 dan 2)	5.918	122.867	6.206	241.984	12.125	364.851

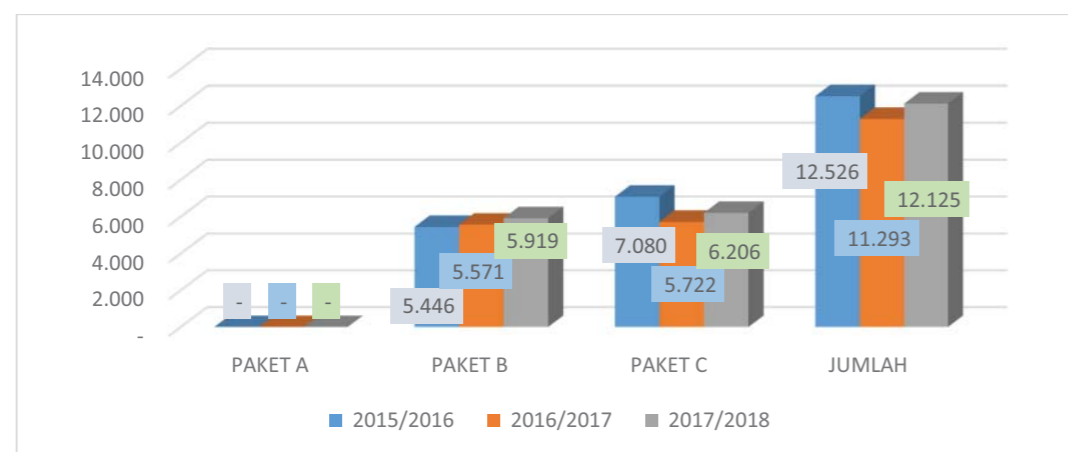
Sumber: Puspendik Nov 2017

Data perkembangan peserta UNPK tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.19 Perkembangan Peserta UNPK Tahun 2015-2017



Grafik 3.20 Perkembangan Lembaga Penyelenggara UNPK Tahun 2015-2017



Kedua grafik tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah Lembaga dan Peserta Ujian Paket A

Jumlah lembaga penyelenggara dan jumlah peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A tidak dicantumkan karena ujian dilakukan ditingkat satuan pendidikan.

b. Jumlah Lembaga, Peserta dan Lulusan UN Paket B

Perkembangan jumlah lembaga penyelenggara yang mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket B dari tahun 2015 s.d 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah lembaga yang menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket B berjumlah **5.446** lembaga, tahun 2016 **5.571** Lembaga dan tahun 2017 **5.919** lembaga. Sedangkan peserta yang mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket B pada tahun 2015 berjumlah **103.898** peserta, tahun 2016 **130.296** peserta dan tahun 2017 **122.867** peserta (untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 3.7 dan 3.8).

c. Jumlah Lembaga, Peserta dan Lulusan UN Paket C

Perkembangan jumlah peserta yang mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C dari tahun 2015 s.d 2017 mengalami peningkatan. Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C pada tahun 2015 berjumlah **203.777** peserta, tahun 2016 **221.372** peserta dan tahun 2017 **241.984** peserta. Sedangkan jumlah lembaga yang menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2015 berjumlah **7.080** lembaga, tahun 2016 **5.722** Lembaga dan tahun 2017 **6.206** lembaga (untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 3.7 dan 3.8).

d. Jumlah Lembaga dan Peserta UNPK-BK

Bahwa dalam meningkatkan mutu penilaian oleh Pemerintah dan satuan pendidikan serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional, pemerintah melakukan beberapa pembaharuan diantaranya pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas ujian (Sumber : POS UN TH 2017 Hal 34 - Peraturan BSNP).

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

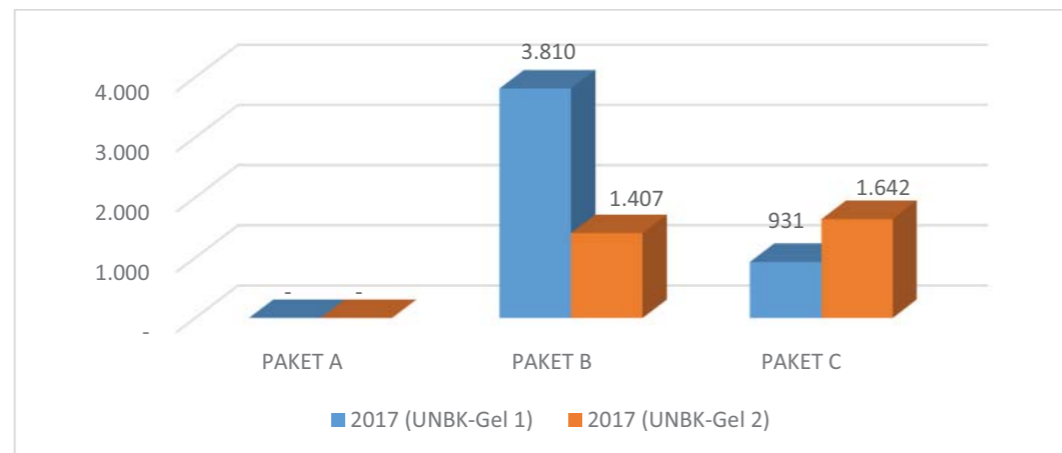
Pada tahun 2014 Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri. Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 4382 sekolah yang terdiri dari 984 SMP/MTs, 1298 SMA/MA, dan 2100 SMK. Sumber: (<https://ubk.kemdikbud.go.id/tentang>).

Pada tahun 2017 baru pertama kali dilaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan - Berbasis Komputer (UNPK-BK), pada tahun 2017 diadakan 2 gelombang penyelenggaraan UNPK, pada gelombang ke I lembaga penyelenggara yang melaksanakan UNPK-BK sebagian lembaga dan pada gelombang/tahap II semuanya berbasis komputer (UNPK-BK).

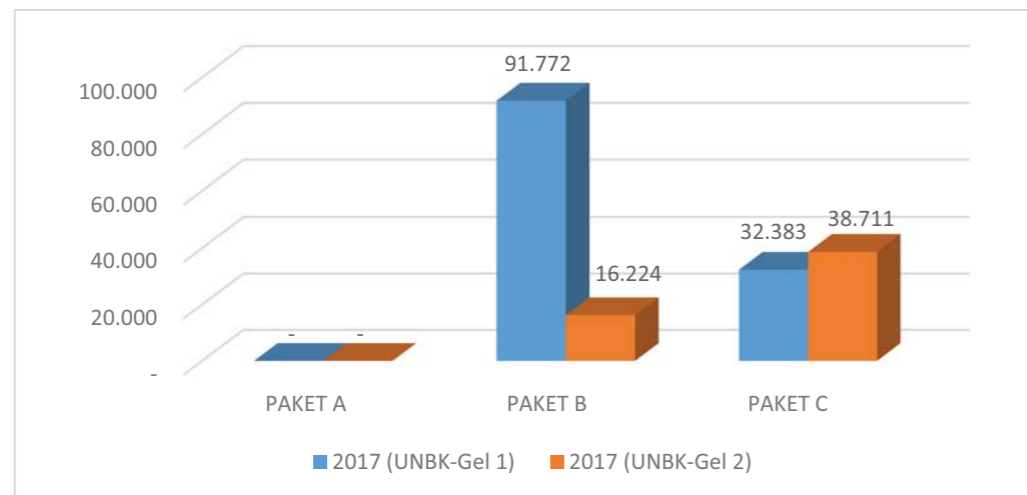
Tabel 3.14 Lembaga Penyelenggara UNPK-BK Tahun 2017

Tahun	Paket A		Paket B		Paket C	
	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta
2017 (UNBK-Gel 1)	NON UN	3.810	91.772	931	32.383	
2017 (UNBK-Gel2)	NON UN	1.407	16.224	1.642	38.711	

Grafik 3.21 Lembaga Penyelenggara UNPK-BK Tahun 2017



Grafik 3.22 Peserta UNPK-BK Tahun 2017



Jumlah seluruh lembaga yang menyelenggarakan UNPK-BK Gelombang I dan II pada tahun 2017 berjumlah 5.217 lembaga untuk Paket B dan 2.573 lembaga untuk Paket C (dapat dilihat pada tabel 3.9). Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti UNPK-BK Gelombang I dan II pada tahun 2017 berjumlah 107.996 peserta Paket B dan 71.094 peserta Paket C (dapat dilihat pada tabel 3.9).

5. Kendala/Permasalahan UNPK-BK

Terkait penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017 baik satuan pendidikan formal maupun nonformal semuanya diatur pada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2017.

Di dalam peraturan ini salah satunya pada BAB V menjelaskan tentang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terdiri dari Penyiapan Sistem UNBK, Penetapan Tim Teknis UNBK, Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK, Kriteria dan Persyaratan, Penetapan Proktor dan Teknisi, dan Pengawas UNBK, Pelatihan Teknis Pelaksanaan UNBK, Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK, Prosedur Pelaksanaan UNBK, Jadwal Kegiatan Pra UNBK dan Jadwal UNBK.

Dalam pelaksanaan UNPK-BK masih memiliki kekurangan diantaranya banyak lembaga/satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan UNPK-BK masih belum memiliki komputer, server, genset, dll sehingga untuk pelaksanaan UNPK-BK harus menumpang pada lembaga/satuan pendidikan lain (baik sekolah formal maupun satuan pendidikan non formal yang sudah memiliki alat tersebut). Selain hal tersebut kekurangan lainnya diantaranya adalah adanya pemadaman listrik, jaringan lambat hingga soal tidak muncul pada saat ujian berlangsung.

Namun demikian pemerintah terus melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya bagi lembaga/satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan untuk pelaksanaan UNPK-BK dapat menumpang pada lembaga/satuan pendidikan (baik sekolah formal maupun lembaga/satuan pendidikan non formal lainnya) yang sudah memiliki peralatan, selain itu juga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan PLN untuk masalah pemadaman listrik.

6. Perkembangan Model Pengelola Satuan PNF dan Layanan/Pembelajaran PNF

Dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, Ditjen PAUD dan Dikmas menelurkan berbagai kebijakan berupa program-program yang diselenggarakan oleh satuan PAUD dan Dikmas. Program-program dan kebijakan yang ditelurkan diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, fleksibel dalam penyelenggaraannya, praktis materi pembelajarannya, dan dapat disesuaikan waktu dan tempat pendidikannya dengan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka menetapkan kebijakan yang inovatif dan kreatif, Ditjen PAUD dan Dikmas memerlukan berbagai model pengembangan satuan dan program PAUD dan Dikmas untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, dan kepastian layanan pendidikan dalam rangka membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

a. Program dan Anggaran Pengembangan Model

Untuk Anggaran pelaksanaan pengembangan model telah dianggarkan pada masing-masing BP PAUD & Dikmas dan PP PAUD & Dikmas, sedangkan untuk validasi pengembangan model dianggarkan pada direktorat terkait.

Model program yang dikembangkan di antaranya adalah untuk pengembangan program pembelajaran, pemanfaatan sarana pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, pengembangan kecakapan hidup dalam membentuk karakter dan budaya bangsa sehingga terbentuk layanan Pendidikan Masyarakat yang berkualitas.

b. Kendala/Permasalahan Pengembangan Model

Kendala yang dirasakan pengembangan model saat ini adalah :

- 1) kurangnya atau belum meratanya kemampuan para pamong pada masing-masing BP PAUD & Dikmas dan PP PAUD & Dikmas,
- 2) kurangnya waktu pelaksanaan pengembangan model bagi PP PAUD & Dikmas yang baru terbentuk tahun ini dan masih banyak yang lainnya.
- 3) Sulitnya mengkoordinasikan kegiatan pengembangan model antara direktorat dengan BP PAUD & Dikmas dan PP PAUD & Dikmas.

7. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

a. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Pendidikan Keaksaraan

1) Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan:

- UU Sisdiknas Tahun 2003
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan

2) Kurikulum Pendidikan Keaksaraan Dasar

Berdasarkan Permendikbud No. 86 Tahun 2014 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan keaksaraan dasar dirinci dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dilengkapi dengan silabus, bahan ajar, pedoman pembelajaran, sistem dan prosedur penilaian.

Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar diatur dalam struktur program sebanyak 114 jam @60 menit yang terdiri atas keterampilan membaca dan menulis sebanyak 80 jam dan keterampilan berhitung sebanyak 34 jam.

Pencapaian hasil belajar pendidikan keaksaraan dasar merupakan kriteria capaian hasil belajar lulusan pendidikan keaksaraan dasar yang meliputi ranah **sikap, pengetahuan, dan keterampilan** sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan. Ketiga ranah tersebut mengandung unsur kompetensi sebagai berikut:

- a) Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada **ranah sikap** berupa memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada **ranah pengetahuan** berupa penguasaan pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung dalam hidup bermasyarakat.
- c) Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan dasar pada **ranah keterampilan** berupa kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

3) Kurikulum Pendidikan Keaksaraan Lanjutan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 42 tahun 2015 Kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan**. Ketiga ranah tersebut mengandung kompetensi sebagai berikut:

- a) Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan pada **ranah sikap** berupa dimilikinya perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab menjalankan peran dan fungsi dalam kemandirian berkarya di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
- b) Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan pada **ranah pengetahuan** berupa penguasaan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang pengembangan peran dan fungsi dalam kehidupan di masyarakat dengan memperkuat cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan berhitung untuk meningkatkan kualitas hidup.
- c) Capaian hasil belajar bagi lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan pada **ranah keterampilan** berupa kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung secara efektif dalam melakukan pengembangan peran dan fungsi untuk kemandirian berkarya di masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup.

Kurikulum/Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan keaksaraan lanjutan dilakukan minimal 86 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan keaksaraan lanjutan.

Kurikulum pada pendidikan keaksaraan lanjutan berupa program pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu yang fungsional yang terintegrasi dengan kehidupan keseharian peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Kurikulum program pendidikan keaksaraan lanjutan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas.

4) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Keaksaraan 2006 dan 2013

Berikut perbedaan perkembangan kurikulum keaksaraan 2006 dan 2013 adalah:

- a) Keaksaraan tahun 2006: Pendekatan yang dilakukan adalah komunikatif, hal yang dilakukan 4 keterampilan berbahasa (Mendengarkan, Berbicara, Membaca, Menulis) dan Pendekatan yang dilakukan adalah **pendekatan berhitung** yaitu memahami berhitung adalah eksak dan berhitung dikaitkan dengan angka.
- b) Keaksaraan tahun 2013: Pendekatan yang dilakukan adalah komunikatif, dan hal yang dilakukan berbasis teks yang diimplementasikan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Sedangkan pada tahun 2013 ini pendekatan yang dilakukan adalah **pendekatan konseptual** yaitu mengenalkan konsep pendekatan dan pikiran, perimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka (gambar, grafik, pola, dsb).

b. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

1) Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan:

- UU Sisdiknas tahun 2003.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket C.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

2) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permen Diknas 23/2006 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program Paket A, Paket B, dan Paket C, yaitu:

- Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Beban belajar program Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri.

Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang 12 dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C, dan berikut sruktur kurikulum untuk Paket A, Paket B dan Paket C Permendikbud Nomor 14 tahun 2007.

Tabel 3.15 Struktur Kurikulum Program Paket A

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I - III	Tingkatan 2 / Derajat Dasar setara Kelas IV-VI	Jumlah
1. Pendidikan Agama	9	9	18
2. Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3. Bahasa Indonesia	15	15	30
4. Matematika	15	15	30
5. Ilmu Pengetahuan Alam	12	12	24
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	9	9	18
7. Seni Budaya	6	6	12
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6	12
9. Keterampilan Fungsional ^{*)}	9	9	18
10. Muatan Lokal ^{**)}	6 ^{**)}	6 ^{**)}	12 ^{**)}
11. Pengembangan Kepribadian Profesional	6	6	12
Jumlah	102	102	204

Keterangan:
^{*)} Pilihan mata pelajaran
^{**)} Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3.16 Struktur Kurikulum Program Paket B

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara Kelas IX	Jumlah
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10. Keterampilan Fungsional ^{*)}	4	2	6
11. Muatan Lokal ^{**)}	4 ^{**)}	2 ^{**)}	6 ^{**)}
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
Jumlah	68	34	102

Keterangan:
^{*)} Pilihan mata pelajaran
^{**)} Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3.17 Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 setara Kls XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	8	10
7. Kimia	2	8	10
8. Biologi	2	8	10
9. Sejarah	1	2	3
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional ^{*)}	4 ^{*)}	8 ^{*)}	12 ^{*)}
16. Muatan Lokal ^{**)}	2 ^{**)}	4 ^{**)}	6 ^{**)}
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:
^{*)} Pilihan mata pelajaran
^{**)} Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

3.18 Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	3	4
10. Geografi	1	7	8
11. Ekonomi	2	8	10
12. Sosiologi	2	8	10
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional *)	4 ^{*)}	8 ^{*)}	12 ^{*)}
16. Muatan Lokal **)	2 ^{**)}	4 ^{**)}	6 ^{**)}
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

Tabel 3.19 Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	10	14
4. Bahasa Inggris	4	10	14
5. Matematika	4	6	10
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	4	5
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Antropologi	-	4	4
14. Sastra Indonesia	-	8	8
15. Bahasa Asing	-	8	8
16. Seni Budaya	2	4	6
17. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
18. Keterampilan Fungsional *)	4 ^{*)}	8 ^{*)}	12 ^{*)}
19. Muatan Lokal **)	2 ^{**)}	4 ^{**)}	6 ^{**)}
20. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

3) Urgensi Pembentukan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Sesuai Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C memiliki urgensi dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan kebutuhan hidup peserta didik. Dalam perkembangan awal, kurikulum kesetaraan sama dengan kurikulum pendidikan formal, sehingga kekhasan pendidikan nonformal dalam layanan pendidikan kesetaraan tidak terakomodasi dengan baik.

Melalui penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan kesetaraan karena kurikulum yang didesain disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pendidikan nonformal. Selain itu kurikulum pendidikan nonformal juga selain fokus pada pengembangan karakter, mutu lulusan pendidikan kesetaraan difokuskan pada pencapaian kompetensi vokasi/keterampilan.

4) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Tahun 2013

Pendidikan Kesetaraan tidak hanya menjadi pelengkap, akan tetapi akhir-akhir ini sudah menjadi alternatif pilihan masyarakat yang menganggap jalur pendidikan nonformal merupakan pilihan layanan pendidikan yang cocok bagi anaknya. Perkembangan dan implementasi kurikulum pendidikan kesetaraan beberapa tahun terakhir dianggap penting karena banyak yang tertarik untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu perlunya penyempurnaan kurikulum pendidikan kesetaraan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini :

- a) Pelaksanaan pembelajaran kesetaraan harus *fleksibel* (menerapkan sistem multi exit-muti entri) terkait dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik kesetaraan yang bervariasi.
- b) Pendidikan non formal (termasuk kesetaraan) tidak lagi menjadi pelengkap atau pengganti, tetapi sebagai *alternatif* yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai kebutuhannya.
- c) Pendidikan kesetaraan harus dapat memberikan muatan yang menjadikan lulusan kesetaraan memiliki *keterampilan fungsional* untuk meningkatkan kualitas hidup.
- d) Kurikulum dan pembelajaran kesetaraan lebih tepat menggunakan bentuk *modular* dan *tematik* untuk memberikan layanan pendidikan yang fleksibel dan adaptif, di mana saja dan kapan saja, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan peserta didik dengan menekankan 70% belajar melalui praktek dan 30% belajar pengetahuan.
- e) Muatan kurikulum kesetaraan meliputi *core subjects* serta *optional subjects* yang bersifat *progresif* (mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan) dan *academic incline* (bagi yang studi lanjut), berorientasi pada pekerjaan, pemberdayaan dan pengembangan diri
- f) Pengembangan kurikulum kesetaraan perlu mempertimbangkan keterampilan vokasi, terutama pada paket C perlu mempertimbangkan *pelevelan* pada kualifikasi kejuruan nasional Indonesia (KKNI).
- g) Kurikulum kesetaraan perlu dikembangkan dimulai setara kelas I SD mengingat peserta didik usia sekolah pada beberapa daerah tidak dapat mengakses pendidikan formal. Sedangkan peserta didik usia dewasa yang masih buta aksara dapat mengikuti pendidikan kesetaraan setelah mengikuti pendidikan keaksaraan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama satker dan instansi terkait merencanakan strategi untuk penyempurnaan kurikulum pendidikan kesetaraan yaitu merevisi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2017 ini sudah membuat/merancang struktur kurikulum kesetaraan yang diusulkan meliputi *core subjects* (mata pelajaran inti) serta *optional subjects* (subjek pilihan).

Strategi dan pendekatan pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dapat dirancang secara tematik-terpadu atau menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan kesetaraan dan peserta didik.

Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C terdiri dari dua kelompok mata pelajaran yaitu kelompok umum dan kelompok khusus.

Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar pendidikan formal sesuai Peraturan Mendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi serta kontennya dikembangkan oleh pusat dan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik.

Untuk paket C pada Kelompok umum termasuk mata pelajaran peminatan, yang terbagi menjadi 3 pilihan, yaitu: Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, dan Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya.

Sedangkan kelompok khusus memuat mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan yaitu:

- Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi: Pengembangan diri, pengembangan kapasitas, seni budaya dan prakarya, dan Pendidikan Olahraga dan Rekreasi.
- Keterampilan merupakan muatan yang memperhatikan variasi potensi sumber daya yang ada dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan dan kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif.

Untuk Paket C Keterampilan terbagi menjadi dua pilihan, yaitu non sertifikasi dan tersertifikasi. Khusus untuk keterampilan tersertifikasi merupakan keterampilan yang dituntut uji kompetensi oleh lembaga yang berhak di akhir programnya. Alokasi SKK dalam Struktur kurikulum untuk keterampilan terstruktur/tersertifikasi merupakan alokasi waktu untuk penguasaan pengetahuan, kebutuhan beban belajar untuk praktik disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diambil dan diatur oleh lembaga yang melakukan sertifikasi.

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur kurikulum yang sedang diajukan dapat tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Struktur Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

PAKET A (Tingkatan 1 & 2)	PAKET B (Tingkatan 3 & 4)	PAKET C (Tingkatan 5 & 6)
Kelompok Umum :	Kelompok Umum :	Kelompok Umum :
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia	3. Bahasa Indonesia	3. Bahasa Indonesia
4. Matematika	4. Bahasa Inggris	4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5. Matematika	5. Sejarah Indonesia
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	6. Ilmu Pengetahuan Alam	6. Bahasa Inggris
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	

PAKET A (Tingkatan 1 & 2)	PAKET B (Tingkatan 3 & 4)	PAKET C (Tingkatan 5 & 6)
Kelompok Khusus :	Kelompok Khusus :	Peminatan Matematika dan Ilmu Alam:
1. Pemberdayaan	1. Pemberdayaan	1. Matematika
2. Keterampilan	2. Keterampilan	2. Biologi
		3. Fisika
		4. Kimia
		Peminatan Ilmu-ilmu Sosial :
		1. Geografi
		2. Sejarah
		3. Sosiologi
		4. Ekonomi
		Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya:
		1. Bahasa dan Sastra Indonesia
		2. Bahasa dan Sastra Inggris
		3. Bahasa Asing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, Perancis)
		4. Antropologi
		Kelompok Khusus :
		1. Pemberdayaan
		2. Keterampilan :
		- Non sertifikasi
		- Tersertifikasi

Beban belajar program dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit Paket B, 45 menit Paket C.

Berikut penjelasan Tingkatan pada Pendidikan Kesetaraan dan jumlah bobot SKK Pada masing-masing tingkatan :

- a) Muatan dan kompetensi Tingkatan 1/ setara dengan kelas I – III pada jenjang pendidikan formal (Jumlah SKK : 102).
- b) Muatan dan kompetensi Tingkatan 2/ setara dengan kelas IV – VI pada jenjang pendidikan formal (Jumlah SKK : 117).
- c) Muatan dan kompetensi Tingkatan 3/ setara dengan kelas VII – VIII pada jenjang pendidikan formal (Jumlah SKK : 80).
- d) Muatan dan kompetensi Tingkatan 4/ setara dengan kelas IX pada jenjang pendidikan formal (Jumlah SKK : 38).
- e) Muatan dan kompetensi Tingkatan 5/ setara dengan kelas X – XI pada jenjang pendidikan formal (Jumlah SKK : 80).
- f) Muatan dan kompetensi Tingkatan 6/ setara dengan kelas XII pada jenjang pendidikan formal (Jumlah SKK : 42).

Untuk pelaksanaan kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap pada beberapa tahun kedepan, direncanakan pada tahun 2018 yang akan melaksanakan kurikulum 2013 pada kelas IV, VII, X. Pada tahun 2019 direncanakan yang akan melaksanakan kelas IV, V, VII, VIII, X, XI. Dan pada tahun 2020 direncanakan yang akan melaksanakan kurikulum 2013 yaitu pada kelas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Buku ini telah menyajikan hasil analisis tentang berbagai hal yang terkait dengan pengembangan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang meliputi; (1) jumlah dan karakteristik sasaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; (2) program dan anggaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan (3) capaian program keaksaraan dan kesetaraan dengan berbagai kondisi dan permasalahannya. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendidikan Keaksaraan di Indonesia telah dapat dilaksanakan secara baik dan mendapat pengakuan dari berbagai pihak termasuk dari dunia internasional. Beberapa hal penting tentang kondisi, perkembangan dan permasalahan pendidikan keaksaraan di Indonesia adalah:
 - a. Jumlah sasaran pendidikan keaksaraan dasar (KD) yaitu jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selama 3 tahun terakhir jumlah penduduk buta aksara menurut sekitar 1,63% dari 3,70% tahun 2014 menjadi 2,07% pada akhir tahun 2016;
 - b. Keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi dari upaya berbagai pihak terkait yang secara serius mengembangkan layanan pendidikan keaksaraan antara lain;
 - 1) Kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD Dikmas, telah berusaha mengembangkan kurikulum pendidikan keaksaraan dasar dan memberikan bantuan operasional (BOP) Keaksaraan dasar yang difokuskan pada daerah kantong buta aksara serta pada kawasan adat terpencil, daerah 3T dan provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun melaksanakan Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan merayakan Hari Aksara Internasional (HAI), sekaligus memberikan penghargaan kepada kepala daerah (Bupati dan Walikota) yang sukses melaksanakan pemberantasan buta aksara.
 - 2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terutama pada daerah kantong buta aksara telah mengalokasikan dana dan bekerjasama dengan para pegiat literasi dan satuan PNF untuk pemberantasan buta aksara.
 - c. Pendidikan keaksaraan dasar (KD) saat ini sudah tidak lagi menjadi prioritas, karenanya program pengembangan budaya baca menjadi tantangan baru yang harus ditingkatkan karena budaya baca masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu ukuran literasi bukan lagi hanya sebatas membaca menulis dan berhitung (calistung), melainkan ada 6 aspek literasi abad 21 yang telah menjadi komitmen Badan PBB bidang pendidikan (UNESCO) yaitu; (1)

literasi baca tulis; (2) literasi numerasi; (3) literasi sains; (4) literasi TIK; (5) literasi finansial; dan (6) literasi budaya dan kewargaan.

- d. Untuk mendukung pengembangan program Literasi abad 21 tersebut Kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas, telah meluncurkan berbagai layanan program dan anggaran program keaksaraan (literasi) lanjutan antara lain; (1) keaksaraan usaha mandiri (KUM); (2) multi keaksaraan (MK); (3) Kampung Literasi. Serta didukung oleh kegiatan sosialisasi/gebyar keberaksaraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat luas melalui kegiatan “Gerakan Indonesia Membaca (GIM)” untuk skala lokal dan regional, serta pelaksanaan puncak perasayaan “Hari Aksara Internasional (HAI)” baik untuk skala lokal dan regional maupun untuk tingkat nasional.
 - e. Permasalahan yang masih dirasakan di lapangan terkait pelaksanaan program keaksaraan lanjutan tersebut antara lain; (1) kurang maksimalnya pencapaian kompetensi KD sehingga mereka yang mengikuti KUM masih banyak yang masih kurang mampu Calistung; (2) program KUM dan Multiaksara belum sepenuhnya dipahami perbedaannya sehingga kegiatan yang dilaksanakan sama; (3) kesulitan SDM karena pada umumnya program keaksaraan (literasi) dilakukan oleh para pegiat yang lebih menonjol spiritnya daripada kompetensinya; (4) pemerintah daerah dan masyarakat belum memahami urgensi dan manfaat dari pengembangan literasi lanjutan sehingga masih minim dukungan program dan pendanaan.
2. Pengembangan budaya baca di Indonesia masih mengalami kendala dan permasalahan yang cukup berat. Berbagai indikasi pengukuran di tingkat internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih rendah dalam capaian budaya baca. Kendatipun demikian masih sangat sedikit upaya dan anggaran yang dikerahkan untuk pengembangan budaya baca. Rendahnya budaya baca pada umumnya diatasi dengan peningkatan pendidikan keaksaraan (keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan) yang seringkali tidak ada pengaruhnya pada peningkatan budaya baca. Beberapa program terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan antara lain adalah;
- a. Pengembangan dan penguatan Taman bacaan Masyarakat (TBM) baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri maupun sebagai layanan di satuan PNF seperti di SKB dan PKBM.
 - b. Pengembangan Kampung Literasi di beberapa wilayah dimana ada pegiat literasi yang aktif mengembangkan keberaksaraan masyarakat dan membangun sentra-sentra literasi untuk peningkatan kompetensi calistung, komunikasi dan minat baca.
 - c. Program sebar buku ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka melengkapi buku dan referensi bacaan bagi TBM yang selama ini sangat minim bahan bacaan. Kegiatan ini didukung oleh aplikasi “donasi buku online” yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bekerjasama dengan para pegiat literasi.
 - d. Permasalahan yang masih dirasakan di lapangan terkait pelaksanaan program pengembangan budaya baca tersebut antara lain; (1) minimnya sumber dana APBN untuk penguatan kelembagaan TBM; (2) Belum adanya sosialisasi dan koordinasi serta Diklat bagi para pengelola untuk peningkatan kualitas layanan TBM; (3) Kampung literasi belum seluruhnya dapat berkembang dengan baik pasca rintisan, karena terbentur biaya operasional dan SDM; (4) program sebar buku belum bisa merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota, karena para

pegiat literasi yang sebagian besar mengelola TBM masih terfokus pada daerah tertentu yang memiliki akses cepat ke pemerintah daerah dan ke pusat.

3. Pengembangan Pendidikan Kesetaraan sangat strategis dalam menunjang pendidikan nasional dilihat dari kontribusinya terhadap angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat SD, SMP, SMA melalui Program paket A, paket B dan paket C. Beberapa hal menarik yang patut dicatat selama pengelolaan program pendidikan kesetaraan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut;
 - a. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan semakin terukur baik dari jumlah lembaga penyelenggara, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Melalui DAPODIKMAS, data pendidikan kesetaraan setiap saat dapat dilihat secara detail (realtime) dengan dukungan aplikasi pendataan online yang terintegrasi dengan DAPODIK secara menyeluruh di lingkungan Kemendikbud. Melalui aplikasi DAPODIK tersebut perubahan penting telah terjadi yaitu;
 - 1) Jumlah lembaga/satuan PNF (SKB dan PKBM) penyelenggara pendidikan kesetaraan yang aktif semakin bertambah setiap tahunnya yang ditandai dengan jumlah satuan PNF yang memiliki NPSN dan mengisi data DAPODIK;
 - 2) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dapat dihitung kecukupan/kelayakannya menurut jumlah, tingkat pendidikan dan kualifikasinya serta perannya dalam pendidikan nonformal (sebagai tugas utama atau tuas tambahan)
 - 3) Peserta didik dapat dilihat “by name by address” berdasarkan data referensi yang disebut NISN (nomor induk siswa nasional). Selain itu juga bisa dilihat keaktifan mengikuti pembelajarannya dari data “Rombel” yang menunjukkan di kelompok mana dan di tingkat berapa mereka tergabung. Jumlah peserta didik meningkat tajam pada tahun pelajaran 2016 dan 2017 karena Ditjen PAUD dan Dikmas melalui UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas telah melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan sebagian besar didaftarkan menjadi peserta didik pendidikan kesetaraan.
 - 4) Substansi pendidikan dapat secara jelas diketahui melalui DAPODIK, karena di data rombel bukan hanya memuat data tingkat dan nama rombel, tetapi juga nama pendidik beserta substansi/mata pelajaran yang diajarkannya. Dengan demikian peserta didik yang ada di rombel tertentu bisa dideteksi dia ada di tingkat berapa, mata pelajaran apa yang ditempuhnya dan siapa guru pengampunya.
 - b. Pengembangan Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan (Kurikulum berbasis kompetensi) dengan penguatan karakter peserta didik telah dilakukan sejak tahun 2015. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan adalah “Kontekstualisasi”. Dengan tidak mengurangi taret capaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI), maka muatan kurikulum (Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar) pada setiap mata pelajaran dibuat lebih kontekstual dengan kondisi lingkungan sosial, budaya, dan tuntutan kerja dimana mereka berada sehingga pembelajaran dilaksanakan sangat terkait dengan pengalaman nyata.
 - c. Pengembangan pembelajaran *online* khususnya untuk program Paket C telah dikembangkan dan mulai dirintis pelaksanaannya di lapangan. “*Learning management system (LMS)*” dan konten pembelajaran telah dikembangkan sebagai Model Pembelajaran unggulan di

UPT Pusat pengembangan (PP) PAUD dan Dikmas Jawa Barat dan PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah. Sejumlah peserta didik dari berbagai satuan PNF telah mengikuti kegiatan pembelajaran online tersebut.

- d. Ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) telah secara massif diikuti oleh peserta didik program Paket B dan Paket C. Bahkan dalam 2 tahun terakhir telah dilakukan UNPK berbasis komputer (UNPK-BK). 30% peserta UNPK mengikuti ujian berbasis komputer (UNBK). Hal ini semakin meyakinkan bahwa hasil pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat dinilai setara dan sederajat dengan pendidikan formal.
 - e. Permasalahan yang masih dirasakan di lapangan terkait pengembangan program pendidikan kesetaraan tersebut antara lain; (1) sumber dana APBN mengalami penurunan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir; (2) Pengisian DAPODIK khususnya untuk data peserta didik selalu terlambat sehingga menyulitkan untuk perhitungan jumlah peserta didik penerima BOP dan calon peserta UNPK dan UNPK-BK tahun berjalan; (3) Belum jelasnya pendanaan untuk pelatihan atau TOT kurikulum pendidikan kesetaraan 2013; (4) pembelajaran online masih terkendala dengan sarana prasarana TIK serta fasilitas jaringan internet yang dibutuhkan peserta didik.
4. Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan merupakan bagian dari program pendidikan sepanjang hayat yang juga amanat dari hasil World Education Forum yang dimotori oleh UNESCO dan Gubernur Jenderal PBB (Korea Selatan) tahun 2015 di Incheon City. Beberapa hal yang terkait dengan perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia adalah sebagai berikut;
- a. Pendidikan dan pembelajaran orang dewasa atau “*Adult Learning and Education*” (ALE). ALE telah menjadi salah satu program prioritas dari negara anggota UNESCO karena telah dirumuskan dalam dokumen “*Sustainable Development Goals (SDGs)*” yaitu pada Goal 4 tentang Education. Pertemuan terakhir UNESCO untuk mengkoordinasikan capaian ALE telah diadakan di Korea Selatan (Suwon City) pada tanggal 23-25 Oktober 2017 yang dihadiri oleh 103 negara Anggota Unesco dan menghasilkan pengatan komitmen untuk pencapaian target ALE yang akan dibahas pada Confintea VII tahun 2021. Indonesia sangat komitmen dengan pengembangan pendidikan orang dewasa yang selama ini dikelola melalui pendidikan nonformal dan informal.
 - b. Program Pendidikan Vokasional pada Paket C telah dikembangkan sejak tahun 2015 dimana peserta didik paket C yang telah selesai menempuh pembelajaran akademik diberikan tambahan Diklat keterampilan Vokasi dengan ketentuan; (1) vokasi yang terstruktur (tersedia kurikulum nasional) dan (2) ada uji kompetensinya di lembaga TUK.
 - c. Pengembangan Desa Vokasi menjadi terobosan dalam mengembangkan pendidikan orang dewasa yang berorientasi pada pendidikan berkelanjutan atau sepanjang hayat. Melalui kegiatan desa vokasi masyarakat pedesaan yang sudah dewasa bisa mengembangkan kegiatan vokasinya yang selama ini sudah tumbuh dan berkembang menjadi pendukung perekonomian masyarakat setempat. Melalui program Desa Vokasi diharapkan adanya peningkatan efektifitas, efisiensi, produktivitas dan kehidupan ekonomi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta management produksi dan pemasaran secara langsung dan secara online.
 - d. Gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan marjinal (GP3M) adalah kegiatan

sosialisasi dan Gebyar pengembangan orang dewasa tau pendidikan berkelanjutan dengan memberdayakan kaum perempuan terutama yang termarjinalkan. Melalui kegiatan ini diharapkan semua pemangku kepentingan, pemerintah daerah dan masyarakat bisa memahami urgensi dan manfaat pendidikan sepanjang hayat melalui pemberdayaan perempuan sehingga bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas warga masyarakat dalam kegiatan produksi dan meningkatkan pendapatan.

5. Pengembangan Kelembagaan atau satuan Pendidikan penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan masih bagian dari Direktorat Ditbindiktara dalam rangka memastikan ketersediaan lembaga dan program yang berkualitas bagi masyarakat. Sampai dengan tahun 2017 Jumlah satuan pendidikan yang resmi memiliki NPSN mencapai angka 11.000 atau lebih. Sedangkan jumlah SKB yang beralihfungsi menjadi satuan pendidikan sudah lebih dari 300 lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang menjadi satuan PNF sudah semakin transparan dan dideteksi dengan mudah. Tidak ada lagi yang hanya hidup jika ada bantuan. Bahkan penerapan akreditasi kelembagaan dan program/layanan pendidikan sudah resmi diberlakukan untuk PKBM dan SKB menggunakan 8 standar nasional pendidikan seperti yang diberlakukan di satuan pendidikan formal. Bahkan manajemen akreditasi sudah ada secara terstruktur mulai dari pusat ada BAN PAUD dan Dikmas, di tingkat provinsi ada BAP dan di tingkat kabupaten/Kota ada Pokja Akreditasi. Permasalahan yang terkait dengan kelembagaan atau satuan PNF penyelenggara Diktara antara lain;
 - a. Belum semua satuan PNF yang memiliki NPSN (ada di DAPODIKMAS) aktif menginput data secara periodik. Masih banyak (sekitar 20%) PKBM belum menginput data yang mutakhir di DAPODIK
 - b. Masih ada sekitar 100 SKB (25%) yang belum menjadi satuan pendidikan atau masih berbentuk UPTD tapi tetap menyelenggarakan layanan PNF
 - c. Satuan PNF (SKB dan PKBM) yang sudah terakreditasi baru sekitar 16%, sehingga sebagian besar PKBM dan SKB masih mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan UNPK apalagi UNPK-BK.
6. Hal lain yang terkait dengan peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan program/layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan adalah belum maksimalnya pengembangan mutu serta pengembangan model pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang merupakan Tusi UPT Pusat dan Balai pengembangan PAUD dan Dikmas. Permasalahan yang masih tampak antara lain;
 - a. Pengembangan mutu program dan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan masih belum bisa mendorong peningkatan kualitas layanan (akreditasi) dan hasil pembelajaran (UN). Aplikasi pendataan mutu telah dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan pendampingan program akreditasi ke lembaga. Hal tersebut belum cukup untuk mendorong peningkatan akreditasi PKBM dan SKB. Begitu juga pelaksanaan UN (UNKP dan UNPK-BK) mulai dari pendataan di DAPODIK, verifikasi data di PDUN dan verifikasi akhir (daftar nominasi tetap) masih banyak hambatan baik dari aplikasi/sistem maupun dari sisi pengelolaan.
 - b. Pengembangan Model yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan melalui pemecahan masalah dan pemodelan belum efektif.
 - c. Penganggaran untuk program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan secara bertahap semakin

merata untuk semua program dan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Pendanaan untuk pendidikan keaksaraan yang semula lebih fokus untuk pendidikan keaksaraan dasar (KD) dan keaksaraan usaha mandiri (KUM) sudah mulai memasuki program dan layanan multi keaksaraan dan pengembangan budaya baca (revitalisasi TBM dan pengembangan kampung literasi). Sedangkan untuk pendidikan kesetaraan yang semula fokus pada operasional program Paket A, Paket B dan Paket C, juga sudah mulai merambah pada program Paket C Vokasi dan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP). Bahkan pada tataran yang lebih umum sebagian dana dialokasikan untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat terhadap program Bindiktara melalui kegiatan “Gerakan Indonesia Membaca (GIM)” dan “Gerakan pemberdayaan perempuan marginal (GP3M)”. Kendatipun demikian masih ada setumpuk permasalahan dalam pembiayaan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan antara lain;

- d. Selama 3 tahun terakhir (sejak pengelolaannya kembali ke Ditjen PAUD dan Dikmas) secara signifikan terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran prioritas dalam pembangunan pendidikan nonformal. Peningkatan jumlah DAK BOP PAUD, peningkatan pendidikan vokasi (kursus) dan pengelolaan pendidikan keluarga (satker baru) menyebabkan dana APBN untuk PNF harus dirasionalkan kembali. Bahkan mulai tahun anggaran 2017 ada penambahan 21 satker UPT baru yang semula hanya 8 satker UPT-PP PAUD Dikmas dan BP-PAUD dan Dikmas menjadi 29 UPT.
- e. Jumlah peserta didik kesetaraan terutama yang berasal dari usia sekolah (ATS) meningkat secara signifikan dari sekitar 100 ribu orang menjadi sekitar 400 ribu orang, sementara alokasi dana BOP pendidikan kesetaraan secara signifikan terus menurun, dan pada tahun 2017 hanya cukup untuk 185 ribu orang (dewasa dan ATS).
- f. Dukungan pemerintah daerah (APBD) untuk program keaksaraan dan kesetaraan masih minim. Sebagian besar Pemda Kabupaten/kota tidak mengalokasikan dana untuk Bindiktara karena mereka belum faham urgensi pendidikan orang dewasa dan lebih fokus pada PAUD.

B. Rekomendasi

1. Pengembangan Program Keaksaraan perlu lebih fokus pada pengembangan program keaksaraan lanjutan dengan menekankan pada 5 tema pembelajaran Multiaksara yang meliputi; (1) .. (5). Kelima tema tersebut harus dikaitkan dengan tuntutan literasi abad 21 yang meliputi literasi; (1) baca tulis; (2) numerasi; (3) Sain; (4) TIK; (5) Finansial dan (6) Budaya dan kewargaan. Dengan demikian paling tidak ada 30 variasi program pembelajaran aatau lebih yang terkait dengan program keaksaraan lanjutan. Kegiatan yang sifatnya seremonial seperti pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) sudah saatnya diminimalkan karena masyarakat masih banyak sumberdaya yang diperlukan untuk implementasi program keberaksaraan lanjutan tersebut di tingkat penyelenggara.
2. Pengembangan Budaya Baca sudah saatnya mendapatkan perhatian yang lebih baik mengingat ukuran literasi selalu dikaitkan dengan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) baik yang ada di satuan pendidikan maupun yang berdiri sendiri perlu distandarkan kompetensi pengelolaannya agar jatidirinya benar-benar menjelma di seluruh lapisan masyarakat bahwa TBM merupakan wadah para kreator literasi, tempat berkumpulnya para pegat PNF yang dengan segera kreasinya aktif mengembangkan keberaksaraan/literasi

masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran orang dewasa (adult learning and education). Selain itu Kampung literasi yang sudah dibentuk perlu lebih diberdayakan dan dioptimalkan untuk menjadi percontohan kawasan pengembangan literasi masyarakat melalui peningkatan kapasitas para pengelolanya. UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas tentunya sangat bisa melaksanakan peran tersebut.

3. Pengembangan Pendidikan kesetaraan harus segera melakukan rintisan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (Daring). Menjelang pemberlakuan kurikulum pendidikan kesetaraan 2013 yang lebih menekankan pada pembelajaran tutorial dan pembelajaran mandiri, peran teknologi informasi melalui “learning management system: (LMS) sangat diperlukan. Melalui perangkat pembelajaran berbasis TIK tersebut dikolaborasi dengan sistem pendataan berbasis DAPODIK, maka layanan pendidikan kesetaraan yang lebih efektif dan efisien akan dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan sistem penilaian hasil belajar perlu dikembangkan berbasis TIK sehingga penilaian formatif, dan sub sumatif bisa dilakukan lebih efisien.
4. Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan juga perlu mendapat perhatian yang lebih spesifik karena dapat menjadi indikator keberhasilan pembelajaran sepanjang hayat (*Lifelong Learning*) yang juga merupakan kesempatan negara-negara anggota UNESCO, tetapi harus prioritas pada program yang langsung bersentuhan dengan peserta didik. Dengan demikian Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (GP3M) yang lebih bersifat sosialisasi harus di minimalkan. Sedangkan program yang langsung berbentuk layanan seperti Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKHP) marginal, paket C Vokasi perlu ditingkatkan kualitasnya dan jangkauan layanannya. Pengembangan Desa Vokasi secara selektif perlu tetap dilakukan terutama pada daerah-daerah potensial pengembangan produk lokal yang berbasis masyarakat.
5. Pengembangan Kelembagaan khususnya untuk SPNF SKB dan PKBM merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan layanan PNF serta memenuhi tuntutan akreditasi. Beberapa hal mendesak antara lain;
 - a. Penertiban nomor pokok kelembagaan yaitu Nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSN), agar yang sudah memiliki NPSN benar-bear menjalankan fungsinya secara efektif sebagai satuan PNF
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan kelembagaan dalam rangka persiapan akreditasi secara bertahap sangat diperlukan karea terkait dengan pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan baik ujian nasional (UNKP dan UNBK) serta ujian tingkat satuan pendidikan. Hal ini bisa dikoordinasikan oleh UPT PAUD Dikmas bekerjasama dengan BAP PAUD dan PNF di masing-masing provinsi dan melibatkan Pokja Akreditasi Kabupaten/Kota serta lembaga mitra terkait (Forum PKBM dan SKB).
 - c. Pengembangan Peta Konsep pengembangan SPNF SKB dan PKBM perlu segera dilakukan. Hal ini sangat diperlukan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Satuan pendidikan (RIPS) SPNF SKB dan PKBM. Sehingga perencanaan jenis program dan jumlah layanan SKB dan PKBM lebih terarah dan terencana, termasuk perencanaan pengembangan sarana dan prasarananya.
 - d. Pengembangan aplikasi pengajuan usulan program (proposal) dan pelaporan bantuan kelembagaan dan program untuk SPNF SKB dan PKBM perlu segera dikembangkan dengan basis data DAPODIK. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan APBN

maupun APBD akan lebih meningkat dan memberikan efek ganda selain untuk membantu proses seleksi yang akuntabel juga untuk mendorong satuan pendidikan SKB dan PKBM melengkapi DAPODIK.

6. Pengelolaan Penganggaran Bindiktara perlu lebih fokus pada hal yang prioritas. Karena jumlah dan volume perjalanan dinas dikurangi, maka fokus penganggaran harus lebih memperhatikan program prioritas yang dapat mendorong kinerja Direktorat Bindiktara. Dengan kata lain mayoritas alokasi anggaran langsung terkait dengan output yang telah ditentukan dalam RENSTRA Bindiktara 2015-2019, apalagi target terpasang jauh lebih tinggi dari kemampuan anggaran APBN yang ada. Hal lain yang juga penting dalam penganggaran adalah bahwa setiap pemberian bantuan APBN, harus senantiasa dikaitkan dengan kepedulian PEMDA dalam bentuk *sharing* dana dari APBD. Hal ini sangat penting untuk mengejar taret Renstra yang memang terlanjur sudah tinggi.



LAMPIRAN
DATA PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
TIGA TAHUN TERAKHIR

TABEL 19. JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA DIDIK DESA VOKASI DAN GP3M TAHUN 2016-2017

No.	Provinsi	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Lokasi GP3M	Lembaga DV	Warga Binaan	Lokasi GP3M	Lembaga DV	Warga Binaan
1	Aceh	1	1		1	1	
2	Sumatera Utara	1	1		1	1	
3	Sumatera Barat	1	1		1	1	
4	Riau				1	1	
5	Kepulauan Riau	1	1		1	1	
6	Jambi				1	1	
7	Sumatera Selatan				1	1	
8	Bangka Belitung				1	1	
9	Bengkulu	1	1		1	1	
10	Lampung				1	1	
11	Banten	1	1		1	1	
12	DKI Jakarta				1	1	
13	Jawa Barat	2	2		1	1	
14	Jawa Tengah	3	2		1	3	
15	D.I. Yogyakarta				1	1	
16	Jawa Timur	2	2		2	2	
17	Bali	1	1		1	1	
18	NTB	1	1		1	1	
19	NTT	1	1			0	
20	Kalimantan Barat	1	1		1	1	
21	Kalimantan Tengah				1	1	
22	Kalimantan Selatan				1	1	
23	Kalimantan Timur					0	
24	Kalimantan Utara	1	1		1	1	
25	Sulawesi Utara	1	1		1	1	
26	Sulawesi Barat					1	
27	Sulawesi Tengah				1	1	
28	Sulawesi Tenggara					1	
29	Sulawesi Selatan				1	1	
30	Gorontalo	1	1		1	1	
31	Maluku	1	1		1	1	
32	Maluku Utara				1	1	
33	Papua Barat				1	1	
34	Papua				1	1	
35							
Jumlah		21	20	-	31	35	-

TABEL 20. JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA DIDIK PROGRAM KAMPUNG LITERASI TAHUN 2016-2017

No.	Provinsi	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Lokasi GIM	Lembaga KL	Warga Binaan	Lokasi GIM	Lembaga KL	Warga Binaan
1	Aceh	1	1		1	1	
2	Sumatera Utara	1	1		1	1	
3	Sumatera Barat	1	1		1	1	
4	Riau	1	1				
5	Kepulauan Riau		0			1	
6	Jambi	1	1				
7	Sumatera Selatan	1	1		1	1	
8	Bangka Belitung	1	1		1	1	
9	Bengkulu	1	1		1		
10	Lampung		1		1		
11	Banten	1	1			1	
12	DKI Jakarta		0			1	
13	Jawa Barat	1	1		1	5	
14	Jawa Tengah	1	1		2	8	
15	D.I. Yogyakarta	1	1		1	2	
16	Jawa Timur	1	1		1	5	
17	Bali	1	1				
18	NTB	1	1		1	2	
19	NTT	1	1				
20	Kalimantan Barat	1	1			1	
21	Kalimantan Tengah	1	1				
22	Kalimantan Selatan	1	1		1	1	
23	Kalimantan Timur	1	1		1	2	
24	Kalimantan Utara	1	1				
25	Sulawesi Utara		1		1	1	
26	Sulawesi Barat	1	1				
27	Sulawesi Tengah		0		1	2	
28	Sulawesi Tenggara		1				
29	Sulawesi Selatan	1	1		1	1	
30	Gorontalo	1	1				
31	Maluku	1	1				
32	Maluku Utara	1	1				
33	Papua Barat	1	1			1	
34	Papua	1	1				
35							
Jumlah		28	31	-	18	39	-

TABEL 33. PROGRAM DAN ANGGARAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2015-2017

No.	Provinsi	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jml Kab/Kota Penerima	Jumlah PD	Rp.	Jml Kab/Kota Penerima	Jumlah PD	Rp.	Jml Kab/Kota Penerima	Jumlah PD	Rp.
1	Aceh			-	2	1.380	828.000.000			-
2	Sumatera Utara	1	1.700	1.020.000.000	1	600	360.000.000	2	800	480.000.000
3	Sumatera Barat	13	1.740	1.044.000.000			-	1	500	300.000.000
4	Riau			-			-			-
5	Kepulauan Riau			-	1	380	228.000.000			-
6	Jambi			-			-			-
7	Sumatera Selatan			-	1	1.000	600.000.000			-
8	Bangka Belitung			-			-			-
9	Bengkulu			-			-			-
10	Lampung			-	1	600	360.000.000	1	400	240.000.000
11	Banten	1	1.190	714.000.000			-	1	1.000	600.000.000
12	DKI Jakarta			-			-			-
13	Jawa Barat	9	14.430	8.658.000.000	8	8.090	4.854.000.000	7	4.500	2.700.000.000
14	Jawa Tengah	4	7.050	4.230.000.000	7	5.270	3.162.000.000	7	3.000	1.800.000.000
15	D.I. Yogyakarta			-			-			-
16	Jawa Timur	14	24.930	14.958.000.000	13	17.520	10.512.000.000	13	7.950	4.770.000.000
17	Bali			-	3	1.100	660.000.000	3	1.100	660.000.000
18	NTB	3	2.810	1.686.000.000	3	2.790	1.674.000.000	3	1.300	780.000.000
19	NTT			-	3	1.520	912.000.000	5	1.500	900.000.000
20	Kalimantan Barat	5	3.150	1.890.000.000	3	1.360	816.000.000	6	2.300	1.380.000.000
21	Kalimantan Tengah			-			-			-
22	Kalimantan Selatan			-			-			-

23	Kalimantan Timur			-			-			-
24	Kalimantan Utara			-			-			-
25	Sulawesi Utara			-			-			-
26	Sulawesi Barat	4	1.200	720.000.000	2	900	540.000.000	1	400	240.000.000
27	Sulawesi Tengah	6	2.050	1.230.000.000	2	1.800	1.080.000.000	2	800	480.000.000
28	Sulawesi Tenggara	14	6.490	3.894.000.000	1	500	300.000.000	1	350	210.000.000
29	Sulawesi Selatan	15	7.160	4.296.000.000	4	3.400	2.040.000.000	3	1.650	990.000.000
30	Gorontalo			-			-			-
31	Maluku			-			-			-
32	Maluku Utara			-			-			-
33	Papua Barat	4	3.600	2.160.000.000	3	1.500	900.000.000	1	500	300.000.000
34	Papua	17	17.700	10.620.000.000	11	8.230	4.938.000.000	12	7.050	4.230.000.000
35	Pusat	17	17.700	10.620.000.000	11	8.230	4.938.000.000	1	6.300	3.780.000.000
	Jumlah	127	112.900	67.740.000.000	80	66.170	39.702.000.000	70	41.400	24.840.000.000

TABEL 34. PROGRAM DAN ANGGARAN PROGRAM KEAKSARAAN DASAR 3T PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2015-2017

No.	Provinsi	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jml Kab/Kota Penerima Dana	Jumlah PD	Rp.	Jml Kab/Kota Penerima Dana	Jumlah PD	Rp.	Jml Kab/Kota Penerima Dana	Jumlah PD	Rp.
1	Papua Barat	3	3.170	1.268.000.000	1	1.000	750.000.000	1	500	375.000.000
2	Papua	16	38.330	15.332.000.000	12	12.580	9.435.000.000	14	7.000	5.250.000.000
	Jumlah	19	41.500	16.600.000.000	13	13.580	10.185.000.000	15	7.500	5.625.000.000

CATATAN: